



MILIK DEPDIKBUD
Tidak diperdagangkan

**SISTEM KEPEMIMPINAN
DI DALAM
MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SUMATERA SELATAN**



Direktorat
Kebudayaan

16

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PEKERJAAN INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH**

1986 / 1987



MILIK DEPDIKBUD
Tidak diperdagangkan

SISTEM KEPEMIMPINAN DI DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SUMATERA SELATAN



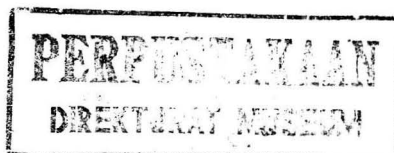
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
1986 / 1987

**SISTEM KEPEMIMPINAN DIDALAM MASYARAKAT PEDESAAN
DAERAH SUMATERA SELATAN**

PENANGGUNG JAWAB :

- I. Konsultan : 1. Drs. Ahmad Musa
Kakanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan
2. Awaluddin Rasyid
Kabid PSK Depdikbud Prop. Sumatera Selatan.
3. Drs. Zainal Abidin Hanif
Pemimpin Proyek IDKD Prop. Sumatera Selatan
- II. Tim Peneliti :
Penanggung Jawab/ketua : Dra. Latifah Ratnawati
Sekretaris/anggota : Drs. Tarmizi Mairu
Anggota : 1. Drs. Zainal Abidin Hanif
2. Drs. Umar Zipin Marbe
- E D I T O R : 1. Drs. Sugianto Dakung
2. Syamsidar, BA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
1986 / 1987



100 1/2 19/1/1991

100 1/2 19/1/1991

100 1/2 19/1/1991

100 1/2 19/1/1991

100 1/2 19/1/1991

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT MUSEUM
 TANGGAL: 15 Mei 1986
 No: 204/691-3-

PENGANTAR

Untuk menambah Kepustakaan mengenai kebudayaan daerah Sumatera Selatan telah diterbitkan beberapa naskah hasil penelitian dari tim peneliti Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan Kantor Wilayah Departemen dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan, yang antara lain pada tahun 1986/1987 akan diterbitkan :

1. Pola pemukiman daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1980/1981 (Naskah ini merupakan cetak ulang, cetakan pertama tahun 1981/1982).
2. Sistem ekonomi tradisional sebagai perwujudan tanggapan masyarakat terhadap lingkungan daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1982/1983.
3. Isi dan kelengkapan rumah tangga Tradisional daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1982/1983.
4. Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1983/1984.
5. Sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1983/1984.

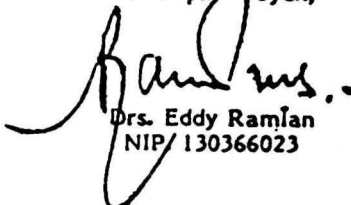
Dengan diterbitkan naskah ini diharapkan informasi mengenai kebudayaan Sumatera Selatan akan lebih menyebar dan bermanfaat untuk meningkatkan usaha penelitian lebih mendalam pada masa-masa selanjutnya.

Kepada para peneliti dan semua pihak yang telah membantu penelitian naskah ini kami mengucapkan terima kasih.

Semoga penerbitan ini besar manfaatnya bagi kita.

Palembang, Juli 1986.

Proyek IDKD Sumatera Selatan
Pemimpin Proyek,



Dr. Eddy Ramli
NIP/130366023

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

Salah satu usaha kita untuk menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa adalah dengan mengadakan pencatatan, menginventarisasikan serta mendokumentasikan kebudayaan daerah.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka saya menyambut baik usaha Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan yang telah menerbitkan lima judul naskah, yaitu :

1. Pola Pemukiman Daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1980/1981. (cetak ulang).
2. Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Masyarakat Terhadap Lingkungannya Daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1982/1983.
3. Isi dan Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Menurut Tujuan, Fungsi dan Kegunaannya Daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1982/1983.
4. Dampak Modernisasi terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1983/1984.
5. Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1983/1984.

Malalui kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para peneliti dan penulis atas kerja samanya dengan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan. Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan, semoga kerja sama ini akan lebih baik ditahun-tahun mendatang.

Akhirnya atas jerih payah dan upaya para peneliti serta semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terujudnya naskah ini sangat kami hargai dan kami ucapkan terima kasih, semoga penerbitan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 1986.
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan.



M. Z. A B I D I N.
Nip. 130041099.

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah Kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah :

1. Pola pemukiman daerah Sumatera Selatan; hasil penelitian tahun 1980/1981 (cetak ulang).
2. Sistem ekonomi tradisional sebagai perwujudan tanggapan masyarakat terhadap lingkungan daerah Sumatera Selatan; hasil penelitian tahun 1982/1983.
3. Isi dan kelengkapan rumah tangga tradisional menurut tujuan, fungsi dan kegunaannya daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1982/1983.
4. Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Sumatera Selatan; hasil penelitian tahun 1983/1984.
5. Sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan daerah Sumatera Selatan hasil penelitian; tahun 1983/1984.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pemimpin dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, LEKNAS/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih, terutama kepada tim penulis dari masing-masing naskah. Harapan kami, semoga terbitan ini ada manfaatnya bagi generasi kita selanjutnya.

Jakarta, Agustus 1986
Pemimpin Proyek IDKD Pusat,



Drs. H. Ahmad Yunus
NIP. 130146112.

SAMBUTAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menyusun beberapa naskah kebudayaan, antara lain :

1. Pola pemukiman daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1980/1981 (Naskah isi merupakan cetak ulang, cetakan pertama tahun 1981/1982).
2. Sistem ekonomi tradisional sebagai perwujudan tanggapan masyarakat terhadap lingkungan daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1982/1983.
3. Isi dan kelengkapan rumah tangga Tradisional daerah Sumatera Selatan hasil penelitian tahun 1982/1983.
4. Dampak modernisasi terhadap hubungan kekerabatan daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1983/1984.
5. Sistem kepemimpinan di dalam masyarakat pedesaan daerah Sumatera Selatan, hasil penelitian tahun 1983/1984.

Selesainya naskah ini karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah satu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Agustus 1986.

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENDAHULUAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan dalam tahun anggaran 1983 - 1984 mendapat kesempatan lagi untuk meneliti beberapa aspek kebudayaan daerah yang ada di Sumatera Selatan sebagai lanjutan tahun sebelumnya maupun dalam bentuk judul yang baru. Judul naskah yang menjadi garapan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan 1983 - 1984 terdiri dari :

1. Upacara Tradisional dalam Kaitannya dengan Peristiwa Alam dan Kepercayaan.
2. Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-sila dalam Pancasila.
3. Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan
4. Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan
5. Sosialisasi pada Perkampungan Miskin di Kota

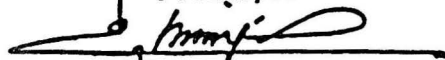
Sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya kerjasama yang baik tetap terjalin baik dengan tim penulis dari Universitas Sriwijaya, Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Selatan, maupun masyarakat pendukung budaya daerah dan perangkat Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya sampai ke desa. Hal ini terjadi oleh karena adanya rasa kepentingan bersama untuk menggali, kemudian memelihara serta mengembangkan sistem budaya daerah yang anggun dan bernilai tinggi itu, yang akhirnya akan menjadi konsumsi bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.

Melalui lembar ini kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Bapak Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II serta Bapak Kakandepdikbud Kabupaten/Kotamadya yang daerahnya dijadikan penelitian;
5. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga selesainya naskah dari judul-judul yang telah disebutkan di atas.

Kami menyadari naskah-naskah ini masih perlu penyempurnaan dan perbaikan. Oleh sebab itu, tegur dan saran perbaikan dari pembaca sangat kami harapkan. Di samping harapan kiranya kerjasama-kerjasama yang terjalin baik selama ini akan tetap dibina dan ditingkatkan demi meningkatkan ketahanan nasional umumnya dan ketahanan sosial budaya khususnya.

Palembang, Januari 1984
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan
P e m i m p i n



Drs. Zainal Abidin Hanif
NIP. 130232522

KATA PENGANTAR

Kegiatan penelitian dan penulisan kebudayaan pada tahun ini salah satu aspeknya adalah Sistem Kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan yang ada di daerah-daerah wilayah Indonesia. Sistem kepemimpinan di daerah-daerah yang selama ini amat beragam bila ditinjau dari berbagai aspek yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa kita, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5, tahun 1979 lambat laun berubah menuju suatu keseragaman karena berpedoman pada undang-undang itu.

Dengan berpedoman pada TOR penelitian ini, penulis mencoba melaksanakan tugas yang terasa tidak ringan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menginventarisasikan dan mendokumentasikan sistem kepemimpinan di daerah, terutama sekali di kedua daerah sampel, maka penelitian ini tidak bersifat menguji beberapa hipotesis dan pengujian beberapa teori yang telah ada. Oleh sebab itu, daftar bacaan yang tertera nanti bukan saja daftar bacaan yang merupakan bahan rujukan tetapi juga merupakan daftar acuan yang merupakan bahan acuan.

Penelitian ini terlaksana berkat kepercayaan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menciptakan kerja sama yang baik ini. Ucapan terima kasih ini terutama sekali penulis sampaikan kepada :

1. Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, Proyek IDKD Pusat, Jakarta;
2. Pimpinan Proyek IDKD Sumatera Selatan;
3. Kakanwil Depdikbud Sumatera Selatan;
4. Bupati Kepala Daerah OKU, Baturaja;
5. Camat Wilayah Kecamatan Pengandonan;
6. Kepala Desa di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang, dan
7. Semua informan dan responden baik di Desa Pengandonan maupun di Desa Kelumpang.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun akan penulis terima dengan segala senang hati. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan penelitian ini akan memberikan manfaat bagi kita semua dan mendapat ridho-Nya.

Palembang, Maret 1984

Tim Peneliti,

dto.

Dra. Latifah Ratnawati
Ketua Aspek

D A F T A R I S I

Halaman

Kata Pengantar Ketua Aspek	iii
Kata Pendahuluan	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
– Masalah	1
– Tujuan	1
– Tujuan Umum	1
– Tujuan Khusus	1
– Ruang Lingkup	1
– Pertanggungjawaban Ilmiah	2
– Pengkajian Daftar Pertanyaan	3
– Lokasi Penelitian	3
– Metode dan Teknik Penelitian	3
– Populasi dan Sampel	4
– Populasi	4
– Sampel	4
BAB II IDENTIFIKASI	6
– Lokasi Penelitian	6
– Keadaan Penduduk	8
– Sejarah Pemerintahan Desa	8
– Sejarah Pemerintahan Desa Pengandonan	10
– Sejarah Pemerintahan Desa Kelumpang	12
– Latar Belakang Sosial Budaya	14
BAB III GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN DALAM MASYA- RAKAT PEDESAAN	20
– Pendahuluan	20
– Organisasi Pemerintahan Desa Pengandonan	20
– Sistem Kepemimpinan Formal	22
– Sistem Kepemimpinan informal	23
– Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional	23
– Organisasi Pemerintahan Desa Kelumpang	25
– Sistem Kepemimpinan Formal	26
– Sistem Kepemimpinan Nonformal	27
– Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional	27
BAB IV KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL	29
– Pendahuluan	29
– Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Sosial Desa Pengandonan	29
– Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia	29
– Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	33
– Kelompok PKK	35
– Karang Taruna	38
– Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Sosial Desa Kelumpang	40
– Karang Teruna	41

- Kelompok PKK	43
- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	45
- Muhammadiyah	47
- Syarikat Islam	54
- Pengaruh Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Sosial Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang	59
BAB V POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI	61
BAB VI POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA	63
- Pendahuluan	63
- Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Agama Desa Pengandonan	63
- P3NTRC	63
- Organisasi Pengajian Desa Pengandonan	64
- Organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah	66
- Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Agama Desa Kelumpang	67
- Pengaruh Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Agama Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang	69
BAB VII POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN	71
- Pendahuluan	71
- Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Pendidikan Desa Pengandonan	71
- Sekolah Dasar Negeri	71
- Sekolah Menengah Pertama Negeri	74
- Sekolah Menengah Pertama PGRI	76
- Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan	79
- Gerakan Pramuka	83
- Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Pendidikan Desa Kelumpang	89
- Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Pendidikan dalam Masyarakat	94
BAB VIII ANALISIS	98
- Pendahuluan	98
- Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepemimpinan Pedesaan	98
- Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan dengan Sistem Administrasi Politik Nasional	100
- Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional	102
Daftar Pustaka	109
Indeks	111
Lampiran	114

BAB I PENDAHULUAN

Masalah

Indonesia terdiri dari pulau-pulau baik yang kecil maupun yang besar. Pulau-pulau ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap Suku bangsa ini mendiami suatu wilayah pemukiman yang akhirnya terbentuklah kabupaten, kecamatan, bahkan sampai ke desa. Antara desa yang satu dengan desa yang lain memiliki sistem tersendiri dalam pemerintahan yang dilatarbelakangi oleh kebiasaan dan cara hidup di desa itu. Demikian juga halnya dengan sistem kepemimpinannya.

Semenjak dikeluarkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa sebenarnya sistem administrasi dan pemerintahan di desa di seluruh wilayah Indonesia mengacu kepada undang-undang tersebut. Sedangkan sebelumnya sistem administrasi dan pemerintahan di desa-desa di wilayah Indonesia amat beragam yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan setempat. Keanekaragaman ini merupakan kekayaan budaya yang tidak dinilai harganya dan merupakan warisan budaya bangsa yang amat berguna.

Dalam rangka menentukan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan kepentingan masyarakat. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengadakan penginventarisasian terhadap sistem budaya, lingkungan budaya. Dalam kaitan dengan penelitian ini penginventarisasian yang dilakukan adalah penginventarisasian terhadap sistem kepemimpinan dalam masyarakat di pedesaan yang menjadi sasaran adalah sistem kepemimpinan dalam jaringan kebudayaan, ekonomi, politik, dan sosial.

Disadari bahwa aspek yang diteliti adalah masalah yang sangat penting karena menyangkut segala aspek kehidupan dan akan menjangkau masyarakat Indonesia di mana saja termasuklah masyarakat yang berada di pedesaan. Diharapkan bahwa segala usaha yang dilakukan dalam penelitian ini dapat menunjang Pembangunan Nasional yang pada hekekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya (GBHN Tap MPR Nomor IV/MPR/1978).

Tujuan. Sesuai dengan tujuan yang telah digariskan di dalam TOR, penelitian Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan ini bertujuan sebagai berikut.

Tujuan Umum Agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan, pendidikan dan masyarakat.

Tujuan Khusus Untuk mengumpulkan dan menyusun laporan/naskah Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan yang mengungkapkan masalah kepemimpinan dihubungkan dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ruang Lingkup Materi Kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia merupakan kehidupan yang serba kompleks, serta terikat dengan masalah-masalah ritual. Kehidupan individu, masih terikat dengan bentuk kehidupan yang lain, baik sesama manusia, alam, bahkan dengan kekuatan gaib. Sistem kekerabatan dan gotong royong sangat mendasar dalam masyarakat pedesaan di Indonesia.

Salah satu aspek yang turut menentukan sistem kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia tersebut adalah sistem kepemimpinan yang ada dalam masyarakat itu, baik yang sifatnya kepemimpinan formal maupun kepemimpinan yang informal dan formal Tradisional. Sistem kepemimpinan sangat menentukan bentuk kehidupan masyarakat pedesaan yang serba kompleks itu. Karena pemimpin masyarakat adalah orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk membimbing dan sekaligus diteladani dalam menjalankan kehidupan di pedesaan yang serba terikat dengan masalah-masalah yang ritual itu.

Kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi makin pesat diserap oleh masyarakat pedesaan. Dikhawatirkan sifat asli yang alami yang telah mewarnai segala bentuk kehidupan masyarakat pedesaan itu akan makin luntur, kemudian menghilang.

Untuk itu wajarlah bila pemerintah melalui IDKD berusaha untuk menginventarisasikan setiap aspek kehidupan yang ada di pedesaan Indonesia. Pada kegiatan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah tahun 1983 - 1984 kali ini, mencakup runang lingkup sistem kepemimpinan masyarakat pedesaan Indonesia yang mengungkapkan bidang sistem kepemimpinan dalam jaringan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

Mengenai ruang lingkup operasional pada dasarnya sebagai berikut

Operational penelitian aspek Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Selatan adalah desa Pengandonan sebagai desa terbuka. Desa ini merupakan ibukota kecamatan. Desa yang kedua adalah desa Kelumpang sebagai desa tertutup. Desa ini merupakan desa paling akhir dan terpencil dalam kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan.

Pertanggungjawaban Ilmiah

Sebelum mengadakan penelitian ke lapangan ketua aspek mengikuti penataran yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek IDKD pusat yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 1983 di Cisarua, Bogor. Dari hasil penataran ini diperoleh suatu gambaran mengenai kegiatan Inventarisasi Aspek Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan.

Setelah tiba di daerah hasil penataran yang diperoleh itu disampaikan kepada seluruh anggota aspek melalui acara pertemuan bimbingan teknis tim peneliti/penulis daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan, yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 1983.

Berdasarkan TOR aspek Sistem Kepemimpinan di dalam Masyarakat Pedesaan dalam pertemuan itu dihasilkan hal-hal sebagai berikut. Komposisi tim peneliti terdiri dari :

Konsultasi:

1. Drs. Ahmad Musa
(Kakanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Selatan)
2. Awaluddin Rasyid
(Kabid PSK Depdikbud Provinsi Sumatera Selatan)
3. Drs. Zainal Abidin Hanif
(Pimpinan Proyek IDKD Provinsi Sumatera Selatan)

Tim Peneliti:

Penanggung Jawab/Ketua : Dra. Latifah Ratnawati
Sekretaris/Anggota : Drs. Tarmizi Mairu
Anggota : 1. Drs. Zainal Abidin Hanif
: 2. Drs. Umar Zipin Marbe

Selanjutnya ketua tim dan anggota tim menentukan langkah kerja sebagai awal kegiatan tim. Penyusunan langkah kerja tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada buku TOR. Langkah kerja yang disusun tersebut meliputi pengkajian dan penambahan daftar pertanyaan, penetapan lokasi, menentukan metode dan teknik, menentukan populasi, serta studi pustaka.

Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa gambaran mengenai sistem kepemimpinan masyarakat di kedua desa yang diteliti. Karena kedua desa itu satu desa merupakan desa terbuka dan satu desa tertutup, diharapkan pula dapat memberikan gambaran perbedaan sistem kepemimpinan yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek IDKD Pusat mengenai Sistem Kepemimpinan Masyarakat Pedesaan di Daerah Sumatera Selatan, khususnya di desa Pengandonan dan desa Kelumpang.

Pengkajian Daftar Pertanyaan Dalam pelaksanaan penelitian ini daftar pertanyaan telah disediakan oleh tim penyelenggara pusat. Dari pengkajian terhadap daftar pertanyaan masih diperlukan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, daftar pertanyaan yang disediakan oleh tim pusat dilengkapi lagi oleh tim peneliti.

Lokasi Penelitian Berdasarkan petunjuk yang terdapat di dalam TOR bahwa lokasi penelitian ini, yaitu dua desa yang bukan terletak di kotamadya atau kota administratif. Di samping itu, lokasi penelitian harus terletak dalam satu wilayah kecamatan dengan ketentuan bahwa desa pertama merupakan desa ibu kota kecamatan atau desa yang terbuka oleh jaringan komunikasi dan desa kedua merupakan desa yang paling terpencil atau desa yang tertutup oleh jaringan komunikasi dalam kecamatan tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan akan dapat mengambil perbandingan dari dua desa yang dijadikan sampel penelitian tersebut. Dengan demikian, dalam acara pertemuan itu ditetapkanlah lokasi penelitian, yaitu desa Pengandonan, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai ibukota kecamatan dan desa yang terbuka serta desa Kelumpang sebagai desa yang terpencil dan tertutup.

Metode dan Teknik Penelitian Metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Metode yang digunakan sebagai landasan kegiatan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksud adalah suatu metode yang dipakai dalam usaha memberikan gambaran yang objektif tentang sistem kepemimpinan di pedesaan Indonesia.

Metode deskriptif yang digunakan ini mencakup teknik wawancara, angket, observasi, dokumentasi, dan studi komperatif (Surakhmad, 1972: 131).

Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.

Teknik Penelitian Untuk mengumpulkan data digunakan teknik sebagai berikut.

Wawancara Wawancara dilakukan dengan para informan di lapangan, yaitu para pemimpin desa, pemuka masyarakat, pemimpin organisasi massa dan sosial, serta masyarakat desa Pengandonan dan desa Kelumpang yang banyak mengetahui tentang sistem kepemimpinan di pedesaan. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh kemantapan data yang terkumpul

Angket Daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan disebarkan kepada sampel, yaitu pemimpin desa, pemuka masyarakat, pemimpin organisasi massa dan sosial, serta masyarakat desa Pengandonan dan desa Kelumpang. Sampel menjawab melalui daftar pertanyaan secara terbuka dan sebelum menjawab sampai mendapat penjelasan lebih dahulu dari tim peneliti. Angket yang dipersiapkan itu terdiri dari dua perangkat meliputi informan dan responden. Angket informan terdiri dari informan pemimpin dan informan biasa.

Observasi Observasi diarahkan kepada pemimpin desa, pemuka masyarakat, pemimpin organisasi massa dan sosial serta masyarakat secara lisan guna mendapatkan data tentang sistem kepemimpinan di pedesaan, yaitu desa Pengandonan dan desa Kelumpang.

Dokumentasi Di samping teknik-teknik di atas tim peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan melengkapi data melalui memotokopi atau menyalin seperangkat data yang terdapat di desa Pengandonan dan desa Kelumpang baik yang dimiliki oleh kepala desa maupun yang dimiliki oleh perorangan, serta dokumentasi yang terdapat di kantor kecamatan dan kabupaten. Selain itu, juga teknik ini dilengkapi dengan cara mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penelitian melalui pengkajian buku-buku (kepuustakaan).

Studi Komperatif Teknik ini digunakan dalam rangka mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sistem kepemimpinan pada waktu yang berbeda dan perbedaan sistem kepemimpinan pada dua tempat yang berbeda dalam suatu masa yang sama.

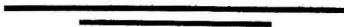
Populasi dan Sampel Populasi dan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Populasi Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga penduduk desa Pengandonan dan desa Kelumpang, Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan statistik jumlah penduduk desa yang terdapat di Kantor Kepala Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang pada bulan Agustus 1983 penduduk itu berjumlah 587 orang dengan 227 kepala keluarga, untuk desa Pengandonan. Sedangkan di desa Kelumpang penduduknya berjumlah 935 orang dengan 125 kepala keluarga dan semua kepala keluarga itu menjadi populasi berupa responden dan informan dalam penelitian ini.

Sampel Berdasarkan TOR sampel penelitian ini untuk desa yang

jumlah kepala keluarganya di bawah 1000 kepala keluarga persentase sampelnya adalah 10%. Dengan demikian sampel responden dan informan penelitian ini terdiri dari dua puluh tiga orang yang berstatus kepala keluarga untuk desa Pengandonan dan 13 orang yang berstatus sebagai kepala keluarga di desa Kelumpang. Cara pemilihan sampel responden dan informannya dilakukan secara random.



BAB II IDENTIFIKASI

Letak Administratif Dan Letak Geografis Sesuai dengan TOR penelitian ini, maka ditentukan bahwa desa yang dijadikan objek dalam penelitian adalah Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang. Kedua desa ini terletak dalam wilayah Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan dan Komerling Ulu, Propinsi Sumatera Selatan. Pengertian desa dalam penelitian ini adalah "Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia" (Saleh, 1983)

Batas-batas Desa Pengandonan adalah sebelah Barat dengan hutan Kabupaten Muaraenim, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semanding, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Ogan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Lewat.

Batas-batas Desa Kelumpang adalah sebagai berikut. Sebelah Barat dan Utara berbatas dengan perkebunan rakyat Kabupaten Muaraenim, sebelah Timur dengan Sungai Ogan Kanan, sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunungtiga.

Kecamatan Pengandonan terletak antara 3° LS sampai 5° LS serta $103^{\circ}30'$ bujur timur sampai 105° bujur timur.

Keadaan Alam Luas Kecamatan Pengandonan adalah 1841 km^2 meliputi 44 buah desa. Jumlah penduduk 38604 jiwa yang terdiri dari 10606 jiwa laki-laki dewasa, 11112 jiwa perempuan dewasa, 18893 jiwa anak laki-laki, dan 19711 jiwa anak perempuan.

Jumlah kepala keluarga dalam Kecamatan Pengandonan meliputi 6317 kepala keluarga.

Dibandingkan dengan kepadatan penduduk di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Ogan dan Komerling Ulu, kepadatan penduduk Kecamatan Pengandonan adalah sedang; dengan rata-rata kepadatan 21 jiwa tiap-tiap km^2 .

Desa Pengandonan luasnya 235 ha yang terdiri dari luas tanah pertanian (sawah) 10 ha, luas hutan 212 ha, luas padang alang-alang 5 ha, dan luas perkampungan 18 ha.

Keadaan alam Desa Pengandonan adalah berbukit-bukit. Sedangkan susunan tanahnya pada umumnya merupakan batuan tufa vulkan. Tanahnya adalah satuan dari pisolit merah kuning. Di sekitar desa banyak terdapat anak sungai.

Udaranya sangat segar berhawa pegunungan. Pemandangannya pun cukup memikat, terutama lokasi persawahan yang terletak di pinggir Sungai Ogan.

Desa Pengandonan merupakan desa Ibukota Kecamatan. Hubungan transportasi sangat lancar, karena desa ini dilalui oleh Jalan Trans Sumatera yang menghubungkan kota Baturaja dengan Muaraenim.

Lokasi yang kedua adalah Desa Kelumpang, yaitu desa yang terpencil dalam Kecamatan Pengandonan. Hal ini dapat diketahui karena sukaranya hubungan transportasi dan komunikasi dengan masyarakat yang

berada di desa tersebut. Dengan dasar ini pula maka Desa Kelumpang ini dijadikan objek penelitian.

Desa Kelumpang terletak di jalur Bukit Barisan di tepi Sungai Ogan Kanan, sehingga menjadikan Desa Kelumpang ini berhawa pegunungan. Di sekitar desa banyak bukit dan lembah serta anak sungai dan persawahan. Di samping itu, terdapat pula hutan dan perkebunan rakyat seperti karet, duku, durian, rambutan, kopi, dan banyak bentuk perkebunan lainnya.

Karena Desa Kelumpang merupakan daerah pegunungan, terletak di tepi sungai dan dilingkari oleh sawah dan perkebunan maka udaranya sangat segar. Pemandangannya pun cukup memikat hati, sungai yang mengalir jernih, hutan perkebunan yang alami. Bahkan banyak objek wisata yang belum dikembangkan seperti air mendidih yang disebut masyarakat setempat dengan **Gemukhak**, air terjun dan banyak lagi.

Tanahnya merupakan tanah hitam berpasir serta bercampur dengan batu granit. Luas Desa Kelumpang mencapai 314 hektar, yang dapat diperincikan bahwa luas perkampungan 3 hektar, luas perkebunan 259 hektar, dan luas persawahan 49 hektar.

Pola Perkampungan Susunan rumah di Desa Pengandonan pada umumnya tidak teratur dan tidak mengikuti pola tertentu. Rumah-rumah hampir seluruhnya didirikan bertiang, baik terbuat dari tiang kayu maupun dari semen. Di samping itu, setiap rumah memiliki sebuah lumbung padi.

Kecuali rumah-rumah yang berada di tepi jalan, karena rumah-rumah di tepi jalan ini diusahakan untuk menghadap ke jalan. Rumah didirikan pada suatu areal memanjang sepanjang jalan atau di dekat sungai. Pada umumnya rumah didirikan berkelompok dan berdekatan. Bangunan kantor camat, Kantor KUA, Puskesmas, Kandep Dikbud, SD Negeri, SMP Negeri terletak di bagian hilir penghujung desa perbatasan dengan desa Semanding dan Tanjungan. Bahkan sebahagian bangunan itu sebenarnya sudah terletak di desa Semanding atau Tanjungan. Sedangkan bangunan mesjid terletak di tengah desa di pinggir jalan. Lapangan olah raga terletak di hulu desa di dekat sungai perbatasan desa Gunung Lewat. Lokasi kuburan memanjang di sebelah darat desa di areal khusus di tepi perkebunan masyarakat. Perluasan desa kelihatan di sepanjang jalan dan di pinggir sungai Ogan terutama di bagian hilir desa Pengandonan. Fasilitas lainnya seperti pasar (yang disebut kalangan) belum dimiliki.

Komposisi perkampungan di Desa Kelumpang adalah berkelompok. Rumah-rumah ditempatkan di suatu areal tertentu dan berdekatan, bahkan ada beberapa buah rumah yang hampir tidak mempunyai halaman. Hal lain yang sangat disayangkan adalah dalam penyusunan rumah masih belum teratur. Dibagian hilir dekat sungai Ogan terletak kantor Kepala Desa yang juga berfungsi sebagai Balai Desa. Bangunan ini adalah bekas Kantor Pasirah, Marga Ulu Ogan.

Di samping itu, di bagian ini terletak pula lapangan olah raga. Sedangkan mesjid, mushollah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah terletak di bagian hulu di tepi sungai Ogan dan sungai Kepahyang. Kuburan masyarakat desa Kelumpang terletak kira-kira 500 meter di hulu desa di pinggir sawah dan perkebunan rakyat.

Di bagian hulu desa Kelumpang dibelah oleh sungai Kepahyang. Sedangkan di bagian darat desa Kelumpang memanjang jalan raya menuju

jalan Trans Sumatera. Fasilitas lainnya seperti pasar (yang disebut kalangan) belum dimiliki

Bentuk rumah hampir seluruhnya adalah rumah bertiang tinggi (lebih kurang 2,5 meter). Tiangnya adalah tiang duduk (tidak ditanam, yaitu diletakkan di atas batu yang disusun segitiga atau seperti tungku). Bahan bangunan rumah hampir seluruhnya terbuat dari kayu. Hal lain yang menarik adalah setiap rumah biasanya mempunyai lumbung padi yang didirikan di dekat rumah tersebut. Dari sekian banyak rumah ada juga rumah yang dibangun semi permanen dan rumah depok.

Untuk lebih jelasnya keadaan lokasi penelitian dan keadaan daerah Propinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada peta yang terdapat dalam halaman berikut.

Keadaan Penduduk Jumlah penduduk Desa Pengandonan 587 jiwa, terdiri dari 279 orang laki-laki dan 308 orang perempuan. Untuk mendapat gambaran yang jelas, keadaan penduduk dan perindiannya berdasarkan umur serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 1
KEADAAN PENDUDUK DESA PENGANDONAN TAHUN 1981

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 6 tahun	58	47	105
7 - 15 tahun	65	77	142
16 - 24 tahun	40	57	97
25 tahun ke atas	116	127	243
Jumlah	279	308	587

Sumber: Statistis penduduk kantor Kepala Desa Pengandonan Dari tabel di atas diketahui bahwa angka kelahiran antara laki-laki dengan perempuan berimbang. Namun, secara keseluruhan bahwa angka kelahiran perempuan lebih banyak dibandingkan dengan angka kelahiran laki-laki.

Dari 587 jiwa tersebut terdapat 125 kepala keluarga. Dan perlu diketahui bahwa dalam satu rumah sering didapati lebih dari satu kepala keluarga.

Mata pencaharian penduduk adalah bertani, di samping sebagai pedagang, supir dan pegawai.

Bentuk kekayaan seperti rumah, sawah, dan perkebunan pada umumnya dimiliki secara turun temurun. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut dimiliki secara bersama.

Selain penduduk asli Desa Pengandonan ada pula penduduk yang berasal dari luar yang beradaptasi dengan penduduk desa dan akhirnya menetap di desa ini.

Mobilitas Transportasi yang digunakan oleh masyarakat Desa Pengandonan hanya dengan menggunakan hubungan darat.

Tingkat mobilitas desa Pengandonan sudah memadai karena ditunjang oleh sarana angkutan berupa Jalan Trans Sumatera. Kendaraan umum cukup banyak melalui desa itu baik kendaraan jarak jauh maupun kendaraan jarak dekat (hanya batas kota kabupaten). Masyarakat di desa ini ada juga yang memiliki kendaraan sepeda bermotor sebagai alat transportasi pribadi. Bila masyarakat akan menuju ke sawah atau ke ladang mereka umumnya menggunakan sepeda, ini semua menyebabkan mobilitas yang terjadi di desa ini.

Sungai tidak dapat dijadikan sebagai sarana transportasi karena airnya deras dan dangkal.

Masyarakat desa sudah mengenal bentuk komunikasi seperti radio, pos, dan televisi.

Jumlah penduduk desa Kelumpang 935 jiwa, terdiri dari 448 orang laki-laki dan 487 jiwa perempuan. Untuk mendapat gambaran yang jelas keadaan penduduk dan perinciannya berdasarkan umur serta jenis kelamin laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:

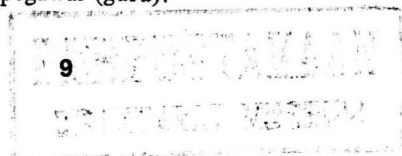
TABEL 2
KEADAAN PENDUDUK DESA KELUMPANG TAHUN 1982

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4 tahun	76	93	169
5 - 9 tahun	80	76	156
10 - 14 tahun	56	59	115
15 - 24 tahun	66	79	145
25 - 49 tahun	116	114	230
50 tahun ke atas	54	66	120
Jumlah	448	487	935

Sumber: Statistik penduduk kantor Kepala Desa Kelumpang. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat perimbangan angka kelahiran antara laki-laki dan perempuan perimbangan antara orang dewasa dengan anak-anak. Namun, secara keseluruhan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Dari 935 orang jiwa tersebut terdapat 125 kepala keluarga, dalam satu rumah kadang-kadang terdapat lebih dari satu kepala keluarga..

Mata pencaharian penduduk adalah bertani. Dengan demikian, pada dasarnya penghidupan masyarakat sangat tergantung dengan hasil pertanian baik pertanian lahan persawahan, maupun hasil pertanian dari lahan kering. Penduduk mengutamakan tanaman padi sebagai makanan pokok. Sedangkan penghasilan lainnya, seperti sayur-sayuran, termasuk hasil perkebunan, ternak, hasil hutan, dagang, pegawai atau buruh merupakan penghasilan penunjang. Hal ini dapat diketahui dari catatan pedesaan bahwa dari 125 kepala keluarga ternyata 112 kepala keluarga yang menggantungkan penghidupan mereka hanya dengan bertani, 11 kepala keluarga yang di samping bertani juga sebagai pedagang, dan 2 kepala keluarga yang di samping bertani juga sebagai pegawai (guru).



Harta kekayaan seperti sawah, perkebunan, ternak kebanyakan didapat secara turun temurun, sehingga sering didapati bahwa sebidang sawah atau perkebunan atau bentuk kekayaan lainnya tidak hanya dimiliki oleh satu kepala keluarga. Bentuk kekayaan seperti ini adalah bentuk kekayaan yang dimiliki bersama dalam sifat kekerabatan atau keluarga besar. Dengan demikian, sering pula terjadi seseorang yang sudah pindah atau merantau ke tempat lain masih memiliki peranan dalam keluarga, terutama yang berhubungan dengan harta kekayaan bersamatersebut. Dapat pula disimpulkan bahwa sifat kekeluargaan dan sifat gotong royong masih sangat terasa dalam masyarakat.

Selain penduduk asli Desa Kelumpang ada pula penduduk yang berasal dari luar yang beradaptasi dengan penduduk penduduk desa dan akhirnya menetap di desa ini.

Mobilitas Hubungan transportasi masyarakat desa Kelumpang satu-satunya hanyalah melalui jalan darat sepanjang 12 km yang menghubungkan jalan tersebut dengan jalan propinsi (yang sekarang menjadi jalan trans Sumatera). Jalan yang 12 km tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat yang kecil, seperti Jeep. Dengan sarana seperti inilah masyarakat setempat mengadakan hubungan dengan dunia luar. Hasil pertanian mereka diangkut ke kota Baturaja atau Muaraenim, Masyarakat desa Kelumpang sudah mengenal bentuk komunikasi seperti radio. Sedangkan bentuk komunikasi lain masih sangat minim, seperti pesawat televisi, koran dan majalah.

Sungai tidak dapat dijadikan sebagai sarana transportasi karena dangkal dan deras. Transportasi masyarakat ke ladang atau ke sawah hanya menggunakan tenaga manusia atau hanya berjalan.

Asal usul desa Sejarah Pemerintahan Desa Pengandonan Desa Pengandonan ini didirikan oleh Kurungan Diwe, yaitu gelar yang diberikan kepada orang yang dianggap keturunan dewa-dewa. Kurungan Diwe ini adalah gelar yang dianggap keramat yang diberikan kepada orang yang tidak diketahui bagaimana dan dari mana datangnya. Desa Pengandonan ini pada mulanya terletak di daerah Aji Selabung. Oleh Kurungan Diwe dan Aji Remas dipindahkan ke Ulu Tenggayak. Oleh karena letaknya masih dirasakan kurang tepat maka dipindahkan lagi ke dekat Ulak Lebar. Tidak lama sesudah itu terjadi percekocokan dengan masyarakat desa Ulak Lebar dan terpaksa desa dipindahak lagi ke tempat desa yang sekarang. Berdasarkan pindahannya desa ini terus menerus maka akhirnya desa ini terkenal dengan desa **Pengandonan**, yang diambil dari bahasa daerah Ogan yaitu **Ngandon** yang berarti mendatangi atau dapat juga diartikan pindah.

Sistem pemerintahan pada saat ini tidak menetap, masih bersifat hukum rimba, yang sistem kemasyarakatan hanya sistem kelompok. Hal ini terbukti pula dengan pertentangan masyarakat Pengandonan ini sendiri dengan masyarakat di sekitarnya, seperti dengan Desa Mendingin yang mengakibatkan Desa Pengandonan terpaksa pindah ke Ulu Tenggayak, dan kemudian pindah lagi ke dekat Desa Ulak Lebar. Oleh karena terjadi lagi bentrokan dengan Desa Ulak Lebar ini maka desa ini pindah lagi.

Setelah Kesultanan Palembang menjangkau daerah ini, maka sistem pemerintahan disesuaikan dengan sistem pemerintahan Kesultanan Palembang, lebih-lebih yang berhubungan dengan seni dan budaya yang diatur segalanya oleh kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.

Periode Penjajahan Belanda Pada Pemerintahan Kolonial Belanda, perangkat dan lambang kekuasaan pemerintah desa tidak ada, Orang yang menjabat kepala desa adalah orang yang disenangi oleh pemerintah Belanda. Kepala desa tunduk pada atasannya, yaitu **Depati** Sedangkan perangkat desa ditunjuk oleh Kepala Desa, tugasnya adalah membantu kepala desa.

Pada zaman pemerintahan Belanda sistem pemerintahan pada dasarnya menambahkan bagian tertentu dari sistem pemerintahan Kesultanan Palembang. Hanya saja sentral kepemimpinan terletak di tangan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut kepentingan pemerintah kolonial Belanda lebih mendapat perhatian terutama yang menyangkut keamanan dan pungutan pajak.

Periode Penjajahan Jepang Pada zaman pemerintahan Jepang perangkat dan lambang kekuasaan pemerintahan tidak mengalami perubahan. Hanya saja hal-hal yang bersifat kebelandaan harus ditinggalkan, Jepang sering memaksakan kepentingan-kepentingannya tanpa memperhatikan hukum yang berlaku.

Pada zaman pemerintahan Jepang perubahan mendasar terletak pada fungsi pemerintahan desa karena segala sesuatu yang bersifat kebelandaan harus ditinggalkan, dan diganti dengan hal-hal yang bersifat menunjang kepentingan Jepang. Kalau dipertahankan perubahan tersebut hanya terletak pada pengelolaannya saja, yaitu hukum yang selama ini bersumber pada kitab Undang-Undang Simbur Cahaya hampir tidak terpakai lagi. Karena Jepang bertindak sewenang-wenang.

Periode Kemerdekaan Pada zaman kemerdekaan perangkat kepala desa dilengkapi dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah Republik. Kepala Desa dipilih langsung oleh rakyat. Dalam menjalankan tugas sehari-hari kepala desa tunduk ke bawah kekuasaan **Pasirah**. Selain itu, kepala desa dibantu oleh **Penggawa**. Kepala desa disebut dengan istilah **Pembarab** (yaitu istilah **Kerio** yang berkedudukan di desa tempat Pasirah berkedudukan. Hal-hal yang menyangkut seni budaya disesuaikan dengan kepentingan pemerintah, masyarakat dan agama.

Pada masa pemerintahan Sultan, perangkat desa dan lambang kekuasaan kepala desa secara resmi tidak ada. Hanya saja kepala desa yang mendapat kepercayaan diberi kekuasaan dengan lambang tertentu. Bila Kepala Desa mendapat kepercayaan dari atasannya maka Kepala Desa tersebut akan diberi semacam lambang kepercayaan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lambang kepercayaan tersebut bukanlah kekuasaan mutlak, tetapi merupakan semacam penghargaan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk mengatasnamakan orang yang telah memberikan kepercayaan tersebut. Biasanya lambang kepercayaan tersebut berbentuk semacam kopiah yang mempunyai bentuk dan warna tertentu, atau semacam tongkat yang dibentuk dan diberi warna tertentu. Bentuk dan warna kopiah serta tongkat tersebut tidak tetap.

Kepala desa dipilih bersama yang dicalonkan melalui kelompok masing-masing. Bagi yang mendapat dukungan terbanyak menjabat kepala desa, yang bergelar **Pamong Desa**. Pamong desa ini tunduk ke bawah kekuasaan **Demang**.

Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 tahun 1979 sistem pemerintahan desa disesuaikan dengan undang-undang tersebut, walaupun hal tersebut masih jauh dari memenuhi persyaratan seperti

yang dicantumkan dalam keputusan tersebut. Kepala desa dilengkapi dengan perangkat lencana berbentuk matahari.

Sejarah Pemerintahan Desa Kelumpang Asal usul Desa Kelumpang didirikan oleh orang yang bergelar Kurungan Diwe yaitu orang yang tidak diketahui nama aslinya sehingga dianggap keramat. Kurungan Diwe berarti dewa yang datang tanpa diketahui bagaimana dan dari manakah datangnya

Penelusuran dengan sejarah membuktikan bahwa Kurungan Diwe sebelum mendirikan desa Kelumpang terlebih dahulu mendirikan desa Tanjung Laut, Semende, yang terletak di Kabupaten Muaraenem. Dikatakan Tanjung Laut karena diperkampungan tersebut dibuat sebuah tebat (tambak, kolam ikan) yang sangat besar. Membuat tebat tersebut dengan tujuan untuk menyaingi atau mengenang sebuah danau, yaitu Danau Ranau. Dengan demikian, diketahui bahwa Kurungan Diwe berasal dari Ranau.

Bukti bahwa desa Kelumpang dengan desa Tanjung Laut didirikan oleh orang yang sama ialah setiap desa Tanjung Laut memanen ikan tebat tersebut, desa Kelumpang selalu diberi tahu dan ikut ambi bagian, padahal jarak kedua desa tersebut memakan waktu 9 jam dan ditempuh dengan berjalan kaki.

Menurut perkiraan bahwa orang yang bergelar Kurungan Diwe tersebut sengaja untuk tidak memberitahukan namanya karena takut identitasnya diketahui. Berdasarkan kenyataan ini dan berdasarkan perhitungan silsilah yang turun temurun pada Desa Kelumpang yang sudah mencapai keturunan yang ke-14 bahwa Kurungan Diwe kemungkinan besar adalah salah seorang pelarian dari Keraton Kerajaan Sriwijaya yang ada pada saat itu sudah ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Dengan latar belakang inilah Kurungan Diwe tidak mau menyebutkan nama aslinya.

Areal Desa Kelumpang didapatkan oleh Kurungan Diwe dari pemberian leluhur Desa Pengandonan (yang juga bergelar Kurungan Diwe) dengan pemberian leluhur Desa Mendingin yang berkuasa di Ketagung (mungkin dari Kota Agung).

Areal tanah ini diberikan karena Kurungan Diwe berjasa mendaikkan permusuhan kedua orang tersebut. Dan sekaligus Desa Kelumpang merupakan desa perantara dari Desa Pengandonan Lama (karena sekarang tidak lagi di tempat itu) dengan Desa Mendingin Lama (karena sekarang tidak lagi di Ketagung).

Sistem pemerintahan pada saat itu tidak menentu masih bersifat hukum rimba, yang menentukan adalah kelompok masing-masing. Hal ini juga terbukti dengan permusuhan antara kelompok, seperti kelompok Desa Mendingin dengan Desa Pengandonan yang disebutkan di atas. Sifat permusuhan dan toleransi ini pun masih membekas sampai sekarang. Di samping itu, ada pula istilah yang dikenal dengan **numpu** yang artinya mengadakan perampokan dengan kelompok lain secara beramai-ramai atau seperti perang kecil antar kelompok. Bahkan, diketahui pula bahwa numpu atau perang antarkelompok ini tidak saja dari kelompok yang terdekat tetapi juga dari daerah yang jauh, seperti Lengkayap, Kisam, Lampung, Rawas dan banyak lagi, atau sebaliknya.

Setelah Kesultanan Palembang muncul maka terdapat suatu hukum yang dikenal dengan hukum adat Simbur Cahaya. Hukum inilah yang dijadikan pedoman kelompok masyarakat tersebut (namun diketahui pula

bahwa hukum tersebut belum dapat berlaku menurut strukturnya dengan baik), karena pengawasan terhadap pelaksanaan hukum tersebut tidak berjalan, tetapi berlaku menurut kepentingan dan kebutuhan setiap kelompok. Setelah Agama Islam masuk dan berbaur dengan kepercayaan yang sudah ada hukum ini baru dapat disentralisirkan.

Hukum adat berjalan dengan tidak bertentangan dengan hukum agama, termasuk juga sistem pemerintahan pun berjalan menurut hukum Simbur Cahaya. Perang antarkelompok sudah tidak ada lagi, dan masyarakat mulai berbaur dengan kelompok yang lain

Periode Penjajahan Belanda Pada Pemerintahan Kolonial Belanda, perangkat dan lambang kekuasaan pemerintah desa tidak ada. Orang yang menjabat kepala desa adalah orang disenangi oleh Pemerintah Belanda. Kepala desa tunduk pada atasannya yang disebut **Depati**. Bentuk dan sistem menjalankan pemerintahan sama dengan pemerintahan zaman Sultan.

Pada pemerintahan kolonial Belanda hukum adat Simbur Cahaya tetap berlaku sebagaimana mestinya, termasuk peraturan yang ada hubungannya dengan sistem pemerintahan. Pemerintah Kolonial Belanda hanya berfungsi sebagai pengawas dan tempat bertanggung jawab dari segala bentuk hukum dan pemerintahan yang ada. Dalam segi tertentu yang sifatnya kemasyarakatan. Pemerintah Belanda lebih banyak menekankan kekuasaannya dari segi pertahanan dan keamanan yang ada hubungannya dengan upeti dan pajak.

Periode Penjajahan Jepang Pada masa ini perangkat dan lambang kekuasaan pemerintah desa tidak mengalami perubahan. Sistem pemerintahan desa berjalan melanjutkan sistem pemerintahan yang sudah ada. Hanya saja hal-hal yang bersifat kebelandaan harus ditinggalkan atau tidak boleh dipakai. Bahkan pemerintah Jepang sering bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan hukum.

Pada zaman penjajahan Jepang sistem pemerintahan hampir tidak mengalami perubahan hanya segala sesuatunya harus berkiblat dan tunduk pada pemerintahan Jepang. Hukum yang selama ini bersumber kepada kitab Undang-undang Simbur Cahaya hampir tidak berlaku. Pemerintah Jepang sering bertindak sewenang-wenang menurut kepentingannya.

Periode Kemerdekaan Lambang dan perangkat kepala desa dilengkapi, seperti rencana-lencana yang melambangkan republik. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat secara demokrasi. Dalam menjalankan tugas sehari-hari kepala desa tunduk kepada kekuasaan **Pasirah**. Di samping itu, kepala desa mendapat seorang atau lebih pembantu yang disebut **Penggawa**. Sedangkan kepala desa sendiri disebut dengan istilah **Kerio**. Sistem pemerintahan desa semacam ini berjalan dan berlaku sampai dikeluarkan keputusan pemerintah, yaitu undang-undang no.5 tahun 1979

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 sistem pemerintahan desa disesuaikan dengan kepentingan Pemerintahan Republik, sedangkan sitem pelaksanaan dan istilahnya hampir tidak mengalami perubahan.

Pada saat Pemerintahan Belanda masuk kembali Wilayah Propinsi Sumatera Selatan terdapat dualisme kepemimpinan desa. Pertama karena Desa Kelumpang termasuk wilayah kekuasaan Pemerintah Belanda maka

sistem pemerintahan bertanggung jawab kepada Pemerintah Belanda. Kedua, terbentuk pemerintah desa bayangan yang struktur dan pertanggungjawabannya kembali kepada Pemerintahan Republik (orang yang menjadi pejabat pemerintahan desa ikut mengungsi atau berevakuasi ke wilayah yang dikuasai oleh Pemerintah Republik).

Setelah Pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah Republik maka sistem pemerintahan desa, termasuk perangkat dan istilah pemerintahan desa disesuaikan dan dijalankan menurut sistem pemerintahan dan kepemimpinan yang diatur oleh Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Pada masa Pemerintahan Sultan, perangkat desa termasuk lambang kekuasaan Kepala Desa secara resmi tidak ada. Bila Kepala Desa mendapat kepercayaan dari atasannya maka Kepala Desa tersebut akan diberi semacam lambang kepercayaan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diberikan kepadanya. Lambang kepercayaan tersebut bukanlah kekuasaan mutlak, tetapi merupakan semacam penghargaan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk mengatasnamakan orang yang telah memberikan kepercayaan. Biasanya lambang kepercayaan tersebut berbentuk semacam kopyah yang mempunyai bentuk dan warna tertentu, atau semacam tongkat yang dibentuk dan diberi warna tertentu (bentuk dan warna tersebut sifatnya tidak tetap). Pengangkatan kepala desa dilakukan dengan menunjuk wakil-wakil kelompok, lalu wakil-wakil kelompok tersebut dipilih bersama. Bagi yang mendapat dukungan terbanyak maka berhak menjabat kepala desa. Gelar yang digunakan adalah **Pamong Desa**. Pamong Desa ini tunduk ke bawah kekuasaan **Demang**. Upacara pelantikan kepala desa secara resmi tidak ada, namun masyarakat desa selalu mengadakan selamatan, atau pesta pedesaan yang acaranya tergantung dengan keinginan dan kepentingan masyarakat.

Sekarang telah dijalankan sistem kepemimpinan desa menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tersebut, walaupun secara mutlak masih banyak persyaratan yang belum dapat dipenuhi. baik persyaratan tersebut berhubungan dengan kepemimpinan desanya, maupun persyaratan yang berhubungan dengan sarana, perangkat desa, dan desa itu sendiri. Kepala Desa dilengkapi dengan seperangkat lencana yang berbentuk matahari sebagai lambang kekuasaan dan diberi gelar, yaitu **Batin Alam**.

Latar Belakang Sosial Budaya Mengingat latar belakang sosial budaya Pengandonan dan Kelumpang memiliki ciri, bentuk serta pola yang sama, maka dalam penjelasan berikut ini tidak dijelaskan satu persatu menurut urutan desa yang dijadikan sampel, tetapi diuraikan sekaligus latar belakang sosial budaya kedua desa yang dijadikan sampel.

Sosial budaya masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang sangat dipengaruhi oleh kepentingan masyarakatnya terhadap lingkungan, dan kebutuhan hidupnya, terutama yang menyangkut atau berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan.

Mengingat bahwa latar belakang kepercayaan dan keyakinan nenek moyang bangsa Indonesia bersifat animisme, dilanjutkan dengan pengaruh Agama Hindu dan Agama Budha hal-hal yang bersifat ritual dan keyakinan sangat mendalam dihati masyarakat. Lebih-lebih keyakinan yang ada hubungan dengan sosial masyarakat yang terdapat dalam Undang-undang Simbur Cahaya yang akhirnya menjadi hukum adat.

Setelah Agama Islam masuk ke Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang maka kegiatan sosial masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam. Kegiatan sosial budaya selalu berpedoman dan disesuaikan dengan kepentingan Agama Islam.

Pengaruh Agama Hindu dan Budha yang dilatarbelakangi oleh animisme, hukum adat simbur cahaya, dan Agama Islam berbaur mempengaruhi dan melatarbelakangi setiap kegiatan, kehidupan masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang. Yang sangat tampak adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan bersama, seperti perkawinan, pertanian, dan kegiatan lainnya yang serupa.

Kolektifa dan Elit-elit Desa Orang-orang yang dianggap berpengaruh, atau orang yang dituakan dalam hubungan sosial budaya yang mengikat kesakralan adat istiadat secara resmi sudah tidak ada. Namun, dalam kegiatan tertentu yang menyangkut kepentingan orang banyak, yang bersifat kemasyarakatan hal ini masih tampak. Pelaksanaannya tidak menentukan orangnya secara struktural, tetapi hanya ditunjuk orang tertentu yang dianggap mampu sesuai dengan kepentingan pada waktu tertentu. Di samping itu, kegiatan atau hal-hal yang dilakukan tidak pernah mengikat hak seseorang yang akan melakukan kegiatan tersebut sebagai seorang individu yang bebas. Orang yang ditunjuk tersebut biasanya orang yang memegang jabatan sebagai pemimpin desa, baik pemimpin formal maupun sebagai pemimpin organisasi yang non-formal.

Tingkat kehidupan masyarakat hampir merata, tidak ada individu yang menonjol. Hal ini mungkin menampakkan bahwa kehidupan masyarakat masih sangat menjunjung tinggi kepentingan bersama atau kekeluargaan atau lebih mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Masyarakat desa Pengandonan dan desa Kelumpang ini kelihatannya masih mencerminkan masyarakat lama Indonesia, yaitu "Masyarakat yang utuh dalam suatu persatuan yang lebih rapat, lebih padu tidak berpecah belah berderai-derai seperti masyarakat modern (Alisyahbana, 1979).

Dalam segi-segi tertentu, seseorang memang kelihatan mempunyai peranan dalam kelompok masyarakat, terutama bagi orang yang berfungsi sebagai pemimpin desa, pemimpin agama atau sebagai pemimpin organisasi-organisasi massa dan sosial.

Sistem kekerabatan pada masyarakat Desa Pengandonan dan desa Kelumpang bersifat kekeluargaan. Setiap kegiatan masih sangat tampak berlatar belakang kekeluargaan. Setiap kegiatan selalu dikerjakan bersama oleh keluarga besar, bahkan kelompok besar. Gotong royong dalam masyarakat masih sangat mengikat. Masyarakat berprinsip bahwa penderitaan atau kegembiraan orang lain adalah juga penderitaan atau kegembiraan bersama. Sifat-sifat seperti ini kelihatan sekali dalam kegiatan seperti perkawinan, pertanian, pendirian rumah dan kegiatan masyarakat lainnya. Masyarakat selalu bekerja sama menyelesaikan persoalan. Hal lain yang tidak kurang menariknya adalah pertalian atau hubungan antara dengan seseorang cukup jelas. Urutan keturunan dan kekeluargaan masih sangat jelas maksudnya adalah bahwa asal-usul keturunan keluarga-keluarga masyarakat desa Kelumpang masih dapat diketahui secara jelas dari mana asalnya dan bagaimana hubungannya dengan keluarga lainnya. Hal ini dapat diketa-

hui karena sebagian masyarakat desa Kelumpang ada yang memiliki silsilah keturunan mereka. Dengan demikian seseorang mengetahui silsilah keturunannya dan dapat pula mengetahui apa peranannya dalam keluarga serta apa pula tanggung jawabnya di dalam keluarga itu, misalnya dalam hal musyawarah keluarga untuk memutuskan suatu urusan orang tidak dapat memutuskan begitu saja bila seseorang di dalamkeluargaitu yang dianggap berwenang belum hadir atau tidak menyetujuinya. Demikian juga halnya suatu urusan keluarga kadang-kadang diabaikan begitu saja oleh anggota keluarga keluarga lainnya karena mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu terlibat langsung dan ada orang lain yang lain yang lebih berwenang/bertanggung jawab dalam hal itu, walaupun ia tidak bertempat tinggal di Desa Kelumpang.

Sistem Ekonomi sistem perekonomian masyarakat desa Pengandonan dan desa Kelumpang masih sangat tradisional. Mata pencaharian pokok mereka adalah bertani. Oleh karena itu, sawah dan ladang ditanami tanaman pokok untuk kebutuhan mereka, yaitu padi.

Persawahan di kedua desa ini merupakan sawah tadah hujan dan hanya digarap satu kali dalam satu tahun. Begitu selesai panen tanah dibiarkan begitu saja sehingga ditumbuhi rumput-rumput. Dengan demikian mereka dapat melepas ternak mereka tanpa berusah payah mencarikan makanan untuk ternak itu. Perladangan sering berpindah-pindah. Sebuah lahan persawahan hanya dipakai dua musim tanam setelah itu diganti dengan tanaman kopi. Bila pohon kopi itu pun telah tua dan hasilnya tidak memadai lagi kebun kopi itu dibiarkan begitu saja atau diubah menjadi kebun durian, kebun rambutan, dan sebagainya, atau menjadi hutan liar kembali. Hasil ini pun hanya merupakan mata pencaharian sampingan yang tidak tetap. Begitu pula halnya dengan bentuk-bentuk penghasilan seperti berdagang, memburuh, atau pegawai. Sifat bergotong royong atau kerja sama dalam menyelesaikan setiap kegiatan sangat banyak membantu masyarakat sehingga permasalahan ekonomi tidak menonjol. Hal lain yang dapat dibicarakan dalam hubungan perekonomian masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang adalah menyangkut taraf hidup masyarakat. Ternyata taraf hidup masyarakat hampir merata. Setiap keluarga hampir tidak menggantungkan masalah perekonomian mereka dengan orang lain. Bagi setiap kepala keluarga tugas utamanya adalah cukup pangan dan sandang. Hal ini dapat mereka penuhi dengan hasil utama pertanian mereka. Setiap kepala keluarga hampir memiliki lahan pertanian baik lahan persawahan maupun lahan kering. Kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan masyarakat dapat dipenuhi dari pendapatan-pendapatan lain, seperti hasil karet, kopi, hasil hutan, dan lainnya.

Sistem Teknologi

Teknologi pertanian masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Sistem irigasi dan peralatan pertanian yang modern belum diterapkan, Pengairan sawah hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, yaitu waktu musim penghujan. Hal ini dilakukan karena pada musim hujan air sungai Ogan dan anak-anaknya naik ke permukaan sehingga airnya dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Dengan demikian, persawahan di kedua desa ini merupakan sawah tadah hujan. Pemupukan pun belum dilakukan oleh masyarakat karena tanahnya masih subur bahkan, bila mereka menggunakan pupuk dapat menimbulkan penyakit tanaman, yaitu

terlalu subur. Mereka juga belum mengenal atau belum menggunakan bibit unggul.

Mengenai penerangan dan komunikasi, mereka sudah menggunakan teknologi modern walaupun baru digunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Contohnya mereka mulai mengenal penggunaan penerangan listrik dengan tenaga generator. Sebagian besar masyarakat ada yang memiliki pesawat radio transistor. Untuk desa Pengandonan ada yang telah memiliki televisi sedangkan di desa Kelumpang belum ada.

Dalam bidang pembangunan fisik seperti membangun rumah atau tempat ibadah juga masih bersifat tradisional. Mereka masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Tenaga hewan terutama sekali digunakan untuk mengangkut bahan-bahan bangunan dari hutan ke desa.

Untuk teknologi transportasi desa Pengandonan telah lama mengenal kendaraan yang digerakkan oleh mesin seperti mobil, sepeda motor. Ada juga yang menggunakan sepeda dan tenaga hewan terutama sekali untuk mengangkut hasil sawah ke desa mereka. Di desa Kelumpang karena jalannya masih kecil dan berbukit-bukit transportasi masyarakat masih menggunakan mobil-mobil kecil dan ini pun hanya sekali dalam sehari. Mereka lebih banyak menggunakan sepeda dan tenaga hewan untuk perjalanan jarak dekat dan mengangkut hasil sawah ke desa.

Hal lain yang dapat dilihat dari perkembangan teknologi ini adalah pemakaian peralatan komunikasi, terutama radio. Hampir setiap rumah telah memiliki radio. Listrik masuk desa juga sudah ada, hanya saja sifatnya milik individu. Kecuali bagi Desa Pengandonan telah memiliki generator sendiri atas sumbangan pemerintah. Hal lain mulai berkembang adalah ciri kehidupan kota sudah mulai tampak.

Di bidang agama, perkembangannya cukup meyakinkan. Di desa Pengandonan terdapat sebuah mesjid yang cukup megah yang didirikan atas swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Di desa Kelumpang pun tidak ketinggalan dengan mesjidnya. Di samping itu, terdapat pula mushola sebagai tempat kegiatan keagamaan. Hal lain yang turut menunjang kegiatan agama ini adalah kegiatan organisasi sosial. Untuk Desa Kelumpang seperti Madrasah Muhammadiyah yang secara langsung mengaktifkan kegiatan agama. Di Desa Pengandonan terdapat pula seperti kegiatan pengajian kecil. Pada hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi selalu dirayakan. Di samping itu, terdapat pula kegiatan sosial agama yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi massa (sosial) seperti Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Dengan bermacam kegiatan keagamaan ini berarti masyarakat akan mempertinggi pengertian akan hakekat Agama Islam itu sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang 100% menganut Agama Islam.

Bahasa sehari-hari yang digunakan penduduk Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang adalah dialek bahasa Ogan. Pada acara-acara resmi, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, masyarakat selalu menggunakan bahasa Indonesia.

Bahasa erat sekali berhubungan dengan sosial budaya masyarakat (Kridalaksana, 1976). Dialek bahasa Ogan juga merupakan gambaran sosial budaya masyarakat pemakainya. Hal itu terbukti dengan tata cara penggunaan pemilihan kata, serta tulisan yang digunakan oleh penduduk Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang sebagai pemakai dialek bahasa Ogan

itu.

Masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang selain mengenal tulisan latin bahasa Indonesia, juga mengenal bentuk tulisan lain seperti tulisan **Huruf Ulu, Tulisan Angka, dan Tulisan Arab Melayu**. Tulisan tersebut masih sering digunakan oleh masyarakat, terutama generasi tuanya. Tulisan tulisan tersebut, seperti tulisan angka dan tulisan arab melayu sama dengan cara-cara yang digunakan oleh masyarakat lain di luar desa. Hal ini telah dikenal oleh masyarakat umum sekarang.

Kesenian yang ada di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang mempunyai latar belakang dan perkembangan yang sama. Kegiatan kesenian yang tampak di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang hampir tidak ada. Perangkat kesenian pun hanya seperangkat rebana di Desa Pengandonan dan seperangkat gamelan yang terdapat di Desa Kelumpang. Perangkat gamelan di Desa Kelumpang tersebut tidak terpelihara lagi. Sedangkan perangkat rebana di Desa Pengandonan sekali-sekali masih digunakan oleh kelompok pengajian atau oleh kelompok remaja mesjid.

Tarian tradisional tidak pernah dipertunjukkan lagi. Tetapi yang masih berkesan dan membekas dalam hati nurani masyarakat baik di Desa Pengandonan maupun di Desa Kelumpang adalah sebuah tarian yang disebut **ngigal**. Selain itu, masih terdapat tarian-tarian lain yang merupakan pengaruh dari luar.

Tarian ngigal adalah tarian tradisional yang disenangi oleh tua muda, laki-laki dan perempuan. Biasanya tari ini dilakukan pada acara-acara resmi atau waktu perkawinan. Tarian ini biasanya diiringi oleh gamelan yang dibunyikan secara khusus.

Di bidang seni sastra dapat diketahui bermacam-macam kegiatan seni sastra lisan baik dari Desa Pengandonan maupun dari Desa Kelumpang. Bentuk seni sastra tersebut antara lain **Panjang-panjang, Andai-andai, dan Berdikir**.

Panjang-panjang adalah prosa lisan yang diceritakan dengan berlagu. Cerita yang ditampilkan adalah cerita-cerita pilihan. Kebanyakan cerita yang ditampilkan adalah cerita tentang kepahlawanan. Biasanya cerita ini ditampilkan pada keramaian, seperti perkawinan, persedekahan, kematian, atau acara lainnya yang serupa. Panjang-panjang ini ditampilkan sampai memakan waktu bermalam-malam.

Andai-andai juga adalah prosa lisan yang ditampilkan secara biasa menurut kepentingan plot cerita. Cerita yang ditampilkan sama dengan cerita pada panjang-panjang. Andai-andai ini biasanya hiburan keluarga. Seorang nenek/kakek sering membawakan andai-andai ini untuk cucu-cucunya yang sedang mengurut mereka.

Berdikir yang asal katanya diambil dari kata **zikir** adalah kesenian yang berhubungan dengan Agama Islam. Cerita yang ditampilkan adalah cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW (Berzanji). Cerita ini ditampilkan dengan diiringi oleh bunyi-bunyian yang disebut dengan **jidur** (gendang besar) dan bendi (yang terbuat dari kuningan).

Kesenian-kesenian lain terutama yang berhubungan dengan puisi banyak juga ditemui. tetapi sukar diinventarisasikan karena penggunaannya hampir tidak ada lagi. Seperti pantun berkait dahulu sering digunakan oleh orang yang memadu rasan antara bujang dengan gadis (bertunangan). Kemudian ada lagi permainan muda-mudi yang disebut dengan **perang-**

guhan, yaitu semacam pantun yang tidak beraturan dan bersifat saling sindir menyindir dalam memadu kasih.

Kesenian tradisional berupa lagu-lagu memang tidak pernah menonjol, namun pernah ada terutama yang sering disebut dengan **tembang**. Tembang ini adalah lagu-lagu yang manfaatnya digantungkan kepada kebutuhan masyarakat. Yang paling banyak digunakan adalah tembang-tembang duka lara. Kata-kata dalam tembang itu biasanya adalah berupa ratapan atau berupa pantun dan syair.

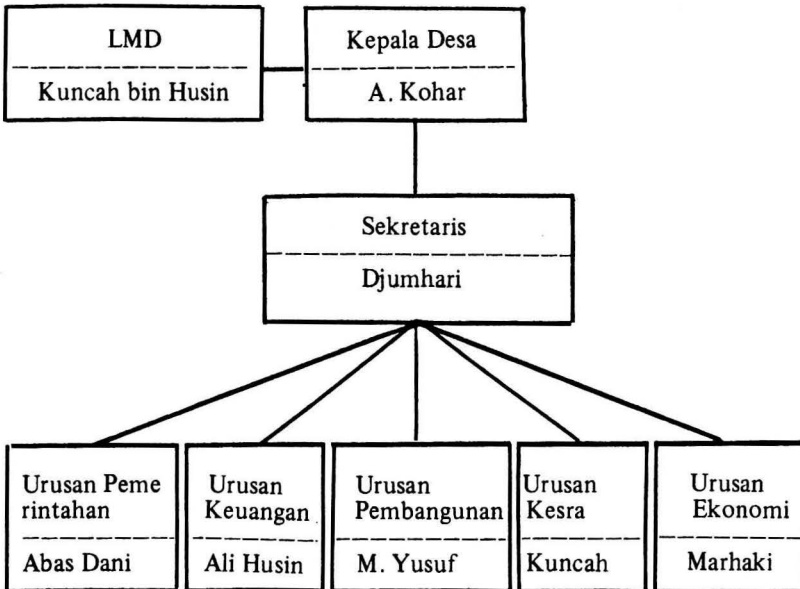
Kesenian berupa kerajinan, yaitu berupa tenunan dan anyam-anyaman memang ada. Kerajinan tenun sudah kalah oleh kemajuan teknologi. Peralatan tenun masih banyak dimiliki tetapi tidak pernah digunakan lagi. Sedangkan kerajinan anyam-anyaman masih banyak dibuat dan digunakan masyarakat, seperti bakul, tikar, keruntung, taling, kinjakh, bake, jambang, bubu, jala, lenggian dan lain-lain. Barang-barang ini tidak pernah dipasarkan, tetapi hanya digunakan untuk keperluan sendiri sebagai perlengkapan dapur dan perlengkapan pertanian.



B A B III
GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN
DALAM MASYARAKAT PEDESAAN

Organisasi Pemerintahan Desa Pengandonan Organisasi pemerintahan Desa Pengandonan sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 telah diterapkan menurut peraturan tersebut. Sebelumnya pemerintahan desa adalah dipimpin oleh seorang Pembarab yang tunduk di bawah Rekuasaan Pasirah Marga Samikerian. Penerapan undang-undang tersebut baru dilaksanakan pada bulan Juli 1983, yaitu dengan dilantiknya kepala desa beserta perangkatnya. Dengan adanya realisasi Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 itu, maka pemerintahan Desa Pengandonan adalah sebagai berikut.

Struktur Pemerintahan Desa Pengandonan



Dalam pemerintahan formal tradisional LMD adalah semacam DPR Marga yang mempunyai hubungan konsultatif dan koordinatif dengan kepemimpinan desa. Desa Pengandonan dikepalai oleh seorang kepala desa, yaitu A. Kohar. Sebelum dilantik menjadi kepala desa, A. Kohar adalah sebagai Pembarab dusun Pengandonan. Kepala Desa Pengandonan dibantu oleh seorang sekretaris desa yang dibantu pula oleh bidang urusan pemerintahan, urusan keuangan, urusan pembangunan, urusan kesra dan urusan ekonomi.

Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung Kepala Desa Pengandonan.

1. Menjadi penghubung atau perantara apabila warga desanya akan berhubungan dengan perangkat desa yang lebih tinggi, yaitu Camat.
2. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga desa.
3. Menciptakan keamanan bagi seluruh warga desa.
4. Mengusahakan agar desa dapat berkembang dengan sebaik-baiknya.
5. Menciptakan ketertiban di segala bidang bagi seluruh warga desa.

Sistem kepemimpinan yang ada di Desa Pengandonan terdiri dari kepemimpinan formal dan kepemimpinan non-formal. Di samping itu, sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 terdapat juga kepemimpinan formal tradisional, yang disebut Pasirah.

Tugas dan Kewajiban Sekretaris Desa Pengandonan Seorang sekretaris desa di desa Pengandonan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap jalannya administrasi desa;
2. Mengatur agenda umum;
3. Mengatur administrasi tanah;
4. Merencanakan rapat-rapat desa yang akan diadakan;
5. Membuat statistik desa;
6. Mewakili kepala desa sewaktu-waktu.

Tugas dan Kewajiban Bidang Urusan Pemerintahan Desa Pengandonan:

1. Mengatur administrasi kependudukan;
2. Mengatur tata usaha desa;
3. Mengatur perlengkapan kantor kepala desa.

Tugas dan Kewajiban Urusan Keuangan/Ekonomi:

1. Mengatur perekonomian dan perdagangan;
2. Mengatur administrasi perekonomian desa;
3. Mengatur dana pembangunan desa;

Tugas dan Kewajiban Urusan Pembangunan:

1. Mengatur semua administrasi perekonomian dan kemakmuran;
2. Mengatur pengendalian pembangunan dalam segala bidang.

Tugas dan Kewajiban Urusan Kesra:

1. Mengatur urusan sosial;
2. Mengatur urusan kesehatan masyarakat;
3. Mengatur bimbingan sosial masyarakat;
4. Mengadakan kerja sama dalam hal pendidikan.

Tugas dan Kewajiban LMD:

1. Membantu pemerintah desa atau kepala desa;
2. Membuat peraturan/rencana peraturan yang harus dilaksanakan oleh kepala desa;
3. Penasehat kepala desa;
4. Memberi saran, kritik yang bersifat membangun;
5. Melaksanakan hak angket.

Sistem Kepemimpinan Formal Salah satu pemimpin formal di desa Pengandonan adalah kepala desa. Di Desa Pengandonan kepala desa tidak dipilih melainkan langsung ditunjuk oleh Camat karena masih masa transisi. Pemilihan kepala desa sebagaimana mestinya dilaksanakan nanti sedangkan waktunya belum ditentukan.

Syarat seorang pemimpin formal adalah sebagai berikut:

- a.
 1. tidak cacat badan;
 2. dapat menulis dan membaca;
 3. disegani, berwibawa, dan berani;
 4. tidak pernah terlibat dalam organisasi yang terlarang
 5. mempunyai kelebihan di antara warga desa;
 6. pandai berpidato;
 7. mampu melaksanakan tugasnya;
 8. mempunyai jiwa rela berkorban untuk orang banyak, dan
 9. mempunyai sifat peramah.;
 10. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 11. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 12. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti.

Selain syarat-syarat diatas, seorang calon pemimpin formal juga harus didukung oleh warga desa. Biasanya orang yang terpilih adalah orang yang selain memenuhi syarat-syarat di atas juga mempunyai pendukung yang banyak. Pendukung biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kepala desa dimaksud.

Hak dan Kewajiban Pemimpin Formal Desa Pengandonan:

Seorang Pemimpin formal mempunyai hak sebagai berikut:

1. mendapat imbalan dari pemerintah;
2. mengatur cara kerja di lingkungan desanya;
3. memungut sebagian hasil warga desa;

Kewajiban seorang pemimpin formal adalah sebagai berikut:

1. memimpin rakyatnya dengan sepuh hati;
2. mengatur sistem keamanan dan ketertiban desa;
3. memimpin desa ke arah kemajuan;
4. menengahi perselisihan yang terjadi di antara warga desa.

Atribut/Symbol Kepemimpinan Pemimpin Formal Desa Pengandonan:

Seorang pemimpin formal mempunyai atribut khusus. Pejabat Kepala Desa memiliki atribut berupa cupu (istilah masyarakat Desa Pengandonan) yaitu berupa lencana yang terbuat dari lempengan tembaga di tengahnya terdapat lambang pohon beringin yang dikelilingi padi dan kapas.

Pengertian simbol Kepala Desa Pengandonan di atas tidak dapat dijelaskan, karena informasi dari kepala desa tidak memuaskan.

Cara Pengangkatan dan Upacara Pemimpin Formal Desa Pengandonan: Seorang pemimpin formal harus dicalonkan dan kemudian dipilih

oleh rakyat. Pengangkatan seorang pemimpin formal melalui suatu upacara resmi yang telah ditentukan waktunya, dan bertempat di kantor kecamatan. Semua yang menghadiri upacara berpakaian resmi. Pelantikan itu dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan dan Komering Ulu atau yang mewakilinya dengan disaksikan oleh petugas KUA dan pemuka-pemuka masyarakat desa.

Sistem Kepemimpinan Informal: Selain kepala desa, di Desa Pengandonan terdapat pula sistem kepemimpinan yang bersifat nonformal, biasanya adalah orang yang disegani di desa itu. Seorang pemimpin nonformal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berilmu tinggi;
2. tokoh masyarakat,
3. usianya sudah lanjut;
4. banyak pengalaman;
5. jujur dan
6. pemuka agama.

Di samping persyaratan di atas seorang pemimpin informal juga harus didukung oleh sistem kekerabatan, atau sering juga dari faktor hubungan famili dengan pemimpin sebelumnya.

Pada umumnya pemimpin informal di Desa Pengandonan tidak mempunyai hak secara pasti dan tertentu dari masyarakat maupun dari pemerintah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sebagai pemuka masyarakat, pemuka agama tentu saja dia dihormati oleh masyarakat maupun pemerintah. Bahkan dalam hal-hal tertentu ia sangat memegang peranan penting, seperti pada peringatan hari-hari besar Islam dan sebagainya.

Orang-orang yang dianggap pemimpin informal di desa Pengandonan ini adalah para **kiayi**, dan **paradukun**.

Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung Pemimpin Informal Desa Pengandonan:

Hak dan kewajiban, atribut/symbol kepemimpinan dan cara pengangkatan dan upacara tidak dapat diuraikan menurut TOR karena para pemimpin informal itu memang tidak mempunyai hak dan kewajiban secara pasti baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Mereka tidak mendapat imbalan atau fasilitas lainnya secara pasti dan tertentu. Mereka juga tidak mempunyai atribut atau symbol kepemimpinan secara khusus. Cara pengangkatannya hanyalah berdasarkan pengakuan masyarakat terhadap keahlian mereka.

Pada bagian Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional memang tidak diuraikan secara terperinci dan sebagaimana yang diminta oleh TOR karena sistem kepemimpinan formal tradisional itu pada waktu riset dilakukan sudah tidak ada lagi. Yang diuraikan pada bagian ini hanya berdasarkan studi pustaka yang bertujuan untuk menyebutkan bahwa di desa Pengandonan pernah ada sistem kepemimpinan formal tradisional.

Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional: Sebelum dilantikannya kepala desa yang merupakan pemimpin desa sebagai realisasi dari undang-undang nomor 5 tahun 1979, di Desa Pengandonan ini terdapat pemerintahan formal tradisional yang dikepalai oleh Pasirah. Pasirah me-

ngepalai Marga, yang terdiri dari beberapa buah dusun, yang dusun-dusun tersebut dikepalai oleh Kerio. Nama Marga Desa Pengandonan adalah Marga Samikerian.

Seorang Pasirah, Kerio, dan Penggawa sebagai sistem kepemimpinan formal tradisional diatur oleh kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Tetapi, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 dan dilantiknya Kepala Desa oleh Camat mewakili Bupati maka sistem pemerintahan formal tradisional ini dihapuskan.

Untuk mengetahui keadaan kepemimpinan formal tradisional, yang didasari oleh Kitab Undang-undang Simbur Cahaya, berikut ini akan disuntingkan secara acak bagian-bagian dari Kitab Undang-undang Simbur Cahaya yang ada hubungannya dengan kepemimpinan formal tradisional.

Kekuasaan tertinggi dalam satu marga adalah Pasirah. Hal ini tercantum dalam Bab. II Kitab Undang-undang Simbur Cahaya tentang aturan marga.. Peraturan tentang marga ini terdiri dari 29 pasal. Salah satu pasalnya adalah di dalam satu marga didatangkan satu Pasirah yang memerintah untuk segala hal marganya dan Pasirah itu orang banyak yang memilih dan raja yang angkat surat kuasa padanya (Simbul Cahaya, Bab. I pasal 1, 1897: 14).

Dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya juga didapati peraturan adat istiadat yang menyangkut pergaulan remaja. Dan termasuk pula peraturan perkawinan. Hubungan remaja ini tercantum di dalam Bab. I, yang terdiri dari 32 pasal. Untuk mengetahui bagaimana peraturan tersebut berikut ini akan dikemukakan satu pasal dari Bab. I ini. Pasal yang dikutip tersebut adalah jika bujang gadis berjalan maka bujang rebut kembang dari kepala gadis, maka yang namanya bujang kena dua ringgit (Kitab Undang-undang Simbur Cahaya, Bab. I, pasal 32, 1897:14).

Bab. III Kitab Undang-undang Simbur Cahaya pasal 2 membicarakan fungsi Khotib. yang tugas tugas khotib ini seperti mengatur keperluan yang ada hubungannya dengan agama, termasuk perkawinan, kematian, kegiatan mesjid dan sebagainya. Untuk pemerintahan desa setelah Surat Keputusan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tugas-tugas khotib tersebut dilaksanakan oleh P3NTCR (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk).

Untuk mengatur keamanan dan kesetabilan desa dalam pemerintahan formal tradisional didapati suatu badan yang menyerupai Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, hanya saja tugasnya tidak seluas seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Badan ini disebut dengan **kemit**. Tugas kemit ini berhubungan dengan keamanan desa, dan dapat pula berarti sebagai pembantu pelaksana harian tugas Kerio, Pembarap, atau Pasirah. Dalam suatu marga terdapat pula sebuah badan yang bertugas sebagai perancang pembangunan desa yang disebut dengan **Dewan Marga**. Dewan Marga ini sekarang dikenal dengan istilah LMD (Lembaga Musyawarah Desa).

Peraturan-peraturan dalam Bab. III ini diperluas lagi dalam Bab IV. Penghulu sebagai hakim marga yang bertindak sebagai petugas lanjutan dari tindak hukum yang menyangkut agama, yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya pada Bab. III. Pada Bab. IV inilah dibicarakan tentang peraturan perkawinan, peraturan zakat, dan peraturan lain yang menyangkut peraturan agama. Peraturan yang dipaparkan pada Bab

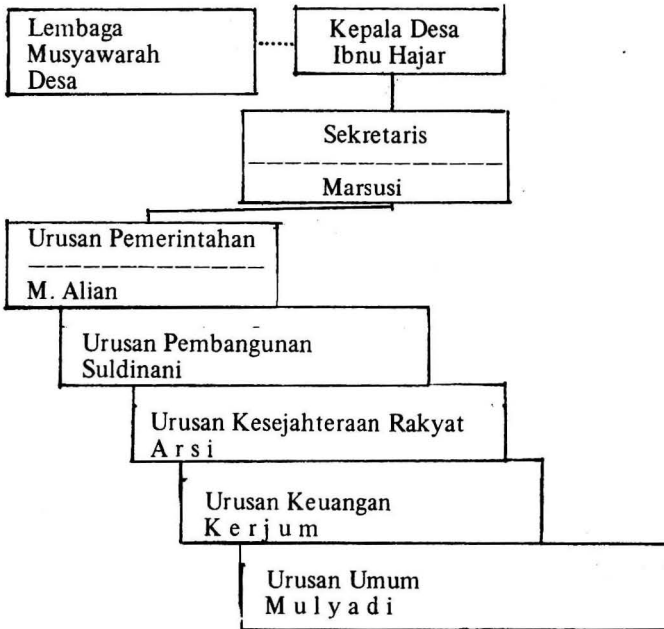
IV. ini terdiri dari 19 pasal.

Sebagai tindakan bagi pelanggar hukum marga yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya, terutama yang menyangkut pelanggaran terhadap peraturan pemerintah langsung, seperti tentang keamanan, kemasyarakatan, pajak, pertanian, sosial politik dibicarakan dalam Bab V, yang terdiri dari 69 pasal. Sebagai kelengkapan uraian ini akan dikutipkan salah satu pasal dari Bab V itu, yaitu Jika orang banyak rumah akan mencuri lantas tikam orang di dalam itu ia kena hukuman raja (Kitab Undang-undang Simbur Cahaya, Pasal 26, 1897:54).

Melihat kenyataan ini diketahui bahwa pemerintahan formal tradisional pedesaan mengatur tata cara kehidupan pedesaan secara terperinci dan rumit. Pengaruh peraturan-peraturan ini sampai sekarang masih sangat mendalam di masyarakat, terutama sekali dalam hubungan adat istiadat, seperti perkawinan dan gotong royong.

Organisasi Pemerintahan Desa Kelumpang: Organisasi pemerintahan Desa Kelumpang sejak dikeluarkan peraturan pemerintah, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 telah menuruti peraturan tersebut. Sebelumnya pemerintahan desa dijalankan dalam bentuk kepemimpinan formal tradisional, yaitu dipimpin oleh seorang **Kerio** yang dibantu oleh seorang **Penggawa**, dan tunduk kepada kekuasaan Pasirah Marga Ulu-Ogan. Dengan adanya realisasi undang-undang nomor 5 tahun 1979 itu, maka pemerintahan Desa Kelumpang adalah sebagai berikut :

Struktur Pemerintahan Desa Kelumpang-



Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga legislatif desa yaitu semacam DPR (yang sekarang belum terbentuk berhubung pemerintahan desa dalam keadaan transisi). Lembaga ini mempunyai hubungan konsultatif dan koordinatif dengan pemerintah eksekutif, yaitu **kepala desa**. Sampai saat ini Kepala Desa Kelumpang adalah Ibnu Hajar. Sebelumnya beliau adalah sebagai Kerio Desa Kelumpang. Kepala Desa Kelumpang belum dipilih sebagaimana mestinya. Kepala Desa Kelumpang dibantu oleh seorang sekretaris dan beberapa tenaga pelaksana sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan kesejahteraan rakyat, urusan keuangan dan urusan umum.

Seorang Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Menjadi penghubung atau perantara apabila warga desanya akan berhubungan dengan perangkat desa yang lebih tinggi yaitu camat;
2. Mendamaikan perselisihan yang terjadi antara warga desa;
3. Menciptakan keamanan bagi seluruh warga desa;
4. Mengusahakan agar desa dapat berkembang dengan sebaik-baiknya.
5. Menciptakan ketertiban di segala bidang bagi kepentingan warga desa.

Sistem kepemimpinan informal sebelum undang-undang nomor 5 tahun 1979 tetap ada. Di samping itu, sebelum adanya kepala desa terdapat kepemimpinan formal tradisional. Kepemimpinan formal tradisional itu adalah kepemimpinan Marga Ulu Ogan yang berkantor di Desa Kelumpang. Kepala Marganya, yaitu Pasirah bernama Umar Hanan. Kedudukan ibu marga sebenarnya adalah Mendingin, akan tetapi segala kegiatan tetap bersumber dari kantor Marga di Desa Kelumpang.

Hak dan Kewajiban Sekretaris, urusan pemerintahan, urusan pembangunan, urusan Kesra, dan urusan Keuangan adalah sama dengan di desa Pengandonan.

Hak dan Kewajiban Urusan Umum:

1. Mengatur administrasi keamanan;
2. Membantu mengusut perkara;
3. Mengadakan perizinan dalam keramaian;
4. Pengawas segala bentuk tindakan kriminal.

Sistem Kepemimpinan Formal: Kepala desa merupakan satu-satunya kepemimpinan formal di Desa Kelumpang. Pejabat yang ditunjuk untuk memegang kepala desa ini adalah Ibnu Hajar, karena sampai sekarang kepala desa belum dipilih. Hal tersebut dilakukan mengingat masih dalam masa transisi.

Syarat seorang pemimpin formal adalah sebagai berikut:

1. Tidak cacat badan;
2. Dapat menulis dan membaca;
3. Disegani, berwibawa, dan berani;
4. Tidak pernah terlibat dalam organisasi yang terlarang;
5. Mempunyai kelebihan di antara warga desa;
6. Pandai berpidato;

7. Mampu melaksanakan tugas;
8. Mempunyai jiwa berkorban untuk orang banyak, dan
9. Mempunyai sifat peramah.
10. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa;
11. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
12. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti.

Selain syarat-syarat di atas, seorang calon pemimpin formal juga harus didukung oleh warga desa. Biasanya orang yang terpilih adalah orang yang selain memenuhi syarat-syarat tersebut di atas juga mempunyai pendukung yang banyak. Pendukungnya biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kepala desa tersebut.

Hak dan Kewajiban Pemimpin Formal Desa Kelumpang:

1. Mendapat imbalan dari pemerintah;
2. Mengatur cara kerja di lingkungan desanya, dan
3. Memungut sebagian hasil warga desa.

Kewajiban seorang pemimpin formal adalah sebagai berikut:

1. Memimpin rakyatnya dengan sepenuh hati;
2. Mengatur sistem keamanan dan ketertiban desa;
3. Memimpin desa ke arah kemajuan, dan
4. Menengahi perselisihan yang terjadi di antara warga desa.

Seorang pemimpin formal mempunyai atribut khusus, yaitu simbol yang berbentuk matahari. Dan kepala desa diberi gelar, yaitu **Batin Alam**.

Cara pengangkatan seorang pemimpin formal adalah dicalonkan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Pengangkatan seorang pemimpin formal melalui suatu upacara resmi yang ditentukan waktunya di kantor kecamatan.

Sistem Kepemimpinan Informal- : Di Desa Kelumpang terdapat juga pemimpin informal, yaitu pemuka-pemuka agama. Di samping itu, didapatkan pula tua-tua desa. Secara nyata ruang gerak pemimpin non-formal ini tidak kelihatan, namun kehadirannya sangat dirasakan. Biasanya seorang pemimpin informal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berilmu tinggi;
2. tokoh masyarakat;
3. usianya agak lanjut;
4. banyak pengalaman;
5. jujur, dan
6. pemuka agama.

Di samping persyaratan di atas seorang pemimpin informal juga harus didukung oleh sistem kekerabatan, atau mempunyai hubungan famili dengan orang-orang yang menjadi pemimpin sebelumnya, atau orang yang betul-betul mendapat kepercayaan masyarakat.

Sebagaimana umumnya pemimpin nonformal di Desa Pengandonan, pemimpin informal di Desa Kelumpang tidak mempunyai hak secara pasti

dan tertentu dari masyarakat maupun dari pemerintah. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemuka masyarakat, pemuka agama tentu saja dihormati oleh masyarakat maupun pemerintah. Bahkan dalam segi-segi tertentu ia sangat memegang peranan penting, seperti dalam memperingati hari-hari penting, terutama hari-hari besar Islam.

Syarat-syarat Kepemimpinan dan Faktor Pendukung Pemimpin Informal Desa Kelumpang . Hak dan kewajiban, atribut/symbol kepemimpinan dan cara pengangkatan dan upacara tidak dapat diuraikan menurut TOR karena masalahnya sama dengan desa Pengandonan.

Pada bagian Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional memang tidak diuraikan secara terperinci dan sebagaimana yang diminta oleh TOR karena masalahnya sama dengan desa Pengandonan.

Sistem Kepemimpinan Formal Tradisional: Di Desa Kelumpang, sebelum berlakunya sistem pemerintahan yang baru, yaitu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 masih terdapat pemerintahan formal tradisional, yaitu Pasirah Marga Ulu Ogan. Sebenarnya ibu marga adalah Desa Mendingin, tetapi kantor marga berdiri di Desa Kelumpang. Pasirah marga yang terakhir adalah Umar Hanan, dan dialah satu-satunya Pasirah yang terpilih oleh rakyat, karena dua orang Pasirah sebelumnya adalah ditunjuk oleh Bupati, karena masih dalam masa transisi, yaitu pemisahan Marga Ulu Ogan dari Marga Samikerian dan Marga Temenggungan. Pasirah Marga Ulu Ogan memerintah tujuh buah dusun, yaitu Kelumpang, Gunungtiga, Ulaklebar, Pedataran, Belandang, Sukajadi, dan Mendingin.

Kepemimpinan formal tradisional ini adalah warisan kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Dengan adanya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 berarti sistem kepemimpinan formal tradisional dihapuskan.

Pengangkatan Pasirah biasanya dicalonkan, kemudian dipilih masyarakat marga. Pengangkatannya disahkan oleh Bupati dan tunduk di bawah kekuasaan Camat.

Melihat kenyataan bahwa pemerintahan forma tradisional dalam mengatur tata cara kehidupan pedesaan yang sangat terperinci dan rumit. Yang pernyataan ini dapat dilihat pada uraian kepemimpinan formal tradisional Desa Pengandonan halaman terdahulu. Dari kenyataan ini pula pengaruh peraturan-peraturan kepemimpinan formal tradisional yang diatur oleh Kitab Undang-undang Simbur Cahaya sampai sekarang ini masih sangat mendalam di masyarakat, terutama yang berhubungan dengan adat istiadat, seperti perkawinan dan gotong royong.

B A B I V
POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT
PEDESAAN DI BIDANG SOSIAL

Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Sosial
Desa Pengandonan Nama Organisasi : Di dalam Desa Pengandonan terdapat empat buah organisasi sosial, yaitu AMPI, LKMD, Kelompok PKK, dan Karang Taruna. Mengenai kepemimpinan keempat organisasi sosial tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) : Dalam keputusan musyawarah nasional Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia nomor IV/Munas I/AMPI/1979 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia pada Bab I pasal I bahwa nama organisasi ini adalah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dengan singkatan AMPI.

Asas dan tujuan AMPI tertuang pada bab II pasal 2 disebutkan bahwa (1) AMPI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. (2) AMPI merupakan satu-satunya wadah persatuan dan kesatuan kepemudaan yang berjuang atas karya dan kekaryaannya.

Pada bab II pasal 3 disebutkan pula bahwa tujuan organisasi (1) Ikut serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. (2) Menciptakan kader-kader pembaharuan dan pembangunan yang berorientasi kepada karya dan kekaryaannya, bermoral dan bermutu tinggi, berkeahlian serta berketrampilan yang mampu menjaminkelestarian perjuangan bangsa demi masa depan yang lebih baik.

Selain itu di dalam bab III pasal 4 dikemukakan pula bahwa fungsi AMPI adalah merupakan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan yang mempersatukan pikiran dan tindakan para pemuda Indonesia yang berorientasi kepada Golongan Karya dalam kesatuan tekad untuk melaksanakan pembaharuan dan pembangunan di segala bidang kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Keanggotaan Organisasi AMPI Desa Pengandonan: Mengenai keanggotaan organisasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di dalam Anggaran Rumah Tangga bab II pasal 2 dikemukakan bahwa (1) pada dasarnya anggota AMPI adalah merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang menyetujui kebulatan tekad, landasan perjuangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. (2) yang dimaksud dengan keanggotaan sebagai kelompok adalah anggota-anggota kelompok yang secara perorangan menyetujui kebulatan tekad, landasan perjuangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi yang dinyatakan secara kolektif melalui kelompok atau organisasi profesi/fungsional yang bersangkutan.

Keanggotaan AMPI ini dikelompokkan atas empat kelompok, yaitu pertama calon anggota yang mendaftarkan diri secara tertulis pada pemimpin sub rayon AMPI setempat dan belum mendapat pengesahan anggota.

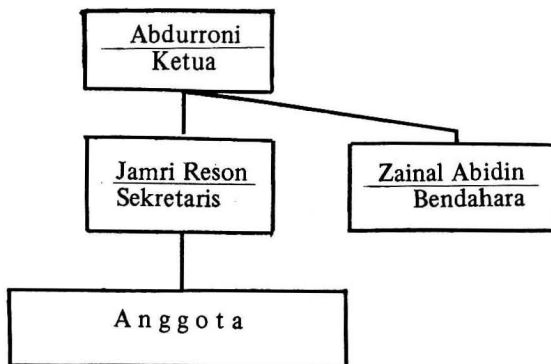
Kedua, anggota AMPI biasa adalah mereka yang mendaftarkan diri secara tertulis pada pimpinan sub rayon AMPI setempat dan telah mendapat pengesahan sebagai anggota.

Ketiga, anggota penyantun adalah para penanda tangan kebulatan tekad AMPI dan orang yang dianggap berjasa bagi organisasi dan perjuangan AMPI, dan orang-orang tersebut di atas tidak menjabat lagi sebagai pembina, dewan penasihat, maupun pimpinan AMPI.

Keempat, adalah mereka yang menurut penilaian dewan pimpinan AMPI dapat diangkat sebagai anggota kehormatan.

Organisasi AMPI di Desa Pengandonan ini pertama kali didirikan pada tahun 1979 oleh Sobri Daud B.A, Camat Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan dan Komering Ulu. Latar belakang didirikannya organisasi ini adalah dalam rangka meningkatkan keikutsertaan pemuda terhadap pembangunan. Sejak organisasi itu didirikan sampai sekarang sistem kepengurusannya belum diadakan perombakan.

Susunan Kepengurusan Organisasi AMPI Desa Pengandonan :



Tempat dan tempat Kegiatan Organisasi AMPI: Secara pasti pusat kegiatan tidak ada. Tempat kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Misalnya, kegiatan olah raga tentu saja dilakukan di lapangan olah raga, kegiatan kerja bakti membersihkan tempat ibadah tentu saja tempat kegiatannya di langgar atau Mesjid Al-Munawarah. Dan begitulah seterusnya.

Anggota AMPI terdiri dari para pemuda Desa Pengandonan berjumlah 185 orang. Organisasi ini antara lain bergerak dalam bidang olah raga, pembinaan kesenian daerah, membantu pemerintah dalam melaksanakan memperingati hari-hari besar nasional maupun keagamaan, bakti masyarakat seperti gotong royong memperbaiki jalan serta membantu pemerintah dalam munsukseskan Pemilihan Umum 1982 yang lalu.

Berdasarkan ruang lingkup kegiatan di atas dapatlah dikatakan bahwa peranan organisasi AMPI ini dalam masyarakat sangat penting. Sebagai contohnya di bidang olah raga, AMPI dapat menghimpun para remaja yang ada di Desa Pengandonan ini dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan olah raga. dengan adanya pengkoordinasian para pemuda seperti ini tentu saja akan mengurangi kenakalan remaja bahkan juga dapat mengatasi

waktu senggang para remaja dengan kegiatan yang terarah. Di samping itu, dapat mencetak pemuda yang berprestasi sekaligus bersatu dalam satu wadah.

Melalui kegiatan pembinaan kesenian daerah, AMPI dapat membantu pemerintah dalam melestarikan dan membina kesenian daerahnya. Sebagai contohnya semenjak adanya kegiatan ini banyak jenis tari-tarian yang dahulu sudah tidak dikenal diperkenalkan kepada para remaja. Sebagai contohnya, yaitu **tari tepak**. Tarian ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu-tamu yang dihormati sebagai ucapan selamat datang.

Di samping itu, dalam kegiatan memperingati hari-hari besar nasional, misalnya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus setiap tahun, AMPI ikut membantu melancarkan kegiatan tersebut dalam kepanitiaan.

Seorang ketua AMPI di Desa Pengandonan ini harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi ketua AMPI.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Ketua AMPI:

1. Mempunyai disiplin yang tinggi;
2. Berwibawa dan cakap sebagai pemimpin;
3. Patuh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diembannya;
4. Mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap organisasi AMPI.

Hak dan Kewajiban Ketua Organisasi AMPI Desa Pengandonan:

1. Membuat program kerja;
2. Melaksanakan program kerja itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam rangka mencapai tujuan organisasi AMPI;
3. Mempertanggungjawabkan kepemimpinannya secara organisasi kepada atasannya.

Atribut/Symbol Kepemimpinan Ketua Organisasi AMPI Desa Pengandonan : Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AMPI bahwa atribut/symbol kepemimpinan AMPI termasuk kepemimpinan sub rayon secara khusus tidak ada. Atribut/Symbol yang ada adalah atribut/symbol organisasi AMPI. Atribut/symbol tersebut antara lain berupa lambang, rencana dan badge, baret, topi, pakaian seragam dan banyak lagi.

Lambang AMPI berbentuk cakera, dilengkapi dengan gambar kepulauan nusantara Indonesia, dua buah lingkaran, dua bintang, delapan daun pelepah. Cakra yang memuat ujung senjata trisula, dan senjata keris, dan huruf "Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia".

Makna dan arti yang terkandung dalam lambang AMPI adalah (1) senjata cakera adalah pemungkas yang mampu menghancurkan segala tindakan dan sifat angkara murka, selalu membela kebenaran dan keadilan, senantiasa berputar dan bergerak dinamis dalam menjalankan tugas serta kewajiban, (2) daun pelepah cakera berliku lima, berarti Pancasila sebagai dasar falsafah perjuangan AMPI, (3) dua bintang, lima lekukan daun pelepah cakera serta tiga ujung trisula berarti merupakan kelahiran AMPI, (4) enam jenis unsur yang terlukis pada lambang berarti merupakan kelahiran AMPI pada bulan enam atau Juni, (5) Trisula berarti bahwa AMPI dalam melaksanakan tugas yang diembannya berpedoman kepada Tri Dharma

AMPI, yaitu pembaharuan, kekaryaan, dan kerakyatan yang manusiawi, (6) daun pelepah cakra dengan satu ujung senjata/satu urat nadi melambangkan arah, sedangkan daun pelepah dengan tiga ujung senjata/urat nadi (trisula) melambangkan ajaran prinsip kehidupan manusia di dunia, yaitu asah, asih, dan asuh.

Makna dan arti warna lambang AMPI adalah (1) warna putih senjata cakra mengandung arti suci, (2) warna dasar kuning mengandung arti agung selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa. Ketuhanan Yang Mahaesa merupakan dasar dan landasan perjuangan AMPI, (3) warna merah pada huruf AMPI mengandung arti berani, bertanggung jawab, serta bersemangat baja, (4) warna hitam mengandung arti kemantapan, keteguhan, dan kekekalan AMPI dalam mempertahankan negara Republik Indonesia.

Lambang AMPI di atas dipergunakan pada panji dan bendera,encana dan badge, baret dan topi lapangan, jaket dan pakaian seragam, piagam, papan nama, vandel, dan lain-lain.

Lencana, badge, baret, topi lapangan, pakaian seragam cara menggunakannya dan bentuknya, serta bahannya diatur dalam anggaran rumah tangga AMPI.

Gelar/nama dan tanda-tanda kekuasaan yang khusus untuk menandakan seorang ketua AMPI di Desa Pengandonan ini tidak ada.

Pimpinan sub rayon AMPI di Desa Pengandonan ini disahkan dan dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Ogan dan Komering Ulu, di Baturaja dengan sepengetahuan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat satu, Propinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AMPI Bab X pasal 17 alenia.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung menjadi Sekretaris, Bendahara dan Anggota AMPI secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Sekretaris:

1. Telah terdaftar sebagai anggota AMPI di desa Pengandonan;
2. Dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas;
3. Menguasai hal-hal yang ada hubungannya dengan administrasi keorganisasian;
4. Disenangi oleh anggota AMPI lainnya.

Bendahara:

1. Telah terdaftar sebagai anggota AMPI di desa Pengandonan;
2. Dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya dalam melaksanakan tugas;
3. Jujur dalam mengatur dan pemanfaatan keuangan yang ada;
4. Disenangi oleh anggota AMPI lainnya.

Anggota:

1. Mengisi formolir pendataran;
2. Mengikuti segala kegiatan AMPI di desa Pengandonan;
3. Warga negara Republik Indonesia.

Hak dan kewajiban sekretaris, bendahara, dan anggota AMPI di desa Pengandonan adalah sebagai berikut.:

Sekretaris:

1. Mengemukakan usul atau saran dalam menyusun rencana kegiatan;
2. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah, Tangga AMPI
3. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas organisasi.

Bendahara:

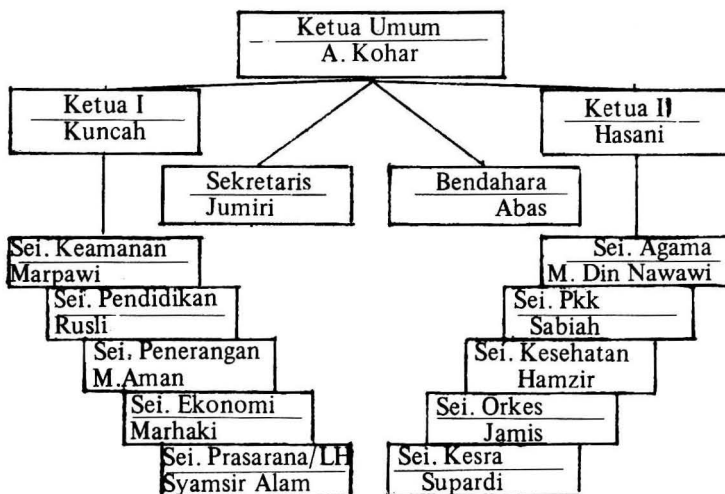
1. Mengatur dan mengusahakan dana untuk kegiatan organisasi.
2. Mengikuti kegiatan organisasi;
3. Menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AMPI.

Anggota:

1. Menghayati dan mengamalkan kebulatan tekad AMPI.
2. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh keputusan organisasi.
3. Membantu dewan pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
4. Membela kepentingan organisasi.
5. Meningkatkan disiplin organisasi,
6. Memilih dan dipilih, menjadi pengurus AMPI,
7. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran.
8. Mengikuti kegiatan organisasi.
9. Membayar iuran anggota.

Nama Organisasi LKMD : LKMD singkatan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Organisasi ini adalah berpedoman kepada keputusan presiden Nomor 28 tahun 1980, yaitu penyempurnaan dan peningkatan fungsi lembaga sosial desa menjadi lembaga ketahanan masyarakat desa.

Susunan Pengurus LKMD Desa Pengandonan



Hal ini dilakukan atas dasar bahwa desa secara keseluruhan merupakan landasan ketahanan nasional dan perlu memiliki sesuatu lembaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Diharapkan dengan penyempurnaan ini partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan ini terpadu menuju ketahanan desa yang mantap.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa merupakan organisasi sosial masyarakat yang bersifat lokal. Secara organisatoris berdiri sendiri yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keanggotaan LKMD Desa Pengandonan: Kepengurusan dan keanggotaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandonan terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, dan pemimpin lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Pengandonan. Jumlah keanggotaan tersebut disesuaikan dengan kepentingan kepemimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandonan.

Kepengurusan atau anggota pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang terdiri dari departemen-departemen dan lembaga-lembaga nondepartemen yang secara sektoral mempunyai kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa Pengandonan ini. Pengurus tersebut bekerja untuk mengisi atau mengusahakan agar Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa praktis berfungsi. Pengurus menggerakkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Tujuan yang Hendak Dicapai Organisasi LKMD Desa Pengandonan: Tujuan utama organisasi LKMD adalah untuk membantu kepala desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan berusaha meratakan hasil pembangunan dengan membubuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat mampu menanggulangi atau mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam membina wilayah. Dalam hal ini adalah wilayah Desa Pengandonan:

Tempat dan Kegiatan LKMD Desa Pengandonan: Tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandonan sama dengan tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa lainnya di Indonesia, yaitu membantu pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat, menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah :

1. Menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
2. Menanamkan pengertian dan kesadaran akan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
3. Menggali dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan swadaya gotong royong dalam masyarakat;

4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta antar warga masyarakat itu sendiri;
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk kegiatan membangun;
7. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
8. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk membangun dan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah dan menciptakan ketahanan yang mantap.

Hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa adalah membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk hubungannya dengan Lembaga Musyawarah Desa (a) membantu Lembaga Musyawarah Desa merencanakan dan melaksanakan pembangunan, (b) bekerjasama dalam menelaah setiap usulan yang akan diajukan kepada pemerintah desa. Sedangkan hubungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandanan dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di luar Desa Pengandanan adalah saling memberi informasi dan saling membantu.

Oleh karena Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah organisasi yang dipilih secara formalitas, yaitu kepala desa langsung menjadi ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, maka syarat-syarat kepemimpinan organisasi ini otomatis tidak ada.

Pusat kegiatan organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandanan adalah di kantor kepala desa. Sedangkan untuk melakukan rapat-rapat organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandanan memanfaatkan Balai Desa.

Upacara pelantikan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dilakukan oleh Camat sebagai kepala wilayah kecamatan. Tempat pelantikan dilakukan di kantor kecamatan, Camat adalah sebagai pembina organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Oleh karena itu kepemimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa harus mempertanggungjawabkan organisasinya kepada Camat.

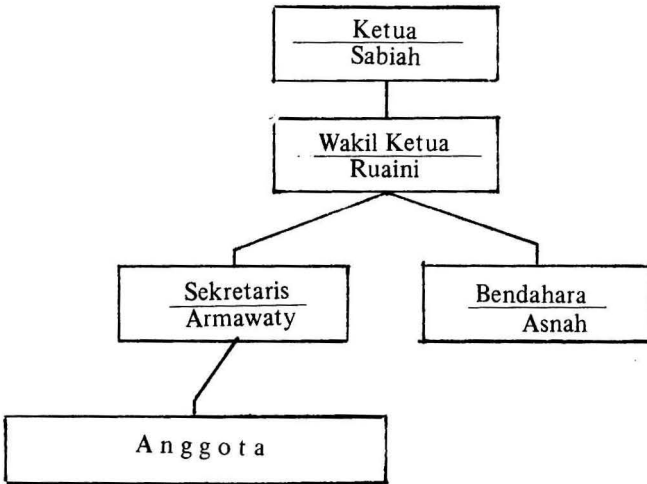
Sampai saat ini Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandanan banyak sekali bantuannya buat pembangunan Desa Pengandanan. Dan tentu saja hal itu banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat Pengandanan.

Lambang atau lencana bagi organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Pengandanan tidak ada sama sekali.

Nama Organisasi Kelompok PKK : Organisasi PKK Desa Pengandanan didirikan tahun 1982 oleh A. Kohar selaku kepala desa Pengandanan. Organisasi PKK Pengandanan ini bersifat organisasi fungsional. Dikatakan organisasi fungsional karena kepengurusan organisasi ini ditunjuk dan dipilih berdasarkan fungsi suami. Dengan kata lain bahwa istri kepala desa otomatis menjadi/menjabat ketua umum organisasi PKK tersebut. Untuk Desa Pengandanan organisasi Kelompok PKK ini ketuanya dijabat oleh Sabiah, yaitu istri kepala desa.

Organisasi Kelompok PKK Desa Pengandonan ini dibentuk dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Surat Keputusan pendirian organisasi Kelompok PKK Pengandonan ini tidak dapat dikemukakan, karena informasi tidak jelas. Latar belakang berdirinya organisasi Kelompok PKK Pengandonan ini adalah untuk menghimpun dan meningkatkan ketrampilan para ibu rumah tangga yang ada di Desa Pengandonan.

Susunan Pengurus PKK adalah sebagai berikut:



Keanggotaan Kelompok PKK Desa Pengandonan : Yang menjadi anggota organisasi ini adalah ibu-ibu dan remaja putri yang ada di desa Pengandonan. Jumlah anggotanya tidak dapat dipastikan karena belum diadakan pencatatannya oleh organisasi ini.

Peranan organisasi ini sangat penting sekali dalam masyarakat Pengandonan, karena melalui organisasi ini para ibu rumah tangga dapat meningkatkan ketrampilan mereka. Sebagai contoh ketrampilan yang dapat mereka pelajari melalui organisasi ini adalah memasak, menganyam, merenda, dan kegiatan di bidang pertanian.

Tempat dan Kegiatan: Kegiatan di atas dipusatkan di rumah kepala desa, yaitu A. Kohar.

Kelompok PKK di Desa Pengandonan ini tidak mempunyai nama khusus. Lambang organisasi dan lambang kepemimpinan organisasi ini tidak ada. Kelompok PKK di Desa Pengandonan ini pernah mendapat bantuan dari pemerintah, yaitu

Kegiatan kelompok PKK di Desa Pengandonan ini sebahagian telah berjalan dengan baik dan diadakan satu kali dalam satu bulan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok PKK di Desa Pengandonan ini adalah merenda, menganyam, dan memasak. Sedangkan kegiatan di bidang perta-

nian hanya sekali-sekali saja dilakukan. Hal ini disebabkan kurangnya pembimbing dalam kegiatan tersebut.

**Sistem Kepemimpinan Kelompok PKK Desa Pengandonan:
Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Wakil Ketua Kelompok**

1. Anggota kelompok PKK desa Pengandonan.
2. Dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya dan anggota,
3. Mau bekerja untuk organisasi,
4. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya,

**Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Sekretaris Kelompok PKK
Desa Pengandonan :**

1. Anggota kelompok PKK desa Pengandonan.
2. Dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya dan anggota.
3. Sedikit-sedikit mengetahui masalah administrasi,
4. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya.

**Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Wakil Sekretaris Kelompok
PKK Desa Pengandonan :**

1. Anggota kelompok PKK Desa Pengandonan,
2. Dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya dan anggota,
3. Sedikit-sedikit mengetahui masalah administrasi,
4. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya.

**Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Bendahara Kelompok PKK
Desa Pengandonan :**

1. Anggota kelompok PKK desa Pengandonan,
2. Dapat bekerja sama dengan pengurus lainnya dan anggota,
3. Jujur,
4. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya.

**Hak dan Kewajiban Wakil Ketua Kelompok PKK Desa Pengando-
nan:**

1. Membantu ketua menyusun rencana kegiatan,
2. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan PKK,
3. Mewakili ketua sewaktu-waktu.

Hak dan Kewajiban Sekretaris Kelompok PKK Desa Pengandonan

1. Membantu ketua membuat rencana kegiatan.
2. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan PKK.
3. Mengadakan pencatatan mengenai organisasi.

**Hak dan Kewajiban Wakil Sekretaris Kelompok PKK Desa Pe-
ngandonan :**

1. Membantu sekretaris mengadakan pencatatan mengenai orga-
nisasi kelompok PKK,
2. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan organisasi,
3. Menggantikan sekretaris sewaktu-waktu.

Hak dan Kewajiban Bendahara Kelompok PKK Desa Pengandonan:

1. Mengatur dana untuk kegiatan organisasi,
2. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi.

Cara Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara:

Mereka dipilih atau ditunjuk oleh ketua secara langsung. Pengangkatannya tidak dengan upacara tertentu tetapi cukup diberitahukan kepada semua anggota.

Atribut atau lambang organisasi kelompok PKK di Desa Pengandonan ini baik atribut atau lambang sebagai ketua kelompok PKK maupun sebagai anggota sampai saat ini tidak ada.

Oleh karena organisasi PKK Desa Pengandonan ini merupakan organisasi fungsional, yaitu isteri kepala desa otomatis menjadi ketua dalam organisasi tersebut, maka persyaratan kepemimpinan organisasi secara resmi tidak ada.

Hak dan Kewajiban Pemimpin Kelompok PKK Desa Pengandonan:

1. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan sepuluh segi PKK
2. Menghadiri setiap pertemuan anggota.
3. Menghadiri setiap kegiatan kelompok PKK itu

Atribut/Symbol Kepemimpinan: Mengenai gelar dan tanda-tanda kebesaran memang tidak dikemukakan dalam laporan karena hal itu tidak dijumpai di desa sampel.

Cara Pengangkatan dan Upacara: Karena organisasi PKK ini merupakan organisasi yang bersifat fungsional maka ketuanya diangkat secara serta merta. Maksudnya adalah bahwa seorang istri kepala desa langsung diangkat sebagai ketua kelompok PKK. Demikian juga halnya dengan di desa Pengandonan ini. Upacara pengangkatannya dilakukan setelah pelantikan kepala desa. Pelantikan dilakukan oleh Ketua PKK Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan dan Komering Ulu .

Yang masih perlu ditambah dalam bagian ini adalah :

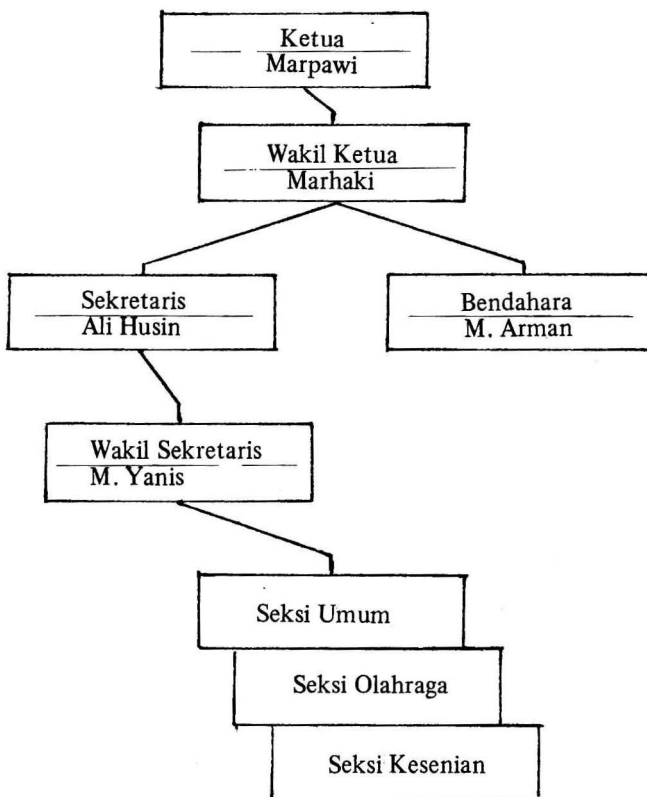
Nama Organisasi Karang Taruna : Organisasi Karang Taruna di Desa pengandonan didirikan atas prakarsa kepala desa, yaitu A. Kohar. Petunjuk untuk mendirikan organisasi Karang Taruna Pengandonan ini adalah berpedoman kepada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Karang Taruna Desa Pengandonan diberi nama Tunas Harapan. Surat keputusan pendirian tidak jelas. Karang Taruna Tunas Harapan pernah mendapat subsidi dari Departemen Sosial yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Subsidi atau bentuk bantuan tersebut berupa peralatan olahraga, dan peralatan kesenian.

Organisasi ini sebenarnya adalah organisasi remaja, karena tujuannya banyak diarahkan kepada penyaluran bakat kreatifitas remaja, terutama bagi anak-anak yang putus sekolah . Dengan demikian diharapkan remaja bisa berprestasi, aktif dan giat dalam mengisi waktunya. Tentu saja hal lain yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan penyaluran bakat re-

maja kepada hal-hal yang bermanfaat ini, secara tidak langsung mengarahkan remaja kepada hal yang lebih baik, dan sekaligus mengurangi kenakalan di kalangan remaja. Berarti pula bahwa akan membina manusia Indonesia yang berguna bagi bangsanya kelak dalam mengisi pembangunan.

Susunan pengurus Karang Taruna Tunas Harapan Desa Pengandonan adalah sebagai berikut:



Seorang pemimpin Karang Taruna Tunas Harapan Pengandonan secara umum harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Cakap, dan mempunyai keahlian dalam memimpin, terutama dalam menghimpun generasi muda;
2. Mempunyai tanggung jawab yang besar, serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam pembangunan, terutama pembangunan yang ada hubungannya dengan generasi muda di pedesaan;
3. Berwibawa terhadap anggota, serta mempunyai pengaruh yang luas di dalam masyarakat.

Kewajiban bagi seorang pemimpin Karang Taruna Tunas Harapan Desa Pengandonan secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Menghimpun anggota untuk mengaktifkan kegiatan, sesuai dengan rencana kerja;
2. Menciptakan keharmonisan sesama pengurus dan sesama anggota, sehingga wadah Karang Taruna Tunas Harapan menjadi wadah kesatuan dan kebersamaan;
3. Menyusun terencana kerja yang baik dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat;
4. Mempertanggungjawabkan organisasi Karang Taruna Tunas Harapan Pengandonan secara organisatoris,

Hak seorang pemimpin Karang Taruna Tunas Harapan Desa Pengandonan secara resmi tidak ada. Hanya saja sebagai tokoh masyarakat desa tentu saja setiap usulnya dalam pembangunan desa, terutama yang ada hubungannya dengan generasi muda harus mendapat perhatian oleh pimpinan desa.

Keanggotaan Karang Taruna Tunas Harapan Desa Pengandonan tidak dapat diketahui dengan pasti. Secara resmi anggota yang terdaftar tidak ada. Tetapi masyarakat desa semuanya merasa memiliki organisasi Karang Teruna Tunas Harapan Pengandonan ini. Dan setiap warga desa dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di organisasi Karang Taruna Tunas Harapan dengan baik.

Pusat kegiatan organisasi Karang Taruna Tunas Harapan Pengandonan adalah Balai Desa Pengandonan. Di samping itu, untuk kegiatan olahraga dilaksanakan di sebuah lapangan di pinggir Desa Pengandonan.

Kegiatan yang menonjol dari Karang Taruna Tunas Harapan Pengandonan adalah kegiatan olahraga dan kesenian. Kegiatan olahraga hampir dilakukan setiap hari baik berupa latihan biasa atau mengadakan pertandingan dengan masyarakat desa lain. Sedangkan yang berlatih tidak terbatas hanya dengan generasi muda saja, tetapi orang tua pun ikut serta dalam latihan. Yang memanfaatkan peralatan Karang Taruna Tunas Harapan Pengandonan adalah masyarakat desa seluruhnya. Kegiatan kesenian pun sering dilakukan, terutama kegiatan seni tari.

Selain kegiatan olahraga dan kesenian, kegiatan lain belum kelihatan berkembang. Hal ini mungkin disebabkan belum lengkapnya sarana yang dimiliki. Di samping itu, belum mantapnya program kerja sehingga kegiatan belum dapat terarah dan mantap. Setiap aktifitas sosial selalu berbaur dengan kegiatan lainnya, dan ini mungkin merupakan ciri dari kehidupan di pedesaan seperti Pengandonan ini. Masyarakat hampir tidak peduli dengan ikatan organisasi yang terlalu formal. Masyarakat pada umumnya mementingkan kerjasama yang baik dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, akrab dan kekeluargaan.

Lambang organisasi Karang Taruna Tunas Harapan Desa Pengandonan, termasuk lambang khusus kepemimpinan organisasi Karang Taruna Tunas Harapan Pengandonan tersebut sampai saat ini belum ada. Gelar dan atau nama sebagai kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin organisasi itu pun tidak ada.

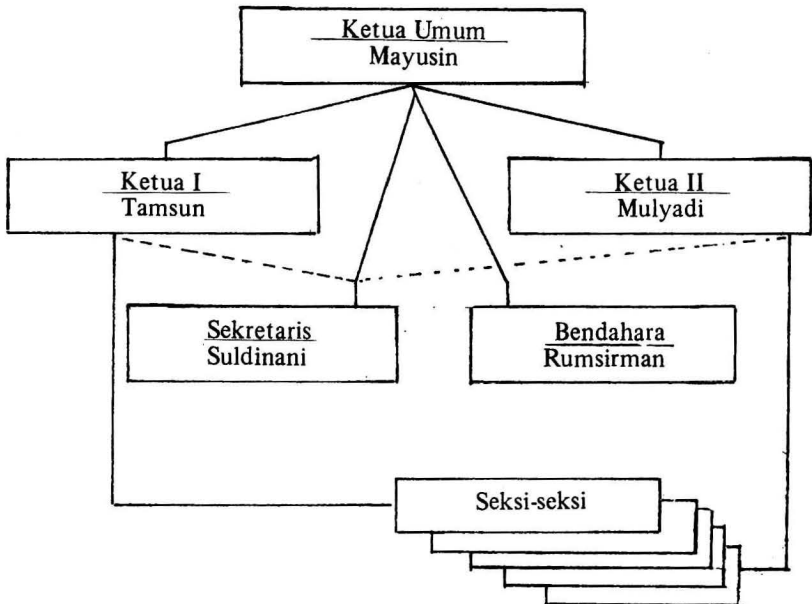
Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Sosial Desa Kelumpang : Di dalam Desa Kelumpang terdapat lima buah organisasi sosial, yaitu Karang Taruna, Kelompok PKK, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Muhammadiyah, dan Syarikat Islam. Gambaran mengenai kelima organisasi sosial ini akan diuraikan sebagai berikut.

Karang Taruna: Organisasi Karang Taruna di Desa Kelumpang didirikan atas prakarsa Pasirah Marga Ulu Ogan, yaitu Umar Hanan, karena pada waktu itu Desa Kelumpang masih dalam pemerintahan formal tradisional. Petunjuk untuk mendirikan Karang Taruna di Desa Kelumpang ini adalah berpedoman kepada keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Karang Taruna di Desa Kelumpang ini diberi nama Anggrek Sakti (makna dari nama tersebut menunjukkan bahwa di Desa Kelumpang subur dan penuh keindahan, dan hal itu petanda kejayaan Desa Kelumpang tersebut) Surat Keputusan yang menunjuk pendirian organisasi Karang Taruna Anggrek Sakti di Desa Kelumpang ini tidak dapat ditunjukkan, karena informasi tidak lengkap. Karang Taruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang pernah mendapat subsidi dari Departemen Sosial yang disalurkan melalui pemerintah daerah. Subsidi atau bantuan yang diberikan berupa peralatan olahraga dan peralatan kesenian.

Organisasi Karang Taruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang ini sebenarnya adalah organisasi yang disediakan bagi kepentingan remaja, karena tujuan utamanya adalah untuk penyaluran bakat atau kreatifitas remaja, terutama ditujukan bagi anak-anak yang putus sekolah. Dengan demikian, diharapkan remaja bisa berprestasi, aktif dan giat dalam mengisi waktu senggangnya. Tentu saja hal lain yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan penyaluran bakat seperti ini, remaja diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, dan itu berarti akan mengurangi kenakalan remaja. Bearti pula akan membina manusia Indonesia yang berguna bagi bangsa, terutama dalam mengisi pembangunan sekarang ini.

Susunan pengurus Karang Taruna Anggrek Sakti di Desa Kelumpang adalah sebagai berikut :



Kepengurusan Karang Taruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang seogyanya akan dilengkapi dengan beberapa seksi, namun sampai penelitian ini dilakukan pengurus-pengurus seksi belum dapat terpenuhi. Kepengurusan ini telah disahkan dan dilantik oleh Pasirah Marga Ulu Ogan.

Seorang pemimpin Karang Taruna Anggrek Sakti Kelumpang secara umum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Cakap, serta mempunyai keahlian dalam memimpin, terutama dalam memimpin generasi muda;
2. Mempunyai tanggung jawab yang besar, serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam pembangunan, terutama pembangunan yang ada hubungannya dengan generasi muda di pedesaan;
3. Berwibawa terhadap anggota, serta mempunyai pengaruh yang luas di dalam masyarakat.

Kewajiban bagi seorang pemimpin Karang Taruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Menghimpun anggota untuk ikut serta dalam setiap kegiatan, terutama dalam melaksanakan program kerja organisasi;
2. Menciptakan keharmonisan sesama pengurus dan sesama anggota, sehingga wadah Karang Taruna Anggrek Sakti menjadi wadah kesatuan dan kebersamaan;
3. Menyusun rencana kerja yang baik, yang bermanfaat langsung bagi anggota dan masyarakat, sesuai dengan kehidupan pedesaan;
4. Mempertanggungjawabkan organisasi Karang Taruna Anggrek Sakti secara organisatoris sesuai dengan presidur organisasi.

Hak seorang pemimpin Karang Taruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang secara resmi tidak ada. Hanya saja sebagai tokoh masyarakat desa tentu saja setiap usul atau sarannya dalam pembangunan desa, terutama yang ada hubungannya dengan generasi muda selalu diperhatikan oleh pemerintah desa.

Keanggotaan Karang Taruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang tidak dapat diketahui jumlahnya dengan pasti. Secara resmi anggota yang terdaftar tidak ada, tetapi masyarakat desa merasa memiliki organisasi Karang Taruna Anggrek Sakti Kelumpang ini, setiap warga masyarakat memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada pada Karang Taruna Anggrek Sakti Kelumpang dengan baik.

Pusat kegiatan Karang Taruna Anggrek Sakti Kelumpang ini adalah di Balai Desa Kelumpang. Sedangkan untuk kegiatan olahraga dilakukan di lapangan olahraga yang terletak di timur desa. Kegiatan yang paling menonjol dari organisasi Karang Taruna Anggrek Sakti Kelumpang adalah kegiatan olahraga dan kegiatan kesenian. Kegiatan olahraga hampir dilakukan setiap hari, baik berupa latihan sesama anggota maupun dalam pertandingan dengan perkumpulan olahraga di desa lain. Dan yang menarik perhatian bahwa yang berlatih tidak terbatas hanya pada anak remaja saja, tetapi orang-orang tua ikut juga berlatih. Yang memanfaatkan peralatan Karang Taruna Anggrek Sakti Kelumpang tersebut adalah seluruh warga masyarakat Desa Kelumpang. Kegiatan kesenian juga diaktifkan walaupun tidak seaktif kegiatan olahraga. Paling tidak latihan kesenian dilakukan satu kali dalam seminggu.

Selain kegiatan olahraga dan kesenian, kegiatan lain belum kelihatan perkembangannya. Hal ini mungkin disebabkan belum lengkapnya kepengurusan dan juga belum lengkapnya peralatan, serta kurangnya tenaga pelatih. Setiap aktifitas sosial selalu berbaur antara kegiatan Karang Taruna Anggrek Sakti dengan kegiatan sosial organisasi lain yang ada di Desa Kelumpang. Dan ini mungkin merupakan ciri kehidupan pedesaan yang tidak peduli dengan bentuk ikatan organisasi yang terlalu formal. Yang penting bagi masyarakat segala sesuatunya berjalan dengan lancar, akrab dan kekeluargaan.

Lambang organisasi Karang Taruna Anggrek Sakti di Desa Kelumpang sampai sekarang belum ada. Termasuk juga lambang kepemimpinannya juga tidak ada.

Cara Pengangkatan dan Upacara : Para pemimpin atau pengurus organisasi Karang Taruna di Desa Pengandonan ini dipilih dalam suatu rapat yang dihadiri oleh para remaja di desa itu. Setelah itu, kepengurusan ini diumumkan kepada segenap anggota. Dengan demikian, tidak diangkat dengan upacara.

Kelompok PKK : Organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1981. Organisasi ini bersifat organisasi fungsional. Dikatakan organisasi fungsional karena kepengurusan organisasi Kelompok PKK seperti ini ditunjuk dan dipilih berdasarkan fungsi suami. Dengan kata lain bahwa istri kepala desa otomatis menjadi ketua dalam organisasi Kelompok PKK ini.

Organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang ini dibantu dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Berdirinya organisasi Kelompok PKK di Desa Kelumpang ini adalah atas prakarsa Pasirah Marga Ulu Ogan, yaitu Umar Hanan. Sedangkan surat keputusan pendirian organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang ini tidak diketahui dengan jelas.

Kelompok PKK di Desa Kelumpang tidak mempunyai nama khusus. Lambang organisasi dan lambang kepemimpinan organisasi tidak ada. Kelompok PKK Desa Kelumpang ini pernah mendapat subsidi dari pemerintah, yaitu Departemen Dalam Negeri yang disalurkan melalui pemerintah desa. Subsidi tersebut berupa peralatan PKK seperti mesin jahit, alat masak, alat untuk menghidang. Di samping itu, disalurkan pula bantuan stimulan berupa uang tunai yang jumlahnya tidak menentu. Bantuan uang ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan ibu-ibu dan remaja putri yang ada hubungannya dengan latihan ketrampilan PKK.

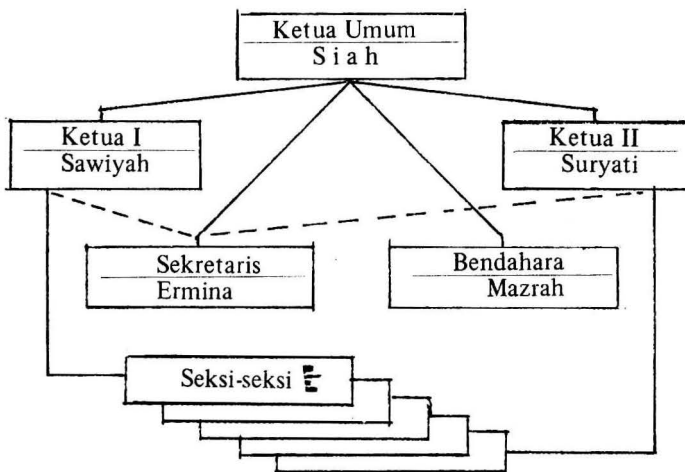
Organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang ini sebenarnya ditujukan kepada ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Karena tujuan pokok dari organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang ini adalah untuk memberikan tambahan ketrampilan bagi ibu-ibu dan remaja putri di Desa Kelumpang. Hal ini dilakukan adalah guna mencapai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Diharapkan dengan terbentuknya organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang ini dapat membantu ibu-ibu dan remaja putri Desa Kelumpang untuk menerapkan sepuluh segi PKK, juga untuk membantu ibu-ibu dan remaja putri untuk meningkatkan gizi makanan, memberikan ketrampilan tambahan, dan sekaligus mengurangi pengangguran.

Sepuluh segi PKK itu meliputi pengertian-pengertian yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2. Gotong royong;
3. Sandang pangan;
4. Perumahan;
5. Tata laksana rumah tangga,
6. Pendidikan dan ketrampilan;
7. Kesehatan;
8. Pengembangan hidup berkoperasi,
9. Kelestarian lingkungan hidup dan
10. Perencanaan sehat yang merupakan dasar untuk menganalisis dan meningkatkan kehidupan masyarakat agar mencapai tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian maka tercapai pula tujuan bangsa, yaitu menuju masyarakat adil makmur sejahtera berdasarkan pancasila.

Dengan sarana yang ada Kelompok PKK di Desa Kelumpang telah berjalan seadanya. Kegiatan memasak dilakukan hanya sekali-kali, sedangkan kegiatan lainnya belum kelihatan. Hal ini terjadi mungkin karena salah pengertian, atau mungkin salah penerangan tentang fungsi Kelompok PKK Desa Kelumpang. Peranan kelompok PKK belum kelihatan, kegiatan tidak merata dirasakan oleh masyarakat. Sebahagian masyarakat ibu-ibu dan remaja putri belum menyadari bahwa Kelompok PKK itu adalah wadah kegiatan untuk mereka. Akibatnya bahwa kegiatan PKK hanya didominasi oleh orang-orang tertentu. Hal ini sangat disesalkan, karena dari segi lain Kelompok PKK Kelumpang mempunyai aspek yang baik. Kelompok PKK Desa Kelumpang dapat memantu ibu-ibu dan remaja putri di Desa Kelumpang meningkatkan ketrampilan yang sudah ada, yaitu di samping kegiatan memasak juga seperti kegiatan menjahit, menganyam, dan bahkan perkebunan dan pertanian.

Pengurus Kelompok PKK di Desa Kelumpang dapat dilihat sebagai berikut :



Dilihat dari susunan pengurusnya, bahwa ketua umum organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang masih diketuai oleh ibu Pasirah. Padahal menurut semestinya ketua umum tersebut harus dijabat oleh ibu kepala desa. Hal ini dapat dimaklumi karena pemerintahan desa Kelumpang masih dalam transisi, yaitu dari sistem pemerintahan formal tradisional menuju sistem pemerintahan desa berdasarkan undang-undang pemerintah nomor 5 tahun 1979.

Hal lain dapat dikemukakan bahwa kepengurusan sampai penelitian ini dilakukan pengurus seksi-seksi masih belum dilengkapi, program kerja juga belum mantap, kegiatan belum terarah. Hal ini dapat dimaklumi karena diketahui bahwa masyarakat Desa termasuk Desa Kelumpang adalah sebagian besar sebagai petani. Ibu-ibu dan remaja putri biasanya lebih banyak ikut suami atau orang tua mereka untuk mengerjakan pertanian di sawah atau di ladang. Padahal sebenarnya kesempatan bagi ibu-ibu, terutama remaja putri untuk meningkatkan pengetahuan mereka melalui organisasi Kelompok PKK ini sangat besar.

Tempat kegiatan Kelompok PKK Desa Kelumpang dipusatkan di Balai Desa, kadang-kadang di rumah Pasirah atau kepala desa, atau juga di rumah salah seorang anggota Kelompok PKK Desa Kelumpang.

Oleh karena organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang merupakan organisasi fungsional, yaitu istri kepala desa otomatis menjadi ketua dalam tubuh organisasi Kelompok PKK ini, maka persyaratan kepemimpinan organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang tidak ada.

Atribut dan lambang organisasi Kelompok PKK Desa Kelumpang sampai saat ini juga tidak ada.

Cara Pengangkatan dan Upacara : Karena kepengurusan PKK di desa Kelumpang ini masih merupakan pengurus yang lama, maka cara pengangkatannya adalah bahwa istri pasirah langsung menjabat sebagai ketuanya. Pengangkatannya tidak dengan upacara melainkan dengan dikeluarkannya SK dari Pasirah sedangkan SK-nya tidak diketahui dengan jelas.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa : Organisasi ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 28 tahun 1980, yaitu penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa desa secara keseluruhan merupakan landasan ketahanan nasional dan perlu memiliki sesuatu lembaga yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa. Diharapkan dengan penyempurnaan ini partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan ini terpadu menuju ketahanan desa yang mantap.

Tujuan utama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelumpang adalah untuk membantu kepala desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan membubuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun, sehingga masyarakat mampu menanggulangi, mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam membina wilayah.

Tugas pokok Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelumpang adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara

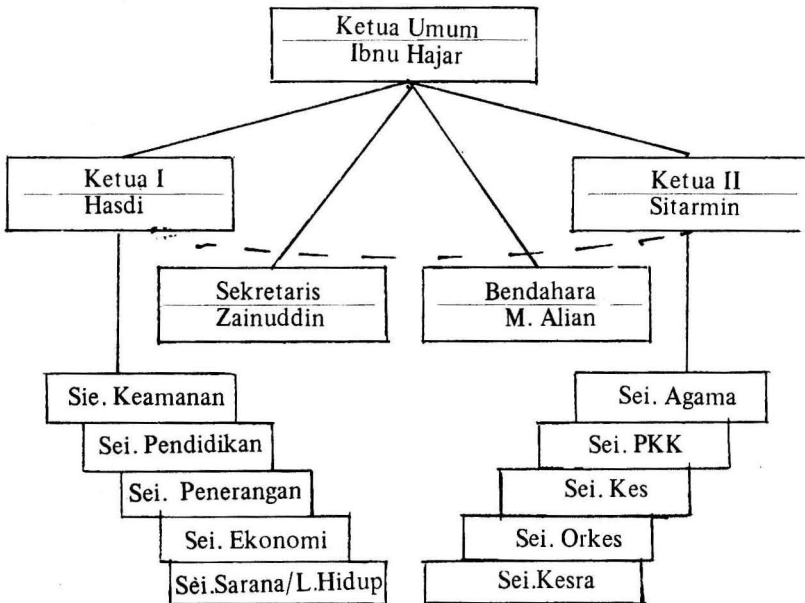
terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat, menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan desa.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Lembaga Ketahanan Desa Kelumpang adalah :

1. Menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan;
2. Menanamkan pengertian kesadaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3. Menggali memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong dalam masyarakat;
4. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta antar warga masyarakat itu sendiri;
5. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk membangun;
7. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
8. Membina kerjasama antar keluarga lembaga yang ada dalam masyarakat untuk membangun; dan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa menciptakan ketahanan yang mantap.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelumpang merupakan organisasi masyarakat yang bersifat lokal. Secara organisasi berdiri sendiri yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Di Desa Kelumpang telah tersusun kepengurusan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelumpang sebagai berikut :



Keanggotaan LKMD Desa Kelumpang. Kepengurusan dan keanggotaan LKMD desa Kelumpang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, dan pemimpin lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa Kelumpang. Jumlah keanggotaan disesuaikan dengan kepentingan kepemimpinan LKMD desa Kelumpang.

Kepengurusan atau anggota pengurus LKMD yang terdiri dari lembaga-lembaga yang secara sektoral mempunyai kegiatan dalam tugas pembangunan di desa ini. Pengurus tersebut bekerja untuk mengisi atau mengusahakan agar LKMD praktis berfungsi. Pengurus menggerakkan LKMD sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Organisasi ini langsung diketuai oleh kepala desa. Oleh karena itu, organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat, terutama peranannya dalam menunjang pembangunan desa, sebab setiap aktifitas pemerintah secara formal, maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selalu dilibatkan. Hal serupa ini tentu saja banyak mendapat sambutan sekaligus kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat merasakan langsung manfaatnya, lebih-lebih mengingat pembangunan pedesaan sekarang sangat pesat.

Lambang atau rencana organisasi secara resmi tidak ada. Sedangkan kekuasaan pemimpinnya juga tidak mempunyai lambang tertentu. Masyarakat menganggap kepemimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, juga kepemimpinan formal desa. Padahal orang yang memangku jabatan sebagai kepala desa, tidak sama fungsinya sebagai Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pusat kegiatan organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kelumpang di kantor kepala desa. Di samping itu, untuk rapat-rapat dilakukan di Balai Desa.

Muhammadiyah : Nama Muhammadiyah sudah cukup dikenal, bahkan sampai keluar negeri. Hal ini disebabkan usaha dan kegiatan Muhammadiyah meliputi berbagai bidang dalam membantu masyarakat, terutama hal-hal yang bersifat sosial seperti sekolah, balai pengobatan, rumah sakit, panti asuhan, mushollah, masjid, dan amalan-amalan nyata lainnya.

Arti dari Muhammadiyah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu (1) dari arti bahasa, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata **Muhammad**. Kata Muhammad ini adalah nama Nabi/Rasul terakhir. Kata Muhammad ini mendapat tambahan **yah** (nisbiah) atau menyesuaikan yang berarti pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. (2) Menurut istilah adalah suatu perserikatan, merupakan pergerakan Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan dengan memakai nama **Muhammadiyah** karena sesuai dengan sifat-sifatnya, yaitu menghimpun pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, dan bertujuan mengikuti jejak dan langkah dari Rasulullah.

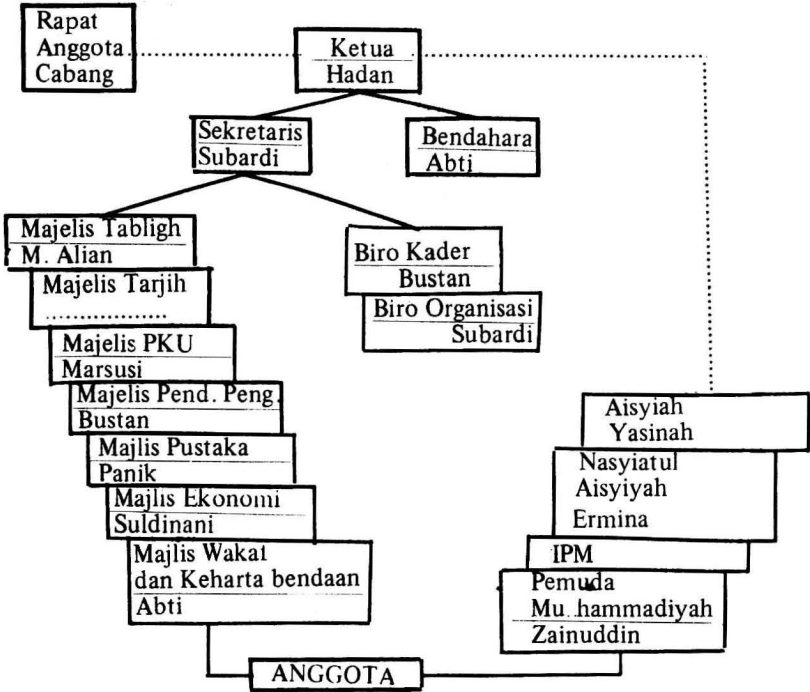
Di Kelumpang organisasi ini adalah Muhammadiyah Cabang Kelumpang, yang membawahi ranting-ranting, yaitu ranting Gunungtiga, ranting Ulaklebar, ranting Pedataran, dan ranting Mendingin. Organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang tunduk di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tingkat II Ogan Komering Ulu, Baturaja. Sebagai sentral Organisasi atau pusat pimpinan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

Organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang didirikan tanggal 30 Januari 1954 dengan Surat Keputusan Nomor 1057/B/1954. Pendirian organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang adalah Dul Husin.

Perlu diketahui bahwa sebelum Surat Keputusan Pendirian Muhammadiyah Nomor 1057/B/1954 persiapan berdirinya organisasi Muhammadiyah sudah tampak. Namun mengingat agresi kolonial Belanda, terpaksa segala bentuk kegiatan dan pendirian formal organisasi belum dapat dilakukan. Sekolahpun sebenarnya sudah dipersiapkan walaupun secara sembunyi-sembunyi memberikan pendidikan kepada masyarakat. Bahkan ketika Belanda menguasai daerah ini Pimpinan Persiapan Organisasi Muhammadiyah beserta simpatisan, serta segala kegiatan persiapan organisasi ditiadakan dan dipindahkan. Masyarakat ikut berevakuasi ke wilayah yang dikuasai oleh negara Republik Indonesia.

Kepengurusan Muhammadiyah Cabang Kelumpang sejak berdirinya tahun 1954 sampai sekarang telah beberapa kali mengalami penggantian pengurus. Hal ini sesuai dengan prosedur organisasi yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Muhammadiyah. Kepengurusan Muhammadiyah Cabang Kelumpang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut. Perlu diketahui bahwa kepengurusan Muhammadiyah dilengkapi dengan majelis-majelis, yaitu semacam bidang-bidang khusus dalam organisasi. Di samping itu, terdapat pula dengan biro-biro dan badan otonom.

Susunan Pengurus Organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang



Keanggotaan Organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang:

Keanggotaan organisasi Muhammadiyah Cangan Kelumpang sampai saat ini tidak diketahui jumlahnya dengan pasti, karena waktu penelitian ini berlangsung belum dilakukan hergertrasi keanggotaan. Secara umum keanggotaan Muhammadiyah Cabang Kelumpang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Umur 18 tahun lebih atau sudah kawin;
4. Menyetujui maksud dan tujuan organisasi.

Persodur keanggotaan Muhammadiyah diajukan oleh yang bersangkutan kepada pimpinan pusat dengan perantaraan ranting atau cabang tempat seseorang tersebut berada. Setiap anggota Muhammadiyah tergabung dalam persatuan anggota di ranting atau di cabang. Kemudian pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan pertimbangan dan syarat-syarat lain. Mereka yang telah diteruskan permintaannya kepada pimpinan pusat oleh pimpinan cabang diberi tanda keanggotaan cabang, dan telah terdaftar dalam buku anggota cabang, sebagai anggota cabang. Pada waktu mereka menerima tanda anggota Muhammadiyah dari pimpinan pusat dengan perantaraan pimpinan cabang maka tanda anggota cabangnya ditarik, dan waktu itulah mereka syah menjadi anggota Muhammadiyah, serta menerima hak dan kewajiban, sebagai tanggung jawabnya terhadap organisasi.

Setelah menerima tanda keanggotaan Muhammadiyah dilakukan dengan resmi sekurang-kurangnya disaksikan oleh pimpinan cabang dan ranting yang bersangkutan dengan diberi nasehat dan petunjuk-petunjuk. Para anggota tersebut diminta janjinya untuk menepati segala kewajiban serta peraturan-peraturan organisasi.

Hak dan kewajiban anggota Muhammadiyah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. menyatakan pendapat;
2. bersuara;
3. memilih dan
4. dipilih.

Kewajiban anggota Muhammadiyah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Setia kepada organisasi;
2. Tunduk dan taat kepada keputusan dan peraturan organisasi;
3. Sanggup menjaga nama baik organisasi;
4. Turut melaksanakan dan mendukung amal usaha organisasi;
5. Membayar uang pangkal dan uang iuran.

Tempat dan Kegiatan : Tempat dan kegiatan organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang adalah di Desa Kelumpang. Sedangkan areal kekuasaan kegiatan mencakup beberapa ranting Muhammadiyah yang dibawahinya, yaitu ranting Gunungtiga, ranting Ulaklebar, ranting Pedataran dan ranting Mendingin. Pusat kegiatannya berlokasi di Kantor Pengurus Cabang Muhammadiyah, yaitu di Sekolah Muhammadiyah di tengah Desa Kelumpang.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah mencakup berbagai segi kegiatan kemasyarakatan, terutama sesuai dengan Majelis yang ada dalam kepengurusan Muhammadiyah Cabang Kelumpang. Kegiatan yang paling menonjol adalah kegiatan di bidang pendidikan yang dikelola oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran dengan sebuah Madrasah Ibtidaiyah. Majelis lainnya seperti Majelis Tabligh kegiatan utamanya adalah mengadakan ceramah agama kepada anggota Muhammadiyah, dan masyarakat. Majelis PKU mengelola kesejahteraan umum masyarakat dengan mengelola santun sosial melalui iuran anggota, atau membantu masyarakat yang kena musibah, miskin, dan mengadakan gotong royong dalam kepentingan masyarakat banyak. Untuk kegiatan Majelis lainnya berjalan seadanya mengimbangi kegiatan majlis yang aktif, dan kegiatannya tidak begitu tampak dalam langkah organisasi. Kegiatan organisasi otonomnya seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IPM, dan Pemuda Muhammadiyah hanya mengikuti perkembangan kegiatan majelis-majelis yang ada dalam tubuh organisasi. Namun kadang-kadang kegiatannya cukup menonjol, seperti Aisyiyah dengan kegiatan pengajian dan ceramah agama khusus kaum ibu. Nasyiatul Aisyiyah mengadakan kegiatan remaja putri mencakup berbagai bidang, terutama PKK, kesenian dan olahraga. Pemuda Muhammadiyah dan IPM yang memiliki Drum Band, walaupun kegiatannya tidak terus menerus, namun hal ini cukup memadai bagi masyarakat pedesaan. Bahkan Pemuda Muhammadiyah pernah memiliki orkes, sebagai penunjang kegiatan kesenian mereka.

Tujuan Organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang: Tujuan yang hendak dicapai organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mengingat anggaran dasar pasal 2, bahwa organisasi Muhammadiyah berasaskan Islam. Sedangkan tujuannya tercantum dalam anggaran dasar pasal 3, yaitu menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Berasaskan Islam maksudnya segala gerak langkah usahanya berdasarkan ajaran dan tuntunan Islam, pelaksanaannya dijalankan dengan cara dan jalan yang dibenarkan oleh Islam. Asas Islam adalah satu-satunya asas yang kuat bersumber pada wahyu Illahi, bukan rekaan manusia.

Dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam ialah mensucikan Agama Islam dan aqidahnya, syariatnya dan ajarannya serta tuntunannya dari suatu yang bukan bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah rasul.

Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ialah masyarakat yang menerima Agama Islam yang murni, yang pribadinya dan masyarakatnya secara bersama menerima Agama Islam, menjalankan segala perintah dan tuntunannya untuk hidup kehidupan baik bagi pribadi-pribadi dan masyarakat bersama, berdasarkan kesadaran dan keyakinan akan kenikmatan hidup beragama Islam.

Asas maksud dan tujuan Muhammadiyah bukanlah sekedar asas dan maksud serta tujuan organisasi, melainkan harus menjadi asas maksud dan tujuan segenap anggota, menjadi pegangan dan pandangan hidup.

Maksud dan tujuan Muhammadiyah tersebut diperjuangkan dengan dakwah amar makruf nahi mungkar, dengan ajakan, dengan dorongan dengan bimbingan, dan dengan tuntunan, serta dengan peringatan-peringat-

an kebijaksanaan, dengan cara bermusyawarah dan damai tanpa sesuatu paksaan. Dengan demikian, diharapkan tercapainya tujuan organisasi, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Sistem kepemimpinan organisasi Muhammadiyah cabang Kelumpang sesuai menurut anggaran dasar pasal 9 sampai 12, bahwa pimpinan organisasi terdiri dari beberapa orang yang dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan organisasi, yaitu pada tingkat Cabang. Kepemimpinan Cabang Kelumpang bertanggung jawab kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Tingkat II Ogan Komering Ulu, Baturaja.

Pimpinan organisasi terdiri dari anggota organisasi. Pemilihan pimpinan dijalankan oleh sebuah panitia pemilihan yang dibentuk oleh pimpinan organisasi dan disahkan oleh permusyawaratan organisasi dengan menurut tata tertib pemilihan dengan berpedoman pada tata tertib pemilihan pimpinan pusat.

Syarat-syarat kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya satu tahun, beribadah/menjalankan syariat Islam;
2. Setia kepada organisasi dan perjuangannya;
3. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan pusat;
4. Mampu dan cakap menjalankan kewajibannya;
5. Berpengalaman dalam pimpinan organisasi;
6. Dapat menjadi teladan utama bagi organisasi;
7. Tidak merangkap jabatan Pimpinan Partai Politik atau gerakan lainnya yang sama amal asuhannya dengan organisasi Muhammadiyah.

Kepemimpinan Muhammadiyah Cabang Kelumpang ini disahkan oleh Pimpinan Wilayah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan atas nama Pimpinan Pusat. Cara pengangkatan menurut organisasi adalah diadakan upacara yang dilantik oleh pimpinan daerah. Dalam hal ini dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, Baturaja

Syarat-syarat dan faktor pendukung sekretaris organisasi Muhammadiyah desa Kelumpang:

1. Merupakan anggota organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang;
2. Mengetahui sedikit masalah organisasi;
3. Dapat bekerja sama dengan ketua, dan
4. Disenangi oleh ketua dan anggota Muhammadiyah lainnya di desa itu.

Hak dan Kewajiban Sekretaris Organisasi Muhammadiyah desa Kelumpang:

1. Mengurus administrasi organisasi;
2. Membantu ketua membuat rencana kerja, dan
3. Menghadiri pertemuan anggota Muhammadiyah.

Syarat-syarat dan faktor pendukung Bendahara:

1. Dianggap mampu mengendalikan uang organisasi;
2. Jujur

3. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya;
4. Dapat bekerja sama dengan ketua dan pengurus lainnya.

Hak dan Kewajiban Bendahara:

1. Hadir pada setiap pertemuan dan kegiatan;
2. Mengusahakan dan mengendalikan dana untuk organisasi dan
3. Melaporkan penggunaan dana bila diperlukan.

Hak dan kewajiban pimpinan Muhammadiyah Cabang Kelumpang dan termasuk pedoman kerja pimpinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pimpinan menjalankan tindakan dan kebijaksanaan serta tanggung jawab bersama atas dasar musyawarah;
2. Pimpinan organisasi perlu membagi tugas masing-masing terutama yang menyangkut tanggung jawab anggota-anggota pimpinan;
3. Pimpinan harus mempunyai sekretariat yang tetap, serta harus memiliki peralatan organisasi, sebagai pusat kegiatan organisasi;
4. Pimpinan berhubungan langsung ke atas dan ke bawah dengan memperhatikan ketertiban hubungan dan urutan hirarki pimpinan, serta bertanggung jawab penuh sampai habis masa jabatan. (Perlu diketahui bahwa dalam organisasi Muhammadiyah tidak ada masa jabatan dimisioner).

Atribut/Symbol Kepemimpinan Pemimpin Muhammadiyah Cabang Kelumpang : Gelar pimpinan dan tanda-tanda kekuasaan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Kelumpang tidak ada. Simbul pimpinan juga tidak ada. Yang ada adalah lambang atau simbul dari organisasi tersebut. Lambang atau simbul organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang dengan kelengkapan organisasi Muhammadiyah yang ada, yaitu organisasi otonom yang dibawah kekuasaannya

Lambang-lambang tersebut meliputi:

1. Lambang Muhammadiyah;
2. Lambang Aisyiyah;
3. Lambang Nasyiatul Aisyiyah;
4. Lambang Pemuda Muhammadiyah;
5. Lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah; dan
6. Lambang Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah.

Lambang Muhammadiyah

Lambang Muhammadiyah berupa **Matahari** yang bersinar putih bersih lagi cemerlang, dengan sinar-sinarinya sebanyak dua belas, yang memancar ke segenap penjuru. Di tengah-tengah matahari tertulis kata Muhammadiyah dengan huruf Arab. Pada sinar matahari melingkar dua kalimat shahadat dalam huruf Arab. Keseluruhan lambang ini terletak di atas dasar warna hijau yang segar, yang melambangkan kesuburan dan penuh kedamaian.

Arti dan maksud lambang adalah :

Matahari itu termasuk salah satu ciptaan Allah yang sinarnya sa-

ngat berguna bagi semua makhluk. Organisasi Muhammadiyah menggambarkan gerak dan manfaat seperti matahari, yaitu Muhammadiyah harus mampu memberikan cahaya keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Keyakinan ini adalah keyakinan pokok Islam, jadi Muhammadiyah menyeru ummat manusia agar dengan sadar bersedia memeluk Agama Islam. Sinar matahari berjumlah dua belas adalah pencerminan warga Muhammadiyah sebagai orang yang bertugas mengantarkan sinar iman.

Lambang Aisyiyah

Lambang Aisyiyah adalah sama dengan lambang Muhammadiyah dengan kekecualian adalah tulisan Muhammadiyah diganti dengan tulisan Aisyiyah, yaitu terletak di tengah-tengah matahari yang memakai huruf Arab. Maksud dan tujuan lambang sama dengan Muhammadiyah. Pengertian Aisyiyah adalah diambil dari nama salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, yang ditambahkan yah (nisbiyah). yaitu sebagai mengikut Aisyah. Menamakan wanita Muhammadiyah dengan nama Aisyiyah ini dengan maksud agar kaum ibu dalam Muhammadiyah ikut berjuang bersama-sama dalam menyampaikan ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat, serta dapat meneladani hidup dan perjuangannya ibu kaum muslimin, yaitu Siti Aisyah R.A.

Lambang Nasyyatul Aisyiyah

Lambang Nasyyatul Aisyiyah adalah seuntai padi yang berisi dua belas butir, bertangkai empat helai daun hijau serta ditegakkan di atas pita yang bersemboyan Al-birru manittaqa.

Arti lambang adalah sebagai berikut

Makna padi (1) semakin berisi semakin menunduk, serta jauh dari sifat-sifat sombong dan takabur, (2) padi juga melambangkan kesuburan dan kemakmuran.

Dua belas butir padi mengandung maksud dan gambaran terhadap dua belas sahabat Nabi Isa yang terkenal ikrarnya dalam menolong agama Allah. Nasyyatul Aisyiyah diharapkan mampu berbuat seperti itu.

Empat daun sepasang keatas dan sepasang ke bawah melambangkan pepatah "sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah diganti". Artinya bahwa Nasyyatul Aisyiyah siap menjadi pewaris dari perjuangan yang telah dilaksanakan para orang tuanya, yakni memperjuangkan kebenaran Agama Islam. Semboyan ayat dari Surat Albaqarah yang berarti bahwa kebajikan dan keutamaan yang sebenar-benarnya itu adalah ketakwaan seseorang.

Lambang Pemuda Muhammadiyah.

Pemuda Muhammadiyah mempunyai lambang setangkai kuncup melati dengan dua daun di atas pita bersemboyan Pastabiqul khairut.

Warna putih pada kuncup melati melambangkan ketulusan dan keikhlasan. Hijau adalah melambangkan kedamaian dan kesuburan, kesabaran, dan kesegaran. Bunga melati adalah lambang kecintaan dan keharuman Bunga melati mencerminkan kepribadian Pemuda Muhammadiyah yang khas Indonesia. Sebab bunga melati khas Indonesia. Tangkai bunga melambangkan ketauhidan. Enam kelopak bunga bermakna rukun iman. Lima daun bunga bermakna rukun Islam. Dua buah daun melambangkan syahadain.

Pita berarti kegembiraan. Sedangkan Fastabiqul khairut berarti berlombalah dalam mengamalkan kebajikan dan keutamaan.

Mengenai penjelasan lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan penjelasan lambang Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah akan diuraikan dalam Bab VII, yaitu Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Pendidikan.

Cara Pengangkatan dan Upacara.

Pada bagian ini tidak ada lagi yang perlu ditambahkan karena susunan kepengurusan di atas hanyalah untuk memenuhi formalitas. Dalam prakteknya majelis-majelis yang ada, biro-biro yang ada serta anak-anak organisasi yang dikatakan bersifat otonom secara rutin tidak mempunyai hak atau kewajiban. Mereka hanya menunggu komando dari Ketua Muhammadiyah. Tugas ini sifatnya tidak tetap melainkan bersifat tiba-tiba. Walaupun organisasi ini ada susunan pengurusnya tetapi dalam hal melaksanakan tugas selalu dikerjakan bersama-sama, tidak diserahkan kepada orang yang mengetuai majlis atau biro serta organisasi itu. Oleh sebab itu, tidak dapat disebutkan secara pasti hak dan kewajiban majlis-majlis, biro-biro dan anak-anak organisasi Muhammadiyah itu.

Mengenai syarat dan faktor pendukung tidak berbeda dengan syarat dan faktor pendukung pemegang pimpinan, sekretaris, dan bendahara Muhammadiyah.

Syarikat Islam.

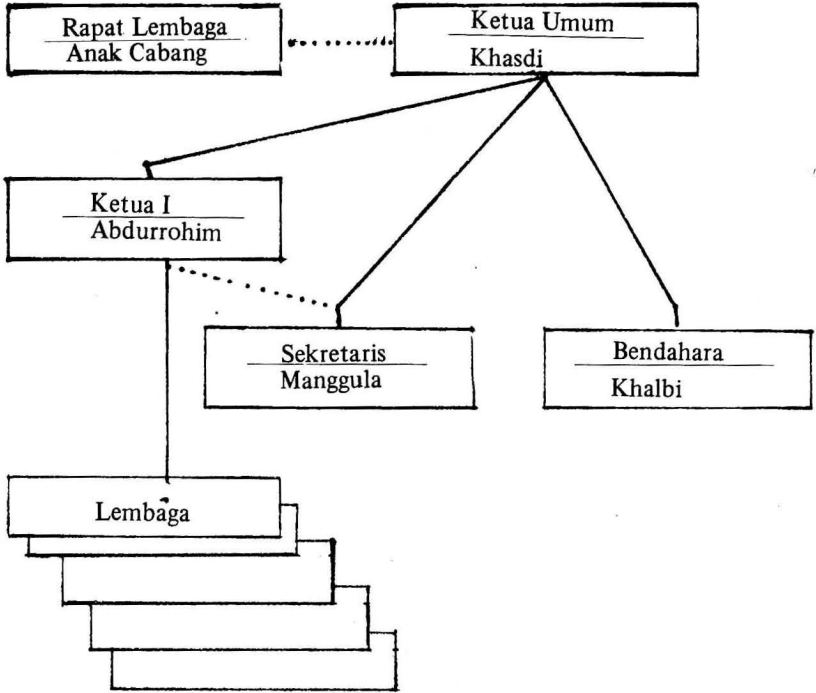
Organisasi ini bernama Syarikat Islam disingkat dengan SI adalah kelanjutan dari Syarikat Islam yang diaktekan pada tanggal 10 September 1912 sebagai penyempurnaan dari Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905. Oleh kongres sentral tahun 1923, Syarikat Islam ditingkatkan menjadi Partai Politik yang selanjutnya dikenal dengan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Pada tanggal 5 Januari 1973 PSII difungsikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pelaksanaan penyederhanaan Partai-partai Politik yang telah ditetapkan dengan TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966, maka pada tanggal 25 Januari 1973 PSII kembali menjadi Syarikat Islam.

Di Kelumpang organisasi ini adalah Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang, yang membawahi ranting-ranting, yaitu Ranting Gunungtiga, dan Ranting Belandang. Organisasi Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang yang berkedudukan di Baturaja. Sebagai sentral organisasi, yaitu Dewan Pusat berkedudukan di Jakarta.

Organisasi Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang didirikan oleh Sirod pada tahun 1957. Pada waktu itu organisasi ini berstatus partai politik, yaitu PSII. Sedangkan SK pendirian tidak dapat diterangkan, karena informasinya tidak lengkap.

Kepengurusan Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang ini telah beberapa kali mengadakan penggantian pengurus, mengingat perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh organisasi. Dan juga mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kepengurusan Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang pada saat ini dapat diketahui sebagai berikut.

Susunan Kepengurusan Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang.



Kepengurusan organisasi ini sampai penelitian ini dilakukan kepengurusan lembaga masih belum dilengkapi. Hal ini disebabkan pembaharuan organisasi yang sedang dilakukan. Oleh sebab itu dalam susunan kepengurusan yang dikemukakan di atas belum dapat dilengkapi dengan pengurus lembaga.

Keanggotaan Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang.

Keanggotaan organisasi Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang juga belum dapat dipastikan jumlah anggotanya mengingat sedang dilakukannya pembaharuan organisasi, dan sampai penelitian ini dilakukan pembaharuan organisasi tersebut masih dilakukan.

Permintaan menjadi anggota Syarikat Islam seperti yang dimaksud dalam Bab V pasal 7 Anggaran Dasar, diatur sebagai berikut.

1. Untuk menjadi anggota disampaikan secara tertulis kepada pimpinan ranting SI ditempatnya.
2. Mengisi dan menanda tangani formolir pendaftaran anggota dan membayar uang pangkal menurut ketentuan organisasi.
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, maka oleh pimpinan ranting SI diberikan status calon anggota dan diberi kartu calon anggota yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang dengan tembusan laporan tersebut kepada Pimpinan Anak Cabang.

4. Calon anggota yang diterima menjadi anggota penuh oleh pimpinan cabang dilaporkan kepada Lajnah Tanfidziah Syarikat Islam untuk mendapat nomor induk dengan memberikan tembusan laporan tersebut kepada Pimpinan Wilayah dan Dewan Wilayah yang membawahinya.
5. Anggota yang telah mendapat nomor induk, kartu anggota yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Lajnah Tanfidziah dan Pimpinan Cabang segera dilantik dan dibai'at.

Hak dan kewajiban anggota Syarikat Islam adalah sebagai berikut.

1. Mempertinggi kesadaran diri dengan memperdalam pengertian tentang program asas dan program tandhim organisasi sebagai pedoman dan landasan perjuangan Syarikat Islam.
2. Mentaati keputusan-keputusan organisasi yang diambil dan ditetapkan dengan sah, serta menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi berdasarkan keputusan.
3. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Syarikat Islam.
4. Menunjang usaha-usaha organisasi dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ditugaskan dan diamanatkan kepadanya.
5. Setia dan tekun mengunjungi rapat-rapat anggota dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan organisasi.
6. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh organisasi.
7. Memberikan koreksi kepada pengurus dengan cara-cara yang baik dan sehat, juga senantiasa melakukan koreksi diri (mawas diri).
8. Setiap pembayar iuran, infaq dan lain-lain kewajiban keuangan yang ditentukan organisasi.

Tempat Kegiatan Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang.

Tempat kegiatan organisasi Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang adalah di rumah Ketua Umum, yang dalam hal ini dijadikan sektriat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang mencakup berbagai segi kegiatan sosial kemasyarakatan, terutama di bidang dakwah. Kegiatan-kegiatan serupa ini ditujukan kepada anggota dan masyarakat. Dalam kegiatan sosial keagamaan lainnya sering bekerja sama dengan organisasi masa atau organisasi sosial lainnya.

Tujuan yang Hendak Dicapai Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang.

Tujuan yang hendak dicapai organisasi Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang sesuai dengan anggaran dasar Bab II pasal 3, yaitu Syarikat Islam berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia dan dinul Islam seperti yang telah dijabarkan dalam program asasnya. Dalam pasal 4 dikemukakan bahwa Syarikat Islam yakin sepenuhnya atas kebenaran nilai-nilai yang dinyatakan di dalam pro-

gram asas. Oleh karena itu, Syarikat Islam berkewajiban mencapai tujuannya dengan jalan.

1. Membangun persatuan yang kokoh, kuat di kalangan dan di antara umat Islam Indonesia hingga dapat mewujudkan suatu jemaah Islam, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persatuan bangsa Indonesia, yang cakap mengatur dirinya dengan aturan-aturan yang memenuhi perintah-perintah Allah dan rasulullah dalam segala hal ihwal kehidupan, pencaharian dan pergaulan, dan dengan jalan itu membangun dan mendi-dik bangsa Indonesia agar tetap memiliki kemampuan dan persatuan yang kokoh kuat sebagai syarat mutlak untuk dapat membela dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang merupakan sarana utama bagi umat Islam secara bebas menjalankan syariat Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Membangun persatuan bangsa Indonesia di mana bagian terbesar adalah umat Islam agar menjadi kekuatan umat Islam sedunia.
2. Membina dan menjaga keutuhan serta kesentosaan persatuan bangsa Indonesia sebagai suatu syarat mutlak dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merata dengan jalan memelihara dan menjaga hubungan baik umat Islam dengan semua golongan sebangsa dan dengan lain-lain penduduk tanah tumpah darah kita Indonesia.
Membina dan menumbuhkan saling pengertian di antara semua golongan sebangsa dan melakukan usaha bersama bagi terwujudnya dan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang merata dan yang di-redhoi oleh maha pencipta Allah SWT.

Sistim Kepemimpinan Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang.

Sistem kepemimpinan organisasi Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang sesuai dengan anggaran dasar pasal 15 adalah sebagai berikut.

1. Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam terdiri dari seorang Ketua, dan beberapa orang wakil ketua, seorang atau lebih sekretaris, seorang atau lebih bendahara dan beberapa orang anggota yang berfungsi selaku pembantu umum dari pengurus dan kesemuanya dipilih oleh rapat Anak Cabang untuk masa jabatan lima tahun terhitung mulai pada hari dan tanggal disahkan dan ditetapkan oleh pimpinan Cabang dan Dewan Cabang Syarikat Islam.
2. Pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam adalah pemegang kekuasaan eksekutif dalam kekuasaan organisasi Anak Cabang. Pimpinan Anak Cabang wajib menerima dan menjalankan segala keputusan rapat Anak Cabang. Keputusan-keputusan konperensi dan rapat-rapat Cabang Syarikat Islam dan untuk itu pimpinan Anak Cabang Syarikat Islam berhak menggunakan kekuasaan organisasi untuk mengatur dan mengerjakan segala urusan serta melakukan pula segala ikhtiar daya upaya

bagi pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut dan bertanggung jawab penuh kepada rapat Anak Cabang Syarikat Islam.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang.

1. Orang Islam.
2. Telah menjadi anggota penuh organisasi.
3. Memiliki dedikasi yang tinggi terhadap organisasi.
4. Mampu dan cakap menjalankan kewajiban.
5. Dapat menjadi teladan utama bagi anggota.
6. Dipilih oleh rapat Anak Cabang.
7. Berkelakuan baik serta bersedia membela dan mempertahankan serta mengamalkan asas dan tujuan serta program asas dan program tahdzin Syarikat Islam dengan melalui masa menjadi calon anggota.

Hak dan Kewajiban Ketua Umum Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang.

1. Membuat dan merealisasikan rencana kegiatan selama periode kepemimpinannya.
2. Menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Melaksanakan dan menjalankan setiap keputusan rapat.

Seorang Ketua Umum Syarikat Islam Anak Cabang Desa Kelumpang tidak mendapat fasilitas apa pun baik dari Pemerintah maupun dari para anggota.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Ketua Umum Si Anak Cabang Desa Kelumpang.

1. Beragama Islam.
2. Telah menjadi anggota Syarikat Islam;
3. Mau bekerja untuk organisasi;
4. Dipilih oleh rapat Syarikat Islam Anak Cabang Desa Kelumpang;
5. Diharapkan dapat menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Syarikat Islam.

Hak dan Kewajiban Ketua I SI Anak Cabang Desa Kelumpang.

1. Membantu ketua umum membuat dan merealisasikan rencana kegiatan selama periode kepemimpinannya;
2. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan;
3. Melaksanakan atau menaati setiap keputusan rapat.

Ketua I Syarikat Islam Anak Cabang Desa Kelumpang ini tidak mendapat imbalan dan fasilitas apa pun dari anggota maupun dari Pemerintah.

Syarat dan Faktor Pendukung Sekretaris dan Bendahara SI Anak Cabang Desa Kelumpang.

1. Beragama Islam;
2. Telah menjadi anggota;

3. Mau bekerja untuk organisasi;
4. Dipilih oleh rapat Syarikat Islam Anak Cabang Desa Kelumpang, dan
5. Dianggap mampu menjalankan tugasnya.

Hak dan Kewajiban Sekretaris dan Bendahara SI Anak Cabang Desa Kelumpang.

1. Membantu ketua umum merencanakan dan merealisasikan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2. Menghadiri setiap pertemuan dan kegiatan;
3. Melaksanakan atau menaati setiap keputusan rapat;
4. Melaksanakan tugas Administrasi organisasi. (Sekretaris);
5. Mengusahakan dan mengelola dana untuk organisasi (Bendahara)

Atribut/Symbol Kepemimpinan Si Anak Cabang Desa Kelumpang.

Gelar pimpinan dan tanda-tanda kekuasaan pimpinan Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang tidak ada. Yang ada adalah simbol organisasi Syarikat Islam yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Lambang kebesaran Syarikat Islam adalah "Kalimat Tauhid" dan lima buah "Kata Allah" mengelilingi "Kata Syarikat Islam" semuanya dituliskan dengan huruf Arab dan seluruhnya berbentuk bulan bintang.
2. Panji kebesaran Syarikat Islam, dasarnya berwarna hijau tua dengan lambang Syarikat Islam di tengah-tengahnya yang berwarna kuning emas.
3. Panji perjuangan atau bendera sehari-hari Syarikat Islam, dasarnya berwarna hitam dengan lambang syarikat Islam di tengah-tengahnya berwarna putih.

Pengaruh Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Sosial Desa Pengandanan dan Desa Kelumpang . Pengaruh AMPI di Desa Pengandanan cukup positif, terutama dalam bidang pengarahannya. Generasi muda dapat dengan mudah dikerahkan untuk suatu tujuan, seperti untuk gotong royong. Dengan melalui organisasi AMPI pemuda lebih mudah dihimpun dan dikumpulkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Di samping itu, generasi muda diajar berorganisasi, dengan demikian generasi muda mendapatkan pengalaman yang positif sebagai calon pemimpin bangsa. Organisasi AMPI banyak memelopori kegiatan-kegiatan generasi muda seperti dalam memperingati hari-hari bersejarah bangsa. Dan banyak lagi kegiatan lain yang serupa yang bermanfaat bagi generasi muda.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa memberikan warna tersendiri bagi pembangunan pedesaan. Melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa masyarakat dapat memprogramkan pembangunan desanya. Dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa masyarakat dapat merasakan kebersamaan dalam bermupakat dan bermusyawarah. Dengan itu, organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang terdapat di Desa Pengandanan dan di Desa Kelumpang dapat memberikan kesempatan kepada warganya untuk menjalin ketahanan desanya menjadi lebih mantap. Dan hal itu berarti usaha menuju ketahanan nasional.

Kelompok PKK Desa Pengandonan dan Kelompok PKK Desa Kelumpang berjasa sekali kepada masyarakat desanya masing-masing, terutama bagi kaum ibu dan remaja putri. Kaum ibu dan remaja putri mendapat tambahan ketrampilan. Peralatan yang tersedia dalam organisasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelajaran tambahan yang diberikan kepada kaum ibu dan remaja putri akan membantu kaum ibu merancang kehidupan, terutama dalam rumah tangganya. Diharapkan usaha seperti ini dapat mencapai sasaran Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Karang Teruna Tunas Harapan Desa Pengandonan dan Karang Teruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang banyak sekali memberikan sumbangan bagi kehidupan generasi muda di desanya masing-masing. Dengan sarana yang ada pada organisasi Karang Teruna, baik di Karang Teruna Harapan Desa Pengandonan maupun di Karang Teruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang dapat memberikan layanan kepada generasi muda dengan berbagai aktifitasnya, seperti mengisi waktu senggang dengan kegiatan olahraga dan kesenian. Di samping itu, kegiatan Karang Teruna Harapan Desa Pengandonan dan kegiatan Karang Teruna Anggrek Sakti Desa Kelumpang banyak memberikan pelajaran tambahan kepada generasi muda, seperti keterampilan praktis menjahit, menganyam, dan banyak lagi kegiatan yang melatih generasi muda berwira swasta. Kegiatan Karang Teruna yang rutin akan memberi kesempatan bagi generasi muda untuk saling mengisi, saling mengenal, bahkan mengenal lingkungannya. Sudah jelas dengan usaha-usaha seperti ini memberikan jalan keluar yang positif bagi generasi muda.

Muhammadiyah Cabang Kelumpang dengan segala perangkat organisasinya yang mencakup segala bidang kegiatan sangat menentukan corak kehidupan pedesaan. Masyarakat Desa Kelumpang mengenal kegiatan Muhammadiyah seperti santunan terhadap fakir miskin melalui program PKU. Memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui program Pendidikan dan Pengajaran. Sera banyak lagi sarana fisik yang dapat disumbangkan kepada masyarakat. Di bidang mentak sepiritual pun tidak kalah pentingnya. Penerangan agama dilakukan terus menerus tanpa kenal lelah. Tidak ada kegiatan kerohanian rutin yang terlupakan. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, organisasi Muhammadiyah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Kelumpang dan sekitarnya.

Organisasi Syarikat Islam Anak Cabang Kelumpang juga sama halnya dengan organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang. Organisasi Syarikat Islam juga aktif dalam kegiatan sosial, agama, dan kemasyarakatan.



BAB V POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG EKONOMI.

Uraian pada Bab V ini memang tidak dapat memenuhi permintaan TOR karena memang tidak ada satu pun organisasi yang bergerak di bidang ekonomi di kedua desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Koperasi Unit Desa (KUD) belum ada, lumbung desa tidak ada. Bahkan, pasar sebagai pusat kegiatan perekonomian pun tidak atau belum ada. Yang ada hanyalah kedai-kedai kecil. Oleh sebab itu, sekali lagi dikemukakan bahwa uraian terpaksa menyimpang dari TOR.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang dijadikan sampel penelitian ini, yaitu Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang mempunyai perkembangan pola dan sistem kepemimpinan di bidang ekonomi yang sama. Oleh karena itu, untuk membuat uraian pada Bab lima ini tidak dualisme, tidak tumpang tindih, tidak terjadi pengulangan uraian dengan pola yang sama dari masing-masing desa, maka uraian tentang pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang ekonomi di paparkan sekaligus baik yang terdapat di Desa Pengandonan maupun yang terdapat di Desa Kelumpang.

Pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang ekonomi masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang tidak banyak yang dapat diungkapkan. Aspek perekonomian pedesaan sangat dilatarbelakangi oleh adat istiadat yang bersumber pada Kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Kitab ini banyak mengatur tata cara kehidupan masyarakat.

Sumber kehidupan masyarakat yang paling utama adalah pertanian. Dan tata cara pertanian ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Sifat kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat juga otomatis mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang ini, karena masyarakat saling membantu, saling menunjang dalam kehidupan mereka. Sifat kerja sama dan gotong royong dalam keluarga ternyata mampu menyelesaikan setiap kegiatan perekonomian, sehingga masalah perekonomian modern tidak mampu mengikat sistem perekonomian masyarakat.

Di Desa Pengandonan dan di Desa Kelumpang secara resmi tidak terdapat sebuah organisasi perekonomian. KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai satu-satunya bentuk organisasi ekonomi yang ada di Kecamatan Pengandonan memang ada sebagai milik Kecamatan dan berkedudukan di Semanding.

Taraf kehidupan masyarakat hampir merata. Setiap keluarga hampir tidak menggantungkan masalah perekonomian mereka kepada orang lain. Sumber perekonomian masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian mereka sendiri. Kebutuhan masyarakat tidak begitu banyak, yang penting bagi masyarakat adalah terpenuhi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan sandang pangan. Dari kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat ternyata kebutuhan pangan mampu mereka penuhi sendiri.

Dari uraian di atas diketahui bahwa pola perekonomian masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang adalah pola perekonomian tradisional, yaitu tidak tercermin dalam bentuk organisasi atau suatu ikat-

an apapun. Tentu saja hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan ekonomi di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang tidak dapat dikemukakan dengan tepat. Sistem perekonomian modren tidak mampu mengikat asistem perekonomian masyarakat. Pertumbuhan perekonomian masyarakat sangat individual, maksudnya bahwa setiap individu memiliki perkembangan ekonomi masing-masing tanpa terikat dengan pola ekonomi tertentu, atau ekonomi orang lain. Namun, tidak berarti bahwa seseorang melepaskan diri dari pola perekonomian orang lain. Keperluan keluarga besar, keluarga dekat, keperluan masyarakat masih ada segi tertentu yang menyangkut ekonomi yang merupakan tanggungjawabnya, seperti dalam kebersamaan menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan kepentingan adat istiadat, yang sudah tertanam sejak lama, yaitu ber-sumber pada Kitab Undang-undang Simbur Cahaya.



BAB VI POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG AGAMA

Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Agama Desa Pengandonan: Pola kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Agama Desa Pengandonan diuraikan dengan urutan sebagai berikut.

1. P3NTPCR;
2. Organisasi Pengajian Desa Pengandonan;
3. Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah.

Yang dimaksud dengan pola kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang agama ini adalah segala bentuk kepemimpinan yang ada dalam masyarakat pedesaan yang menyangkut agama baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Yang dimaksud dengan pola kepemimpinan resmi adalah organisasi yang langsung dibentuk dan ditangani oleh Pemerintah. Sedangkan pola kepemimpinan tidak resmi adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat setempat.

Pada Bab enam ini diuraikan kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang agama di Desa Pengandonan yang mencakup P3NTPCR, Organisasi Pengajian Desa Pengandonan, dan Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah. Sedangkan kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang agama Desa Kelumpang, yaitu P3NTPCR.

P3NTPCR : P3NTPCR merupakan singkatan dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sesuai dengan namanya badan ini mengelola masalah perkawinan, perceraian, dan rujuk atau kembali menikah bagi pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Lembaga ini sebenarnya di bawah KUA (Kantor Urusan Agama). Mengenai Kantor Urusan Agama itu sendiri tidak diuraikan dalam tulisan ini, walaupun walaupun termasuk lembaga yang mengelola bidang keagamaan. karena KUA merupakan lembaga yang ada di Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Pengandonan.

Sebagai suatu organisasi, P3NTPCR di desa ini tidak dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi yang baik karena hanya terdiri dari Ketua saja. Dengan demikian, tugas sekretaris dan tugas bendahara juga dirangkap oleh Ketua. Yang menjadi Ketua P3NTPCR Desa Pengandonan ini adalah M. Yusuf. Selain sebagai Ketua P3NTPCR, M. Yusuf juga menjabat jabatan Khatib.

Kegiatan yang dilakukan oleh P3NTPCR Desa Pengandonan ini dilakukan di rumah Ketua P3NTPCR-nya. Selain dari itu, juga dilakukan di rumah masyarakat yang memerlukan bantuannya, yaitu terutama sekali pada waktu kegiatan pernikahan. Walaupun demikian, secara formal pencatatan pernikahan, talak, perceraian, dan rujuk ini dipusatkan di KUA Kecamatan karena sebahagian besar yang ada hubungannya dengan masalah administrasi P3NTPCR itu diurus oleh KUA.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa P3NTPCR ini kegiatannya berupa pencatatan pernikahan, talak, cerai, dan rujuk. Tetapi apabila dikaji lebih dalam lagi kegiatan atau tugas P3NTPCR tidaklah sesederhana itu. P3NTPCR juga melaksanakan kegiatan nasehat perkawinan baik kepada

pasangan suami istri yang baru menikah maupun kepada pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetapi menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Selain itu, juga melaksanakan penyuluhan tentang Undang-Undang Perkawinan.

Seorang petugas P3NTR di Desa Pengandonan ini harus memenuhi syarat-syarat dan faktor pendukung tertentu untuk menjabat sebagai Ketua P3NTR. Syarat-syarat dan faktor pendukung itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan minimal Madrasah Aliyah (sederajat dengan SMTA.);
2. Memiliki pengetahuan yang banyak dalam bidang agama Islam, terutama hal-hal yang menyangkut munakahat atau perkawinan;
3. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Arab;
4. Berwibawa dan jujur;
5. Taat menjalankan ajaran Agama Islam.

Seseorang petugas P3NTR di Desa Pengandonan mempunyai hak dan kewajiban, antara lain.

1. Mendapat imbalan jasa dari pemerintah berupa uang, yaitu minimal 10% dari jumlah penyeteroran yang diterimanya sebagai petugas P3NTR;
2. Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang mengadakan masalah, kemelut rumah tangga mereka yang sedang dihadapi;
3. Memberikan penyuluhan mengenai undang-undang perkawinan;
4. Menerima atau menolak permintaan masyarakat yang akan menyelenggarakan NTR berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan;
5. Bila butir dua tidak dapat diselesaikan oleh petugas P3NTR, maka petugas P3NTR berhak meneruskan masalah itu kepada yang berwenang untuk menyelesaikannya, seperti Kantor Pengadilan Agama setempat;
6. Memberikan nasehat kepada pasangan suami istri yang baru saja dinikahkannya.

Seorang petugas P3NTR di Desa Pengandonan ini tidak mempunyai simbol/atribut, tidak mempunyai gelar dan juga tidak mempunyai tanda kekuasaan untuk menandakan bahwa ia sebagai petugas P3NTR.

Pengangkatan seorang petugas P3NTR di Desa Pengandonan ini di SK-kan oleh Kepala Kantor Departemen Agama, Kabupaten Ogan dan Komering Ulu dan dilantik oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pengandonan.

Organisasi Pengajian Desa Pengandonan: Organisasi Pengajian Desa Pengandonan didirikan pada tahun 1935 oleh seorang pemuka agama Islam yang cukup gigih dalam memperjuangkan syiar agama Islam, yaitu H. Imron. Pendirian organisasi ini dilatarbelakangi kekhawatiran pendirinya terhadap akan merosotnya keimanan masyarakat desa terhadap ajaran-ajaran agama dan didorong oleh kewajiban terhadap agama. Organisasi pengajian ini jika dilihat dari sistem kepengurusannya belum dapat dikatakan organisasi yang

baik tetapi sejak berdiri sampai sekarang organisasi Pengajian Desa Pengandonan ini tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diharapkan. Organisasi ini diketuai oleh pendirinya sendiri, yaitu H. Imron. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa organisasi ini belum dapat dikatakan sebagai organisasi yang baik, organisasi ini tidak mempunyai wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk desa, yaitu 587 orang, jumlah anggota pengajian ini amat sedikit. Anggota pengajian ini berjumlah 70 orang dengan perincian 27 orang anggota pria dan 43 orang anggota kaum ibu. Kegiatan organisasi Pengajian Desa Pengandonan ini dipusatkan di rumah H. Imron. Hal ini dilakukan karena H. Imron merupakan orang yang amat disegani. Keseganan masyarakat ini disebabkan oleh H. Imron merupakan tokoh agama yang amat menonjok dan loyalitasnya di bidang agama amat mengagumkan. Pendidikan agamanya tidak saja diperolehnya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, yaitu dari Madrasah Sulthiah di Mekah.. Selain itu, H. Imron juga pernah mengenyam pendidikan Belanda, yaitu sekolah Gouvernement di Palembang. Semasa mudanya H. Imron pernah menjadi Kepala Urusan Agama (KUA) dan memiliki sebuah pesantren. Selain dari faktor-faktor di atas H. Imron juga dianggap tetua desa sehingga orang merasa perlu datang ke rumah beliau untuk berguru dan bertanya terutama dalam bidang agama.

Organisasi Pengajian Desa Pengandonan ini kegiatannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. belajar bahasa Arab (Nahu Shorof);
2. ceramah agama,
3. kesenian Arab (Qasidah), dan
4. mengaji Al-Qur'an.

Dari kegiatan-kegiatan di atas tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendidik para warga desa terutama sekali di bidang agama.
2. Untuk melepaskan kewajiban terhadap warga desa karena di dalam agama Islam seorang yang berilmu berkewajiban menyebarkan ilmunya itu kepada orang lain yang ada disekitarnya. Apabila ia tidak menyebarkan ilmunya kepada orang lain maka ia berdosa kepada Tuhan.
3. Untuk tetap meneruskan dan melestarikan ajaran-ajaran agama Islam di Desa Pengandonan.

Seorang pemimpin organisasi Pengajian di Desa Pengandonan ini harus memenuhi syarat-syarat dan faktor pendukung seperti :

1. Memiliki ilmu pengetahuan keagamaan yang amat luas;
2. Loyalitasnya terhadap kemajuan agama amat dalam;
3. Berwibawa, jujur;
4. Menjalankan ajaran agama sebagaimana mestinya;
5. Mau bekerja dan berjuang untuk melestarikan ajaran agama Islam.

Seorang ketua organisasi Pengajian di Desa Pengandonan ini berkewajiban antara lain sebagai berikut:

1. Mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada para muridnya

- atau anggotanya.
2. Menyediakan waktu untuk mengajarkan ilmunya itu kepada para murid atau anggotanya.

Seorang pemimpin organisasi Pengajian di Desa Pengandonan ini (H. Imron) tidak mempunyai hak apa-apa kecuali mengajak para anggotanya melakukan ajarannya karena organisasi ini didirikan semata-mata karena Allah. Pemimpin atau ketua tidak menerima upah tertentu dari anggotanya melainkan pemberian yang bersifat suka rela. Pada upacara-upacara, baik upacara resmi maupun upacara adat dan keagamaan, pemimpin organisasi keagamaan ini diberi kehormatan untuk membacakan doa dan di dalam kehidupan sehari-hari ia amat dihormati.

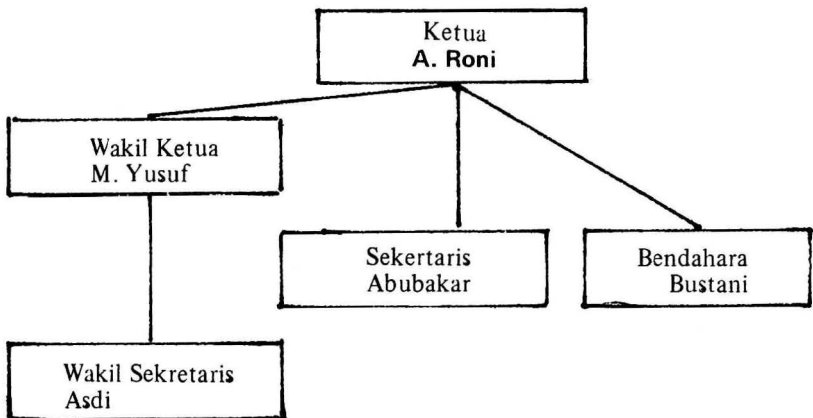
Sebagaimana halnya para pemuka agama Islam lainnya di daerah-daerah lain di wilayah Indonesia, pemimpin organisasi pengajian di Desa Pengandonan ini pun tidak mempunyai atribut-atribut atau simbol-simbol kepemimpinannya. Hanya saja apabila pemimpin organisasi pengajian itu telah menunaikan ibadah haji biasanya pada waktu melaksanakan tugasnya ia mengenakan kopiah tradisi bangsa Arab, yaitu **kopiah berwarna putih**. Selain itu, juga mengenakan baju tradisi bangsa Arab yang biasa disebut jubah dan dilengkapi dengan **sal dan sorban**. Ini bukan berarti bahwa setiap orang yang mengenakan pakaian tradisi bangsa Arab itu semuanya pemimpin organisasi pengajian, karena umumnya orang-orang Islam yang telah menunaikan ibadah haji terutama di desa-desa, sering mengenakan pakaian tradisi bangsa Arab itu.

H. Imron pemimpin pengajian di Desa Pengandonan ini karena kebetulan telah menunaikan ibadah haji. Maka ia mengenakan pakaian tradisional bangsa Arab itu, terutama sekali pada waktu menjalankan tugasnya, misalnya pada waktu mengajar mengaji dan memberikan ceramah keagamaan serta menghadiri undangan. Dengan demikian, seorang pemimpin organisasi pengajian di Desa Pengandonan ini tidak mempunyai atribut atau simbol kepemimpinan tersendiri yang khas. Rumahnya pun tidak ada keistimewaan yang menandakan bahwa ia sebagai pemimpin pengajian di desanya. Hal ini dilatarbelakangi oleh ajaran agama Islam yang tidak mengenal perbedaan tingkat sosial masyarakat.

H. Imron, yang merupakan pemimpin organisasi pengajian di Desa Pengandonan ini biasa digelar dengan istilah keagamaan yang lazim di Indonesia, yaitu **Kiayi**. Di samping itu, karena ia telah menunaikan ibadah haji, ia juga bergelar **Haji**. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sehari-hari ia sering disapa dengan sapaan **Pak Kiayi atau Pak Haji**.

Pemimpin organisasi pengajian di Desa Pengandonan ini tidak diangkat secara resmi oleh pemerintah karena proses kepemimpinannya berjalan seiring dengan kegiatan keagamaan yang telah dilakukannya. Dengan demikian status kepemimpinannya secara resmi diberikan oleh masyarakat terutama sekali oleh para muridnya. Pengakuan kepemimpinannya ini tidak diberikan secara resmi dalam suatu upacara.

Organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah: Organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah Pengandonan didirikan pada tahun 1982 yang didorong oleh keinginan masyarakat di desa ini. Susunan kepengurusannya ini adalah sebagai berikut:



Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah ini beranggotakan 25 orang remaja putra dan remaja putri Desa Pengandonan. Latar belakang pendirian organisasi ini selain dari keinginan para remaja di Desa Pengandonan ini juga didorong oleh keinginan melibatkan keikutsertaan para remaja di bidang dalam memelihara mesjid dan mencintai sekaligus memanfaatkan mesjid bukan saja sebagai tempat beribadah tetapi juga sebagai tempat pembinaan kader-kader agama menambah ilmu pengetahuan terutama sekali dalam bidang agama Islam. Karena Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah ini baru berdiri lebih kurang satu tahun didirikan dan tidak mempunyai donatur tetap sampai saat ini organisasi ini belum memiliki perpustakaan. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan yang diperoleh diberikan oleh para sumber agama di desa itu, yaitu H. Imron.

Sesuai dengan namanya, yaitu Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah, maka kegiatan organisasi ini diselenggarakan di mesjid Al-Munawarah Pengandonan. Kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah Pengandonan antara lain sebagai berikut.

1. memelihara kebersihan;
2. belajar membaca Al-Qur'an;
3. belajar melakukan sholat;
4. mendengarkan ceramah;
5. diskusi masalah agama;
6. kegiatan olah raga dan seni.

Tujuan didirikannya organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah adalah untuk menjadikan mesjid bukan saja sebagai tempat beribadat tetapi juga sebagai tempat menambah ilmu pengetahuan dan membimbing para remaja agar dapat bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sistem Kepemimpinan dan Syarat-Syarat dan Faktor Pendukung:

Seorang pemimpin organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah di Desa Pengandonan ini harus memenuhi syarat-syarat dan faktor pendukung antara lain sebagai berikut.

1. Mempunyai wibawa,
2. Mempunyai sifat mau berkorban,
3. Berpengalaman dalam membina remaja, terutama di ling-

- kungan keluarganya sendiri, dan
4. Taat dalam menjalankan perintah agama.

Syarat dan Faktor Pendukung Wakil Ketua Ikatan Remaja Masjid Al- Munawarah Desa Pengandonan :

1. Anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah Desa Pengandonan,
2. Mau bekerja untuk organisasi,
3. Dianggap mampu melaksanakan tugasnya,
4. Mewakili ketua sekali-sekali dan
5. Disenangi oleh anggota lainnya.

Hak dan Kewajiban Wakil Ketua Remaja Masjid Al-Munawarah Desa Pengandonan :

1. Membantu ketua mengatur organisasi,
2. Membantu ketua membuat program kerja organisasi, dan
3. Mengadakan kerja sama yang baik dengan ketua dan pengurus lainnya.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Sekretaris Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah Desa Pengandonan :

1. Anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah Desa Pengandonan,
2. Mau bekerja untuk organisasi,
3. Sedikit-sedikit mengetahui masalah administrasi, dan
4. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya.

Hak dan Kewajiban Sekretaris Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah Desa Pengandonan:

1. Menghadiri setiap kegiatan dan pertemuan,
2. Mempersiapkan dan mengelola administrasi dan
3. Mengadakan kerja sama yang baik dengan ketua, pengurus lainnya dan semua anggota.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Wakil Sekretaris:

1. Anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah Desa Pengandonan,
2. Mau bekerja untuk organisasi,
3. Sedikit-sedikit mengetahui masalah administrasi, dan
4. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Bendahara Ikatan Remaja Masjid Al- Munawarah Desa Pengandonan :

1. Anggota Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah desa Pengandonan,
2. Jujur dan
3. Disenangi oleh ketua dan anggota lainnya.

Hak dan Kewajiban Bendahara Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah Desa Pengandonan :

1. Menghadiri setiap kegiatan dan pertemuan,
2. Mencari dan mengolah dana untuk organisasi, dan
3. Mengadakan kerjasama yang baik dengan ketua, semua anggota.

Seorang pemimpin organisasi Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah di Desa Pengandonan ini mempunyai hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut.

1. Mengatur organisasi,
2. Membuat program kerja organisasi, dan
3. Menciptakan keharmonisan semua anggota organisasi dan masyarakat.

Pemimpin organisasi Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah di Desa Pengandonan ini tidak mempunyai simbol/atribut, tidak mempunyai gelar dan juga tidak mempunyai tanda kekuasaan untuk menandakan bahwa ia sebagai pemimpin organisasi Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah di Desa Pengandonan ini.

Pengangkatan A. Roni sebagai pemimpin organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Munawarah ini tidak melalui pemilihan secara resmi tetapi diangkat berdasarkan pengakuan masyarakat di desa ini.

Pengaruh Pola Kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan di Bidang Agama Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang.

P3NTCR adalah suatu lembaga yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk. Di samping itu, P3NTCR erat hubungannya dengan kepentingan agama, karena masalah nikah, talak, cerai, dan rujuk bukan saja mengatur pola kehidupan manusia dengan manusia, tetapi juga pola kehidupan manusia yang beragama. Jadi, kepentingan nikah, talak, cerai dan rujuk bukan saja kepentingan manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan agama, yaitu kepentingan mengatur tata kehidupan manusia menurut hukum agama, yaitu agama Islam. Tidak dapat diingkari bahwa bagi masyarakat Desa Pengandonan dan masyarakat Desa Kelumpang P3NTCR sangat dibutuhkan kehadirannya. Kadang-kadang masyarakat pedesaan yang awam yang kurang memahami tentang hukum agama menyerahkan segala urusan mereka yang ada hubungannya dengan nikah, talak, cerai, dan rujuk ini sepenuhnya kepada petugas P3NTCR.

Berdasarkan kenyataan ini, P3NTCR adalah sebagai salah satu unsur kebutuhan masyarakat, dan juga sekaligus sebagai bagian yang sangat penting dalam masyarakat Desa Pengandonan dan masyarakat Desa Kelumpang.

Kenyataan lain bahwa petugas P3NTCR oleh masyarakat juga dibebani tugas lain yang semestinya bukan tugas mereka. Masyarakat pedesaan seperti masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang tidak dapat membedakan tugas P3NTCR dengan tugas keagamaan lainnya. Seperti sering kita lihat petugas P3NTCR di pedesaan juga dibebani sebagai pengurus masjid, pengurus pengajian, ceramah agama, pengurus kematian, dan banyak lagi fungsi lain yang berhubungan dengan keagamaan.

Di Desa Pengandonan terdapat sebuah organisasi pengajian. Hal ini merupakan wadah yang paling tepat bagi masyarakat untuk mendalami ajaran agama, terutama dalam membaca Al-Qur'an.

Bagi orang dewasa dapat mengkaji ajaran agama lebih mendalam sehingga akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Sedangkan bagi anak-anak hal ini merupakan suatu permulaan untuk mengenal ajaran agama.

Kepentingan manusia berupa kebutuhan rohani tidak dapat dielakkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kemajuan fisik harus diimbangi pula dengan pengisian mental spiritual dengan ajaran agama. Pengajian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan mental spiritual tersebut.

Untuk Desa Kelumpang pengajian-pengajian seperti ini langsung dikelola oleh organisasi massa, atau organisasi sosial seperti Muhammadiyah dan Syarikat Islam.

Usaha pemerintah untuk menanggulangi kerisis moral patut kita hargai, terutama usaha pembinaan generasi muda. Bagi generasi muda Islam banyak wadah organisasi yang dapat dimanfaatkannya untuk mendalami ajaran agama Islam, baik pengkajian ajaran langsung atau dengan jalan pengkajian secara bertahap melalui kegiatan-kegiatan umum yang disesuaikan dengan kepentingan ajaran agama Islam.

Salah satu wadah tersebut bagi generasi muda Islam di Desa Pengandonan adalah Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah. Organisasi ini belum dapat memberikan peranannya yang maksimal. Tetapi, kehadirannya di tengah-tengah masyarakat di Desa Pengandonan sudah cukup berarti. Dengan terbentuknya organisasi ini di Desa Pengandonan berarti hal itu adalah suatu permuaan yang positif.

POLA KEPEMIMPINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Pendidikan Desa Pengandonan: Yang dimaksud dengan pola kepemimpinan dalam masyarakat di bidang pendidikan adalah segala bentuk kepemimpinan yang ada dalam masyarakat yang menyangkut segi pendidikan, baik yang bersifat pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.

Pada bab tujuh ini diuraikan kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pendidikan Desa Pengandonan yang mencakup, SD Negeri, SMP Negeri, SMP PGRI, BP3, dan Pramuka. Sedangkan kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pendidikan Desa Kelumpang adalah madrasah Muhammadiyah, Cabang Kelumpang.

Kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pendidikan Desa Pengandonan diuraikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri,
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri,
3. Sekolah Menengah Pertama PGRI.
4. Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, dan
5. Pramuka.

Sekolah Dasar Negeri: Sekolah Dasar di Desa Pengandonan ini pada mulanya didirikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1914. Pada zaman Pemerintahan Belanda itu nama sekolah ini adalah Holandche in dische School. Sebagaimana sekolah-sekolah sekarang yang ada di tempat lain, di Indonesia sekolah tersebut di atas namanya diganti dengan nama Sekolah Dasar Negeri.

Sekolah dasar yang ada di Desa Pengandonan ini hanya satu buah. Sedangkan sekolah lainnya, misalnya sekolah swasta tidak ada di Desa Pengandonan ini.

Sekolah Dasar Negeri di Desa Pengandonan ini memiliki sebuah kantor guru dan dua buah gedung dengan enam ruangan tempat siswa belajar.

Susunan Organisasi : Sekolah Dasar Negeri Pengandonan dikepalai oleh seorang kepala sekolah. Kepala Sekolah ini dibantu oleh seorang wakil Kepala Sekolah dan 12 orang guru. Guru-guru ini mengajar atau mendidik murid-murid sebanyak 283 orang..

Tempat dan Kegiatan : Kegiatan belajar-mengajar SD Negeri Pengandonan ini dipusatkan di gedung SD Negeri Pengandonan yang terletak diibukota Kecamatan Pengandonan. Adapun kegiatannya adalah:

1. Kegiatan belajar- mengajar yang bersifat intra kurikuler.
2. Kegiatan belajar-mengajar yang bersifat ekstra kurikuler.

Sekolah Dasar Negeri di Desa Pengandonan didirikan bukan hanya untuk menampung anak usia sekolah di Desa Pengandonan saja tetapi juga memberikan kesempatan kepada anak usia sekolah di desa lain yang berdekatan dengan desa itu, misalnya Desa Semanding dan Desa Tanjung Ketiga desa itu bukan saja berdekatan tetapi merupakan tiga desa yang tidak ada pemisahannya. Hal ini dimungkinkan karena anak usia sekolah da-

sar pada ketiga desa itu masih dapat ditampung di sekolah tersebut.

Tujuan didirikannya sekolah dasar ini adalah untuk menampung anak-anak usia sekolah di Desa Pengandonan dan Desa yang berdekatan dengan desa tersebut. Melalui lembaga pendidikan formal ini diharapkan dapat memberikan situasi belajar kepada anak-anak usia sekolah dan dapat mengembangkan bakatnya masing-masing.

Seorang Kepala sekolah dasar di Desa Pengandonan ini harus memenuhi syarat-syarat dan faktor pendukung tertentu untuk menjabat sebagai kepala sekolah. **Syarat-syarat dan faktor pendukung itu adalah sebagai berikut**

1. Tidak terlibat dalam organisasi yang terlarang atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Memiliki ijazah Sekolah Pendidikan Guru atau kursus Pendidikan Guru yang sah,
3. Berkonduite baik berdasarkan penilaian atasannya,
4. Golongan dan kepangkatan untuk seorang kepala sekolah di desa Pengandonan ini sekurang-kurangnya II/b (Pengatur Muda Tingkat I),
5. Sudah mengabdikan menjadi guru sekurang-kurangnya empat tahun.
6. Mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya,
7. Mampu menciptakan suasana kerja yang baik ke atasannya maupun dengan bawahannya,
8. Mempunyai pengalaman yang memadai,
9. Disegani, berwibawa, dan berani dan
10. Disetujui oleh kepala sekolah dan penilik sekolah yang bersangkutan.

Kepala Sekolah di desa Pengandonan mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mendapat tunjangan jabatan dari pemerintah sebesar Rp.10.000,00 perbulan,
2. Memberikan penilaian tentang prestasi kerja para guru dan karyawan yang ada di bawah kepemimpinannya,
3. Mendapat kenaikan pangkat istimewa satu kali dalam dua tahun. Apabila sudah mencapai kepangkatan II/D, kenaikan pangkat istimewa itu tidak berlaku lagi melainkan kenaikan pangkat biasa, yaitu empat tahun sekali.

Di samping itu, seorang Kepala Sekolah Dasar di Desa Pengandonan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala sekolah bertanggung jawab ke luar dan ke dalam atas sekolahnya, baik mengenai tata usaha maupun mengenai teknis pengajaran dan pendidikan,
2. Kepala sekolah menunjuk seorang guru sebagai wakilnya. Wakil ini adalah guru yang tertinggi golongannya/ruangannya atau tertua masa dinas atau yang baik prestasi kerjanya (bertanggung jawab terhadap tugas, rajin, tekun dan sifat-sifat lain yang baik,
3. Tugas kepala sekolah di dalam teknik pengajaran dan pendi-

dikan adalah mengawasi pekerjaan guru baik administratif sekolah maupun segi tekni, memberi petunjuk kepada murid dan guru, memimpin rapat-rapat dan sebagainya.

Seorang kepala sekolah dasar di Desa Pengandonan ini tidak mempunyai atribut/simbul kepemimpinan yang khusus untuk menandakan bahwa ia sebagai kepala sekolah. Sebagai seorang keluarga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, pada dada sebelah kiri atas mengenakan simbul Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berupa lambang Tut Wuri Handayani, yang terbuat dari logam kuningan.

Pengertian lambang Tut Wuri Handayani berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Desember 1977 Nomor 0398/M/1977 adalah sebagai berikut.

1. Belencong menyala bermotif garuda merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung garuda yang menjadi motif belencong memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima, yang berarti "satunya kata dengan perbuatan Pancasila".
2. Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
3. Bidang segi lima (biru muda) menggambarkan alam kehidupan Pancasila.
4. Semboyan TUT WURI HANDAYANI digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencatuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional.
5. Warna putih pada ekor dan sayap garuda dan buku berarti suci, bersih tanpa pamrih.
Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan ke-luhuran pengabdian.
Warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam (pandangan hidup Pancasila).

Gelar secara khusus tidak dimiliki oleh kepala sekolah dasar di Desa Pengandonan ini, tetapi masyarakat desa sering menyebutnya dengan istilah **Guru Kepala**. Dalam sapaan sehari-hari kepala sekolah dasar di Desa Pengandonan ini sering disapa dengan sapaan **Bapak atau Pak Guru**.

Sebagai seorang penguasa di Sekolah Dasar Negeri di Desa Pengandonan ini, kepala sekolah tidak mempunyai tanda khusus apa pun karena tindak tanduknya sama dengan masyarakat lainnya.

Seorang yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa Pengandonan ini mula-mula ia harus mendapat penilaian baik dari atasannya dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu, kepala sekolah mengusulkan calon kepala sekolah itu ke Penilik Se-

kolah. Penilik Sekolah meneruskan usul itu ke Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan meneruskan usul itu ke Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan dan Komerling Ulu.

Setelah mendapat persetujuan, usul itu diteruskan pula ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II. Selanjutnya baru diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Kabupaten Ogan dan Komerling Ulu yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan kepala sekolah tersebut.

Seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri di Desa Pengandonan ini sebelum memangku jabatan di sekolah tempat bertugas ia dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan di Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II, Kabupaten Ogan dan Komerling Ulu.

Sekolah Menengah Pertama Negeri : Sebetulnya Desa Pengandonan yang merupakan ibukota Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu memiliki sebuah Sekolah Menengah Pertama Negeri. Mengingat Kecamatan Pengandonan ini begitu luas maka diambillah kebijaksanaan pemerintah tidak didirikan di ibukota kecamatan melainkan di Desa Ujanmas, yang menurut pertimbangan Pemerintah dan masyarakat lebih baik. Hal ini dilakukan karena dengan pertimbangan supaya anak sekolah menengah pertama di Kecamatan Pengandonan itu lebih mudah mencapainya.

Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas adalah satu-satunya Sekolah Menengah Pertama yang berstatus Negeri di Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini didirikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Sumatra Selatan 1981. Kegiatan belajar di sekolah ini dilaksanakan pada pagi hari, mulai pukul 7.30 sampai pukul 13.10. Sekolah ini dipimpin oleh Hupi, sebagai kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah, yaitu Suparman.

Tempat dan Kegiatan : Kegiatan belajar-mengajar SMP Negeri Pengandonan ini dipusatkan di sebuah gedung yang didirikan di desa Ujanmas.

Kegiatannya terdiri dari:

1. Kegiatan belajar-mengajar yang bersifat intra kurikuler.
2. Kegiatan belajar-mengajar yang bersifat ekstra kurikuler.

Dewasa ini Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini memiliki siswa sebanyak 349 orang, yang merupakan delapan kelas dengan perincian 3 kelas I, 3 kelas II, dan 2 Kelas III.

Tujuan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini adalah untuk menampung anak-anak usia sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Pengandonan.

Di samping itu, didirikannya sekolah ini adalah untuk meringankan beban orang tua murid di desa yang ada dalam Kecamatan itu untuk menyekolahkan anaknya. Hal ini dimungkinkan oleh karena Sekolah Me-

nengah Pertama Negeri biayanya relatif murah dan jaraknya pun mudah dicapai oleh siswa yang ada dalam Kecamatan Pengandonan.

Seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini harus memenuhi syarat-syarat dan faktor pendukung tertentu untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Syarat-syarat dan faktor pendukung itu antara lain sebagai berikut :

1. Tidak terlibat dalam organisasi yang terlarang atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Berpendidikan paling rendah PGSLP;
3. Masa Dinas sebagai guru SMP Negeri paling sedikit delapan tahun;
4. Golongan kepangkatan paling rendah II/C;
5. Sudah berkeluarga;
6. Berdedikasi terhadap tugas dan kewajiban serta berkondukte baik;

Seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini mempunyai hak sebagai berikut

1. Mendapat tunjangan jabatan dari Pemerintah sebesar Rp. 20,000,00;
2. Memberikan penilaian tentang prestasi kerja para guru dan karyawan yang ada di bawah kepemimpinannya;
3. Mendapat kenaikan pangkat karena jabatan dua kali dalam empat tahun. Setelah itu, kenaikan pangkat biasa, yaitu satu kali dalam empat tahun;
4. Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah dapat menunjuk seorang atau beberapa orang guru yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan sekolah.

Di samping itu, seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas mempunyai tugas untuk mengelola masalah edukatif dan masalah administratif. Masalah edukatif yang dikelola oleh seorang kepala sekolah, yaitu proses belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Program tahunan, smesteran, berdasarkan kalender pendidikan;
2. Jadwal pelajaran pertahunan, persemesteran, termasuk penetapan jenis mata pelajaran/bidang pengembangan/bidang studi/bidang pengajaran/ketrampilan, dan pembagian tugas guru;
3. Program satuan pelajaran (teori dan praktek) berdasarkan buku kurikulum;
4. Pelaksanaan jadwal satuan pelajaran (teori dan praktek) menurut alokasi waktu yang telah ditentukan berdasarkan kalender pendidikan;
5. Pelaksanaan ulangan/tes/hasil evaluasi belajar untuk kenaikan dan EBTA;
6. Penyusunan norma penilaian;
7. Penetapan kenaikan kelas;
8. Laporan kemajuan hasil belajar siswa;
9. Penetapan dalam peningkatan proses belajar mengajar.

Di bidang administratif yang dikelola oleh seorang Kepala Seko-

lah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengatur administrasi kantor;
2. Mengatur administrasi siswa;
3. Mengatur administrasi pegawai;
4. Mengatur administrasi perlengkapan;
5. Mengatur administrasi keuangan;
6. Mengatur administrasi perpustakaan;
7. Mengatur administrasi pembinaan kesiswaan dan
8. Mengatur hubungan dengan masyarakat.

Seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini sebagaimana kepala SD, SMTP, dan SMTA lainnya bahwa ia tidak mempunyai atribut/simbul kepemimpinan yang khusus untuk menandakan bahwa ia sebagai Kepala Sekolah. Sebagai seorang keluarga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari ia mengenakan simbul berupa lambang Tut Wuri Handayani, yang terbuat dari logam kuningan. Pengertian lambang Tut Wuri Handayani itu telah dikemukakan pada halaman terdahulu.

Gelar secara khusus tidak dimiliki oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini, kecuali dengan istilah **Guru Kepala atau Bapak Guru**.

Sebagai seorang penguasa di sekolah itu, kepala sekolah tidak mempunyai tanda-tanda yang khusus.

Seorang yang akan diangkat menjadi Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini melalui proses sebagai berikut.

1. Seorang calon Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Desa Ujanmas ini mula-mula ia harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Sumatera Selatan antara lain latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, golongan/kepangkatan dan sebagainya. Biasanya calon kepala sekolah itu adalah wakil kepala sekolah.
2. Setelah persyaratan itu dipenuhi oleh calon kepala sekolah, pihak Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Sumatera Selatan meneliti kemungkinan-kemungkinannya untuk diangkat menjadi kepala sekolah tersebut.
3. Kalau menurut Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Sumatera Selatan calon kepala sekolah itu sudah memenuhi persyaratan yang diinginkan, maka calon kepala sekolah itu diusulkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan calon kepala sekolah tersebut.

Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (SMP PGRI) : Di samping Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kecamatan Pengandonan ini terdapat pula lembaga pendidikan yang lain yang bersifat swasta. Lembaga pendidikan yang bersifat swasta itu di-

namakan Sekolah Menengah Pertama Persatuan Guru Republik Indonesia (SMP PGRI).

SMP PGRI ini sejak berdirinya sampai sekarang terletak di Desa Pengandonan yang merupakan ibukota Kecamatan Pengandonan yang merupakan ibukota Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan dan Komering Ulu.

SMP PGRI ini didirikan pada tahun 1978, yang dipelopori Amir Hamzah dan beberapa orang guru di Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan dan Komering Ulu.

Kegiatan belajar di sekolah ini dilaksanakan pada sore hari mulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 17.00. Sekolah ini dipimpin oleh M. Thalib sebagai kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah, yaitu Maulana, Tenaga pengajar di sekolah ini berjumlah 13 orang.

SMP PGRI ini memiliki siswa sebanyak 185 orang, yang merupakan 4 kelas, yaitu 2 kelas I, 1 kelas II, dan 1 kelas III.

Susunan Kepengurusan: SMP PGRI ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yaitu M. Thalib dan dibantu oleh seorang Wakil kepala sekolah yaitu Maulana serta 13 orang guru.

Keanggotaan : SMP PGRI ini mempunyai murid sebanyak 185 orang yang terdiri dari 2 kelas I, 1 kelas II, dan 1 kelas III.

Tempat dan Kegiatan: Kegiatan belajar-mengajar SMP PGRI Pengandonan ini dipusatkan di sebuah gedung sekolah di desa Pengandonan. Kegiatan terdiri dari :

1. Kegiatan belajar-mengajar yang bersifat intra kurikuler.
2. Kegiatan belajar-mengajar yang bersifat ekstra kurikuler.

Tujuan didirikannya sekolah ini adalah untuk membantu pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam menanggulangi kesulitan pendidikan karena dengan berdirinya sekolah ini dapat menampung atau memberikan kesempatan pada anak-anak yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri untuk menikmati pendidikan di sekolah lanjutan pertama.

Seorang kepala SMP PGRI di Desa Pengandonan ini harus memenuhi syarat-syarat dan faktor pendukung tertentu untuk menjabat sebagai kepala sekolah.

Syarat-syarat dan faktor pendukung itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tidak terlibat dalam organisasi yang terlarang atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
2. Dipilih oleh dewan guru,
3. Berpendidikan paling rendah PGSLP,
4. Mempunyai pengalaman mengajar yang memadai,
5. Sudah berkeluarga,
6. Berdedikasi terhadap tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepadanya.

Seorang Kepala SMP PGRI di Desa Pengandonan ini mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mendapat tunjangan jabatan dari sekolah sesuai dengan ke-

- tentuan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah dapat menunjuk seorang atau beberapa orang guru yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan sekolah.

Di samping itu, **seorang Kepala SMP PGRI di Desa Pengandonan ini mempunyai tugas untuk mengelola masalah edukatif dan masalah administrasi.** Masalah edukatif yang dikelola oleh seorang kepala sekolah, yaitu mengatur proses belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Program tahunan, smesteran berdasarkan kalender pendidikan,
2. Jadwal pelajaran pertahunan, persemesteran, termasuk penetapan jenis mata pelajaran/bidang pengembangan/bidang studi/bidang pengajaran/ketrampilan, dan pembagian tugas guru;
3. Program satuan pelajaran (teori dan praktek berdasarkan buku kurikulum);
4. Pelaksanaan jadwal satuan pelajaran menurut alokasi waktu yang telah ditentukan berdasarkan kalender pendidikan;
5. Pelaksanaan ulangan/hasil evaluasi belajar untuk kenaikan dan EBTA;
6. Penyusunan norma penilaian;
7. Penetapan kenaikan kelas;
8. Laporan kemajuan hasil belajar siswa;
9. Penetapan dalam peningkatan proses belajar mengajar.

Di bidang administratif yang dikelola oleh seorang Kepala SMP PGRI di desa ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengatur administrasi kantor;
2. Mengatur administrasi siswa;
3. Mengatur administrasi pegawai;
4. Mengatur administrasi perlengkapan;
5. Mengatur administrasi keuangan;
6. Mengatur administrasi perpustakaan;
7. Mengatur administrasi pembinaan kesiswaan;
8. Mengatur hubungan dengan masyarakat.

Seorang Kepala SMP PGRI di Desa Pengandonan ini sebagaimana kepala SD, SLTP, dan SLTA lainnya bahwa ia tidak mempunyai atribut/simbul kepemimpinan yang khusus untuk menandakan bahwa ia sebagai kepala sekolah. Sebagai seorang keluarga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari ia mengenakan simbul berupa lambang Tut Wuri Handayani, yang terbuat dari logam kuningan. Pengertian lambang Tut Wuri Handayani itu telah dikemukakan pada uraian terdahulu.

Gelar secara khusus tidak dimiliki oleh Kepala SMP PGRI, di desa ini kecuali dengan istilah **Guru Kepala atau Bapak Guru..**

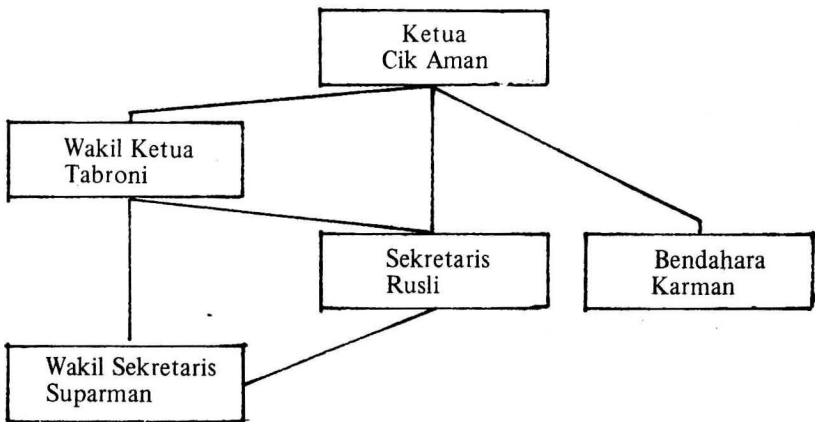
Kepala SMP PGRI dipilih oleh dewan guru secara musyawarah dan tidak diadakan upacara pelantikan secara resmi.

BP3 : BP3 merupakan singkatan dari kata Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan sebagai suatu organisasi orang tua murid yang bersekolah pada salah satu Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Negeri.

Di desa Pengandonan terdapat dua buah organisasi BP3 yaitu organisasi BP3 Sekolah Dasar Negeri Pengandonan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas. Kedua organisasi BP3 di Pengandonan ini anggotanya merupakan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Pengandonan atau di Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas.

Organisasi BP3 Sekolah Dasar Negeri di Pengandonan didirikan oleh Abdurroni pada tahun 1975.

Susunan pengurus BP3 Sekolah Dasar Negeri Pengandonan ini adalah sebagai berikut:

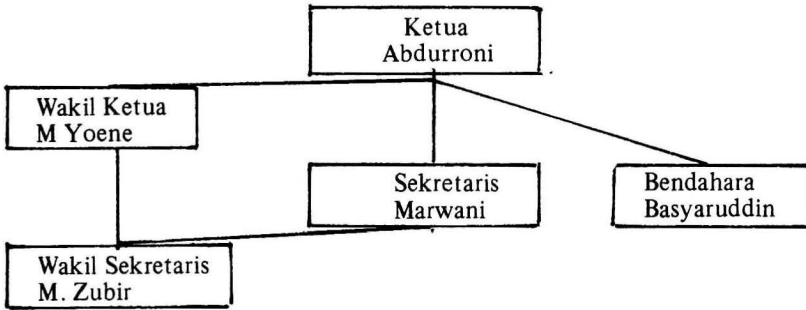


BP3 Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas didirikan pada tahun 1981 oleh Abdurroni. Perlu diketahui bahwa anggota BP3 Sekolah menengah Pertama Negeri Ujanmas ini tidak terbatas bagi masyarakat Desa Ujanmas saja. Hal ini mengingat bahwa anak yang sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas tersebut adalah sekecamatan Pengandonan.

Keanggotaan BP3 SD Negeri Pengandonan dan BP3 SMP Negeri Ujan Mas.

Keanggotaan BP3 baik di Sekolah Dasar Negeri Pengandonan maupun di Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yaitu anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa adalah semua orang tua murid atau wali murid sekolah yang bersangkutan, yang dapat diperluas dengan warga masyarakat setempat, tamatan sekolah tersebut, dan orang tua wali dari tamatan sekolah tersebut. Anggota luar biasa adalah personal sekolah dan masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh rapat anggota atas usul pengurus BP3. Anggota kehormatan adalah anggota masyarakat yang berjasa terhadap sekolah yang ditetapkan oleh rapat anggota atau usul pengurus BP3.

Susunan pengurus BP3 Sekolah Menengah Negeri Ujanmas dapat dilihat sebagai berikut:



Tingkatan anggota BP3 yang ada di desa ini hanyalah berdasarkan teorinya tetapi kenyataannya yang ada bahwa anggota BP3 yang ada hanyalah anggota BP3 biasa walaupun orang tua atau wali murid itu adalah seorang pejabat di desa itu.

Orang tua murid atau wali murid yang termasuk dalam keanggotaan BP3 Sekolah Dasar Negeri Pengandonan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan sekolah;
2. Menghadiri undangan rapat yang diselenggarakan oleh pengurus BP3;
3. Membayar uang BP3 sebanyak Rp 50,00 per bulan bagi setiap anak Sekolah Dasar Negeri Pengandonan. Dan bagi Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas membayar uang sebanyak Rp 1.000.000 untuk siswa kelas I, Rp 750.00 untuk siswa kelas II, dan Rp 500,00 untuk siswa kelas III per bulan bagi setiap anak.

Sebagaimana di sekolah-sekolah negeri lainnya di Indonesia bahwa BP3 Sekolah Dasar Negeri Pengandonan dan BP3 Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas tidak memiliki kantor tersendiri. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas yang mereka emban, terutama kegiatan-kegiatan seperti rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah yang menyangkut BP3 pengurus menggunakan ruang sekolah tersebut. Dengan kata lain bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh pengurus BP3 itu sepenuhnya di pusatkan di sekolah masing-masing.

Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi BP3 Sekolah Dasar Negeri Pengandonan dan BP3 Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas adalah (1) mendorong dan meningkatkan hubungan baik antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah baik secara organisatoris maupun perorangan. (2) membantu kelancaran kegiatan pendidikan dengan tidak mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang kepala sekolah guru, dan instansi pembina pendidikan yang bersangkutan. (3) mengusahakan bantuan dari masyarakat terutama masyarakat yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut.

BP3 yang ada di Pengandonan dan Ujanmas ini bertujuan membantu kelancaran kegiatan penyelenggaraan serta pemeliharaan pendidikan sekolah tersebut, supaya sekolah itu hidup subur dan lebih berperan dalam memenuhi tugasnya sebagai tempat membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air, dengan jalan mewujudkan dan memelihara hubungan yang erat, kerja sama dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah dalam menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan oleh sekolah yang belum atau tidak dicukupi oleh pemerintah, dengan tidak mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang kepala sekolah, guru dan instansi pembina yang bersangkutan.

Sistem kepemimpinan BP3 di Desa Pengandonan dan BP3 di Desa Ujanmas ini mengutamakan kekeluargaan. Meskipun pengurus secara formal ada, namun segala kepentingan, kegiatan yang ada hubungannya dengan BP3 selalu dikerjakan bersama dalam masyarakat dan gotong royong. Struktur kepengurusan BP3 disesuaikan dengan instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/0/1974 dan Nomor 29 tahun 1974.

Syarat-syarat kepemimpinan organisasi BP3 di Desa Pengandonan sesuai dengan instruksi bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/0/1974 dan Nomor 29 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota pengurus sedikit-dikitnya tiga orang yang terdiri dari ketua, penulis, dan bendahara dan jika dipandang perlu dapat ditambah sesuai dengan keperluan.
2. Susunan anggota pengurus terdiri dari orang tua murid atau wali murid dan dapat ditambah dengan warga masyarakat.
3. Kepala sekolah karena jabatannya diangkat sebagai penasihat pengurus.
4. Ketua, penulis, dan bendahara merupakan pengurus harian.
5. Pengurus disahkan oleh rapat anggota BP3.
6. Masa jabatan pengurus adalah selama satu tahun ajaran.

Cara pengangkatan tidak diadakan upacara, hanya saja dikeluarkan surat keputusan kepengurusan sebagai hasil musyawarah orang tua/wali murid, yang dalam hal ini adalah anggota BP3 dan diketahui oleh kepala sekolah.

Hak dan Kewajiban Ketua BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujanmas : Seorang ketua BP3 baik di SD Negeri Pengandonan maupun di SMP Negeri Ujanmas tidak mendapat fasilitas apa-apa dari organisasi itu bahkan ia mengusahakan dana untuk membantu organisasi dan sekolahnya.

Kewajiban ketua sebagai pemimpin adalah mengajak anggota bermusyawarah untuk menyusun program kerja. Di samping itu, berkonsultasi dengan kepala sekolah dalam usaha memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan dalam menunjang kegiatan belajar.

Syarat dan Faktor Pendukung Wakil Ketua BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujanmas:

1. Anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujanmas.

2. Orang yang disegani di desanya
3. Terpilih dalam rapat anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujanmas, dan
4. Dianggap mampu melaksanakan tugasnya.

Hak dan Kewajiban Wakil Ketua BP3 SD Negeri :

1. Membantu ketua;
2. Bekerja sama dengan pengurus lainnya;
3. Mewakili Ketua bila diperlukan dan
4. Dianggap mampu melaksanakan tugas.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Sekretaris BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujanmas:

1. Anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujanmas.
2. Orang yang disegani di desanya;
3. Terpilih dalam rapat anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujanmas, dan
4. Dianggap mampu melaksanakan tugasnya.

Hak dan Kewajiban Sekretaris BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujanmas:

1. Mengelola administrasi;
2. Bekerja sama dengan pengurus lainnya, dan
3. Hadir pada setiap pertemuan anggota dan pengurus.

Syarat dan Faktor Pendukung Wakil Sekretaris BP3 SD Negeri dan SMP Negeri Ujanmas:

1. Anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujanmas.
2. Orang yang disegani di desanya;
3. Terpilih dalam rapat anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujanmas, dan
4. Dianggap mampu melaksanakan tugasnya.

Hak dan Kewajiban Wakil Sekretaris BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujanmas :

1. Membantu sekretaris mengelola administrasi;
2. Bekerja sama dengan pengurus lainnya, dan
3. Hadir pada setiap pertemuan anggota dan pengurus.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Anggota BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujanmas:

Orang tua atau wali murid pada SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujan Mas secara langsung menjadi anggota BP3 di sekolah itu masing-masing.

Hak dan Kewajiban Anggota BP 3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujan Mas:

1. Hadir pada setiap rapat anggota;

2. Mematuhi segala keputusan rapat, dan
3. Membantu pengurus BP3 dalam merealisasikan semua rencana kerja.

Syarat-syarat dan Faktor Pendukung Bendahara BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujan Mas:

1. Anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujan Mas.;
2. Orang yang disegani di desanya;
3. Terpilih dalam rapat anggota BP3 SD Negeri Pengandonan atau SMP Negeri Ujan Mas, dan
4. Dianggap mampu melaksanakan tugas.

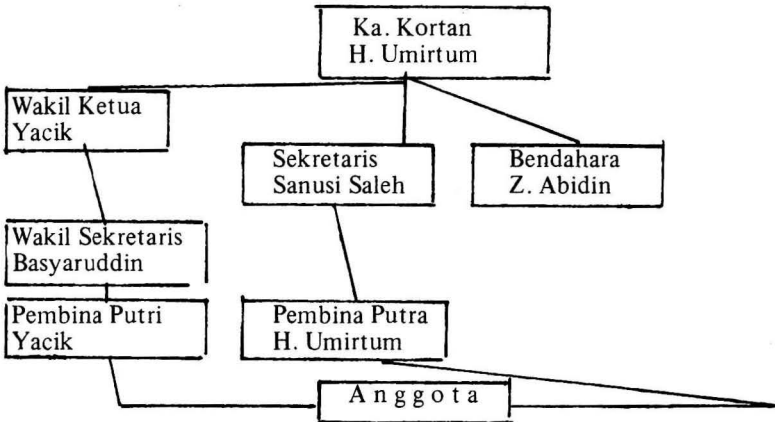
Hak dan Kewajiban Bendahara BP3 SD Negeri Pengandonan dan SMP Negeri Ujan Mas:

1. Hadir pada setiap pertemuan anggota dan pengurus BP3;
2. Mengelola dana yang ada berdasarkan hasil konsultasi pengurus dengan kepala sekolah, dan
3. Melaporkan/mempertanggung jawabkan keuangan kepada segenap anggota. Lambang kekuasaan atau gelar kehormatan seorang ketua BP3 atau pengurus lainnya tidak ada.

Gerakan Pramuka

Pramuka merupakan akronim dari Praja Muda Karana yang berarti rakyat muda yang bekerja. Berdasarkan anggaran dasar organisasi ini nama organisasi ini yang sebenarnya adalah Gerakan Kepanduan Praja Muda Karana, kemudian disingkat menjadi Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bukanlah berarti milik partai politik atau golongan politik tertentu. Ia bergerak di bidang pendidikan dan sosial terutama sekali pendidikan nonformal.

Gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini didirikan pada tahun 1972. Pembentukan gugus depan di desa ini sebetulnya belum ada. Oleh karena itu, semua kegiatan kepramukaan di desa ini masih ditangani oleh Kortan, yaitu Koordinator Kecamatan. Hal ini dilakukan karena Desa Pengandonan ini merupakan ibukota kecamatan. Oleh sebab itulah, susunan kepengurusan Gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini adalah



Keterangan:

Anggota berjumlah 48 orang, yang terdiri dari :
20 orang golongan Siaga putra dan putri, dan
28 orang golongan Penggalang putra dan putri.

Golongan Penegak dan Pandega jika dilihat dari susunan kepengurusan Gerakan Pramuka di desa ini, ternyata bahwa tidak ada yang menjadi anggotanya. Hal ini mungkin disebabkan karena para pemuda yang sudah tergolong remaja di desa ini lebih tertarik menjadi anggota organisasi lainnya yang ada di desa ini. Anak-anak yang menjadi anggota Pramuka di Desa Pengandonan ini adalah anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Pengandonan. Anak-anak yang putus sekolah tidak ada yang menjadi anggotanya. Padahal diharapkan setelah putus sekolah mereka masih dapat memperoleh pendidikan, misalnya lewat pendidikan nonformal Gerakan Pramuka.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa golongan tingkatan yang ada di desa ini hanyalah golongan Siaga dan golongan Penggalang. Untuk menjadi anggota Pramuka golongan Siaga seorang anak harus berumur sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling tinggi 10 tahun. Apabila seorang anak sudah berumur 11 tahun maka anak itu sudah dapat diterima di golongan Penggalang. Persyaratan usia untuk golongan Penggalang ini paling besar 16 tahun. Oleh sebab itu, di Desa Pengandonan ini anggota Pramuka yang bergolongan Siaga umumnya adalah anak-anak Sekolah Dasar Negeri Pengandonan dari kelas I sampai dengan kelas IV sedangkan untuk anggota golongan Penggalang adalah anak-anak yang sudah duduk di kelas V dan VI. Anggotanya terdiri dari anggota putra dan anggota putri.

Kegiatan Gerakan Pramuka di desa ini dilakukan di gedung dan halaman Sekolah Dasar Negeri Pengandonan. Secara formal tempat berkumpul para anggota Pramuka sebetulnya ada suatu tempat yang disebut **sanggar** tetapi di desa ini sanggar Pramuka itu belum ada. Karena semua anggota Pramuka di desa ini adalah anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Pengandonan maka kegiatan latihannya diselenggarakan di gedung sekolah tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan yang bersifat selingan. **Kegiatan yang bersifat rutin merupakan kegiatan latihan setiap hari Minggu. Kegiatan itu meliputi**

1. Kegiatan baris berbaris;
2. Ketrampilan P3K;
3. Ketrampilan tali-temali;
4. Permainan aral rintangan;
5. Mempelajari tulisan sandi dan isyarat morse. semapor;
6. Mengenal lingkungan atau kegiatan yang dilakukan oleh Kwartir Cabang, Kabupaten Ogan dan Komering Ulu.

Kegiatan yang merupakan selingan dilakukan tidak setiap Minggu melainkan dilakukan secara berkala setiap tiga atau empat bulan satu kali. **Kegiatan ini meliputi kegiatan :**

1. Persami atau perkemahan Sabtu-Minggu,
2. Prata atau Perkemahan Akhir Tahun;
3. Jambore Cabang yang diselenggarakan oleh Kwarcab, Ogan

- dan Komerling Ulu, di Baturaja;
4. Kegiatan sosial lainnya yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional atau hari-hari besar keagamaan.

Berbeda dengan Gerakan Pramuka yang ada di kota yang memungut iuran setiap kali latihan, di Desa Pengandonan ini iurannya dipungut satu kali dalam satu bulan. Besarnya iurannya setiap bulan adalah Rp 25,00. Pemungutan iuran seperti ini dilakukan adalah untuk menarik minat anak-anak yang lainnya agar mau menjadi anggota Pramuka di desa ini.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibentuknya Gerakan Pramuka di desa ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendidik anak agar takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa sebagaimana tercantum pada Dasar Dharma Gerakan Pramuka;
2. Mendidik anak hormat kepada orang tua dan menyayangi sesamanya;
3. Mendidik anak-anak hidup bersahaja;
4. Mendidik anak-anak hidup berdisiplin dan menghargai waktu.
5. Mendidik anak-anak menjadi pemimpin di antara tunas-tunasnya;
6. Mengisi waktu luang anak-anak dengan kegiatan yang bermanfaat;
7. Menyiapkan kader-kader pembangunan yang jujur, trampil dan berdisiplin.

Sistem Kepemimpinan Gerakan Pramuka Desa Pengandonan.

Yang dimaksud dengan pemimpin Gerakan Pramuka dalam tulisan ini para Pembina baik Pembina Putra maupun Pembina Putri dari semua golongan yang ada. Syarat dan faktor pendukung seorang pemimpin Gerakan Pramuka di desa ini ditunjuk secara fungsional, misalnya H. Umirtum. Ia dipilih/ditunjuk menjadi Ketua Kortan Pengandonan karena secara formal tugasnya sehari-hari sebagai orang yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Untuk menjalankan fungsi ini sebagai Pembina atau Pemimpin Gerakan Pramuka ini H. Umirtum pernah mengikuti Kursus Mahir Dasar Pramuka, yaitu sejenis kursus untuk mempersiapkan calon pendidik Pramuka. Demikian juga halnya dengan Yacik, Pembina Putri Gerakan Pramuka desa ini. Sebagai istri camat dan sekaligus sebagai ketua organisasi Dharma Wanita di desa ini, ia diberi kepercayaan menjalankan sebagai pemimpin organisasi Gerakan Pramuka. **Selain yang dikemukakan di atas seorang pemimpin Gerakan Pramuka di desa ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:**

1. Warga negara Indonesia;
2. Mau bekerja suka rela sesuai dengan dasar pendidikan Gerakan Pramuka;
3. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 karena tidak sesuai dengan dasar Pramuka.

Seorang pemimpin Gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini berhak antara lain :

1. Memungut iuran dari para anggota yang telah ditetapkan se-

besar Rp 25,00 per bulan;

2. Meminta bantuan dari Majelis Pembimbing Kecamatan selagi masih dapat dijangkau oleh Mabitan tersebut.

Seorang pemimpin Gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membuat program kerja latihan baik jangka pendek, maupun jangka panjang (khusus untuk pembina Siaga dan Penggalang)
2. Hadir pada setiap latihan yang diadakan satu minggu satu kali
3. Melaksanakan latihan sesuai dengan yang telah diprogramkan baik dibantu maupun tidak dibantu oleh asisten pembina;
4. Mengadakan musyawarah yang bersifat biasa maupun luar biasa.
5. Membimbing dan mengarahkan tingkah laku anak didik sesuai dengan Dasar Dharma Gerakan Pramuka;
6. Memberikan contoh/teladan kepada anak didiknya dalam masyarakat dalam hal mengamalkan Dasar Dharma Gerakan Pramuka.

Setiap anggota Gerakan Pramuka memiliki sibil atau atribut tersendiri yang berbeda dengan organisasi sosial pendidikan lainnya yang ada di wilayah Republik Indonesia. Atribut ini tampak sekali dapat dilihat dari pakaian dan perlengkapan-perengkapannya. Lambang/atribut yang utama dan bersifat nasional adalah **tunas kelapa**. Simbul tunas kelapa ini digunakan sebagai tanda pelantikan bagi seorang yang resmi menjadi anggota organisasi Gerakan Pramuka. Tanda pelantikan tersebut berupa tuna kelapa dikelilingi oleh padi dan kapas di atas terdapat bintang bersudut lima, di dalam padi dan kapas terdapat gigi-gigi sebanyak 10 buah, dan di tengah tanda pelantikan bertuliskan Gerakan Pramuka.

Arti atribut/simbul di atas itu adalah sebagai berikut.

1. Tunas kelapa melambangkan bahwa anggota Gerakan Pramuka yang kelak akan menjadi manusia yang serba guna dan dapat hidup menyesuaikan diri di mana pun ia berada serta lurus dan jujur,
2. Padi dan kapas melambangkan keadilan dan kemakmuran;
3. Bintang bersudut lima melambangkan sila pertama Pancasila
4. Gigi yang berjumlah 10 buah melambangkan Dasar Dharma (sepuluh pokok ajaran dalam organisasi Pramuka).

Selain simbul itu, dalam organisasi Gerakan Pramuka terdapat juga simbul lainnya, yaitu berupa satu setengah leher atau pita leher (kacu) yang berwarna merah putih.

1. Kacu putra dan putri agak berbeda, yaitu kacu / pita anggota putra berbentuk segitiga berwarna merah dan putih. Sedangkan kacu anggota putri berbentuk memanjang sebagian berwarna merah dan sebagian berwarna putih.
2. Tutup Kepala
 - a. Tutup kepala Siaga putra dan putri berupa baret yang terbuat dari kain berwarna coklat tua. Demikian juga halnya dengan golongan Penggalang, Penegak/Pendega putra.

- b. Tutup kepala untuk golongan penggalang, Penegak/Pendega putri berupa peci yang terbuat dari kain berwarna coklat tua.
3. Pada lengan baju sebelah kanan terdapat lokasi Kwarcab, Kortan atau Gudep. Khusus untuk anggota Pramuka di Desa Pengandonan ini tanda lokasi itu memakai tanda lokasi Kwarcab, yaitu Kwarcab Ogan dan Komering Ulu. Untuk anggota putri juga mengenakan simbul Pramuka putri sedunia di sudut kera baju sebelah kanan. Sedangkan putra menggunakan simbul Pramuka putra sedunia, dikenakan pada dada sebelah kanan.

Selain dari simbul atau atribut yang bersifat nasional itu anggota Pramuka di Desa Pengandonan ini dilengkapi juga dengan atribut berupa badge Kwarda Sumatra Selatan. Badge Kwarda Sumatra Selatan ini berbentuk tapal kuda dengan warna dasar kuning. Di dalamnya terdapat sembilan buah jalur yang berwarna biru, di tengahnya terdapat gambar tunas kelapa. Pada bagian atasnya terdapat sebuah gunung yang dipotong oleh sepasang menara. Di atas kesembilan jalur itu terdapat daun kelapa yang berwarna merah dan di bawahnya terdapat tulisan Kwarda Sumatra Selatan. **Arti dari atribut tersebut adalah sebagai berikut :**

1. Sembilan buah jalur yang berwarna biru melambangkan jumlah anak-anak Sungai Musi yang berjumlah sembilan buah;
2. Tunas kelapa dan daun kelapa melambangkan gerakan Pramuka putra dan putri.
3. Sebuah gunung melambangkan bahwa Sumatra Selatan memiliki sebuah gunung yang cukup terkenal, yaitu Gunung Dempo;
4. Menara ganda melambangkan jembatan Ampera merupakan kebanggaan Sumatra Selatan;
5. Angka rumawi enam melambangkan nomor urut daerah Sumatra Selatan.

Seorang pemimpin organisasi gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini Atribut/simbul kepemimpinannya tidak berbeda dengan atribut/simbul kepemimpinan organisasi gerakan Pramuka lainnya di Indonesia. Satu hal yang membedakannya dengan anak yang diasuhnya adalah tanda pelantikan. **Perbedaan itu adalah sebagai berikut :**

1. Tanda pelantikan untuk golongan Siaga putra dan putri berupa tunas kelapa dengan latar belakang warna hijau.
2. Tanda pelantikan anggota golongan Penggalang putra dan putri berupa tunas kelapa dengan latar belakang warna merah.
3. Tanda pelantikan untuk golongan Penegak/Pendega putra dan putri berupa tunas kelapa dengan latar belakang warna kuning.
4. Tanda pelantikan seorang pemimpin dengan latar belakang hitam.

Selain itu, H. Umitrum selaku pemimpin Gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini karena ia telah mengikuti kursus mahir maka ia dilengkapi pula dengan pita mahir untuk golongan Penggalang.

Seorang pemimpin Pramuka mempunyai gelar tersendiri yang disesuaikan dengan golongan anak didik yang dididiknya. Pemimpin putri go-

longan Siaga atau lebih dikenal dengan pembina putri mendapat gelar **Bunda**, yaitu singkatan dari **Ibunda**. Sedangkan untuk pembina putra golongan Siaga mendapat gelar **Yanda**, yaitu singkatan dari **Ayahanda**. Pemimpin Gerakan Pramuka untuk golongan Penggalang baik putra maupun putri, Penegak putra maupun Penegak putri, dan Pendega putra dan Pendega putri mendapat gelar **Kakak Pembina**.

Di Desa Pengandonan ini pemimpin yang banyak sekali terjun dalam membina anak didik dalam Gerakan Pramuka adalah H. Umirtum karena tidak ada pembina lainnya sedangkan Gerakan Pramuka di Desa ini terdiri dari dua golongan, yaitu Siaga dan Penggalang. Oleh karena itu, H. Umirtum sekaligus mendapat gelar **Yanda** dan **Kakak Pembina**. Anak didik golongan Siaga baik putra maupun putri dalam kegiatan kepramukaan menyapanya dengan sapaan **Yanda**. Sedangkan anak golongan Penggalang baik putra maupun putri menyapanya dengan sapaan **Kakak Pembina**. Demikian juga halnya dengan Yacik, yaitu pembina putri di Desa Pengandonan ini selain mendapat gelar **Bunda**, yaitu dari anak didik golongan Siaga baik putra maupun putri juga mendapat gelar Kakak Pembina dari anak didik golongan Penggalang baik anak putra maupun putri.

Seorang pemimpin Gerakan Pramuka seharusnya dipilih melalui suatu musyawarah. Tetapi, di Desa Pengandonan lain halnya, yaitu seorang pemimpin Gerakan Pramuka ditunjuk secara fungsional oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, yaitu Abdurroni. Penunjukan secara fungsional ini dilakukan adalah untuk lebih mudah mengkoordinasikannya.

H. Umirtum, sebagai pemimpin Gerakan Pramuka karena ia merupakan karyawan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, di Desa Pengandonan ini. Demikian juga halnya dengan Yacik ditunjuk sebagai pembina putri Gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini karena sebagai istri seorang pejabat, di Desa itu, yaitu istri Camat.

Upacara pelantikan seorang pemimpin Gerakan Pramuka di Desa Pengandonan ini dilakukan di halaman upacara Sekolah Dasar Negeri di Desa Pengandonan. Yang melantik pemimpin Gerakan Pramuka Pengandonan adalah dari Ka Kwartir Gerakan Pramuka Ogan dan Komerling Ulu.

Upacara pengangkatan pemimpin Gerakan Pramuka yang dilakukan di Desa ini adalah sebagai berikut:

1. Barisan dipimpin oleh pembina upacara dengan membentuk barisan terbuka menghadap bendera merah putih yang telah dikibarkan.
2. Pelantikan para pemimpin oleh Kakwarcab Ogan dan Komerling Ulu. Pada waktu pelantikan ini yang dilantik memegang ujung bendera merah putih yang dibawa oleh seorang peserta upacara. Ujung bendera ini diletakkannya ke dadanya. Karena yang dilantik lebih dari seorang, pemimpin yang lainnya cukup memegang lengan pemimpin yang memegang ujung bendera tadi. Dengan demikian, bendera yang dibawa cukup satu buah saja. Pada waktu itu Kakwarcab mengucapkan kata pelantikannya.
3. Selesai mengucapkan kata pelantikan, Kakwarcab menyam-

- paikan kata sambutan.
4. Menyampaikan lagu Himne Pramuka.
 5. Menyampaikan lagu wajib Bagimu negeri.
 6. Upacara dibubarkan oleh pemuka upacara.

Pola Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan di Bidang Pendidikan Desa Kelumpang:

Pola kepemimpinan dalam masyarakat Pedesaan di bidang pendidikan di Desa Kelumpang hanya mengenai Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang.

Perguruan Muhammadiyah dalam menyelenggarakan pendidikan, memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu hendak menyampaikan ajakan-ajakan kebaiakan, atau mengajak memeluk Agama Islam. Dengan kata lain bahwa melalui pendidikan Muhammadiyah melaksanakan dakwah Islamiyah. Namun untuk tegasnya Muhammadiyah menggariskan tujuan pendidikan sebagai berikut. "Pendidikan Muhammadiyah mewujudkan manusia Muslim berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri serta berguna bagi masyarakat dan negara". (Rosidi: 1982).

Sistem pendidikan Muhammadiyah adalah menggabungkan pendidikan pola pesantren dengan pola pendidikan barat atau umum. Oleh karena itu, sesungguhnya apa yang telah dirintis oleh Muhammadiyah ini benar-benar dalam usaha langsung untuk dirasakan dimanfaatkan bagi masyarakat maupun negara.

Salah satu sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah ini terletak di Desa Kelumpang, yaitu Madrasah Muhammadiyah Cabang Kelumpang. Sekolah ini hanya sampai tingkat Ibtidaiyah atau sederajat dengan Sekolah Dasar.

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah ini didirikan serentak dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah di Desa Kelumpang, yaitu tanggal 30 Januari 1954 dengan surat keputusan pendirian Madrasah Ibtidaiyah juga tergabung dengan surat keputusan pendirian organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang, yaitu Nomor 1057/B/1954. Pelopor pendiriannya adalah Dul Husin.

Madrasah Ibtidaiyah ini telah beberapa kali mengalami perubahan status, yaitu pernah menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB) dan pernah pula berstatus menjadi sekolah dasar, sampai sekarang mempunyai status Mdrasah Ibtidaiyah.

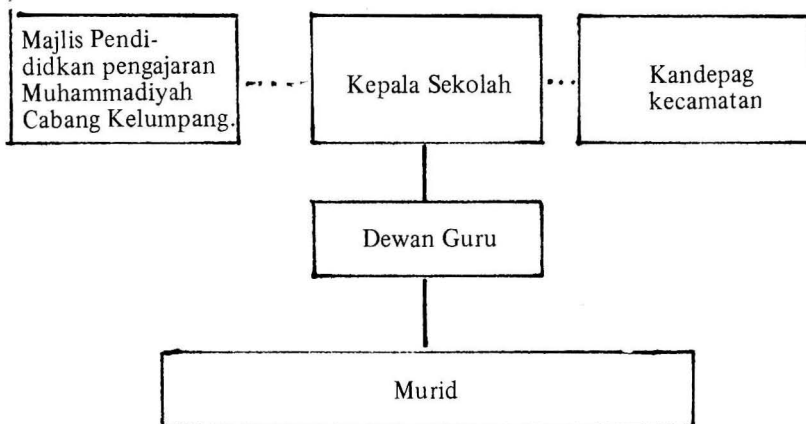
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang ini dikelola langsung oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Cabang Kelumpang. Pendirian sekolah ini adalah atas usaha bersama anggota Muhammadiyah Cabanag Kelumpang bersama-sama dengan anggota ranting-ranting Muhammadiyah dalam lingkungan Cabang Kelumpang.

Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang terletak di sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 25 X 60 m², di tepi Sungai Ogan di pusat kegiatan Desa Kelumpang. Di atas tanah tersebut berdiri tiga buah bangunan yaitu sebuah sekolah yang terdiri dari enam lokal. Lokal tersebut dipergunakan untuk belajar sebanyak 5 lokal, dan satu lokal untuk ruang guru dan kantor. Di kantor ini pula merupakan pusat kegiatan organisasi Muhammadiyah Cabang Kelumpang. Selain bangunan sekolah di areal tersebut terdapat pula sebuah mesjid. Mesjid ini

didirikan atas swadaya masyarakat dan bantuan Pemerintah. juga terdapat sebuah Mushollah sebagai pusat kegiatan ibu-ibu, terutama bagi ibu-ibu wanita Muhammadiyah, yaitu Aisyiah.

Berdasarkan jenjang kependidikan maka Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang ini berpedoman kepada sistem kependidikan yang dikelola oleh Departemen Agama. Jadi, struktur jenjang kependidikan tunduk pada Kandepag Kecamatan.

Struktur pelaksanaan kegiatan kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang dapat dilihat sebagai berikut :



Tenaga guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang adalah sebagai berikut.

1. Panik, sebagai kepala sekolah;
2. Basyaruddin, sebagai guru;
3. Yasirah, sebagai guru;
4. Irma, sebagai guru;
5. Sidah, sebagai guru.

Kadaan murid Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang dapat diketahui melalui tabel berikut ini.

TABEL 3
KEADAAN MURID MADRASAH IBTIDAIYAH
CABANG KELUMPANG TAHUN AJARAN 1983/1984

Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	17	30	47
II	21	19	40
III	18	8	26
IV	9	11	20
V	11	17	28
VI	12	12	24

Jumlah	88	97	185
--------	----	----	-----

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tenaga pengajar hanya lima orang harus mengatasi murid sebanyak 185 orang. Perimbangan jumlah murid kelas yang rendah lebih banyak dari jumlah murid kelas yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa keadaan murid akan terus meningkat, mengingat pertambahan penduduk makin maju pesat. Sampai saat ini belum ada bantuan tenaga dari Pemerintah. Dari kenyataan jumlah lokal yang ada dengan jumlah murid, masih ada satu kelas yang digilirkan atau masuk sore.

Syarat-syarat untuk menjadi seorang kepala sekolah atau pimpinan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Menunjung tinggi perintah Agama Islam;
2. Bersih lahir batin dan teguh hati;
3. Giat bekerja dan beramal;
4. Sanggul melangsungkan amal usaha Muhammadiyah;
5. Mendapat persetujuan pengurus Muhammadiyah Cabang Kelumpang, sesuai dengan prosedur organisasi Muhammadiyah yang dituangkan dalam surat keputusan;
6. Memiliki Ijazah Sekolah Guru.

Kepala sekolah pada sekolah Muhammadiyah berfungsi sebagai pembina prinsip-prinsip organisasi, maka tidak berlebihan bila persyaratan seorang kepala sekolah Muhammadiyah memiliki persyaratan teknis sebagai administrasi pendidikan, juga harus sesuai dengan maksud dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah pasal 15, yaitu:

1. satu tahun telah menjalankan ibadah dan tugas profesinya serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam;
2. setia kepada asas, tujuan dan perjuangan organisasi;
3. taat kepada kebijaksanaan pimpinan pusat;
4. mampu dan cakap menjalankan tugas;
5. dapat menjadi teladan utama dalam organisasi;
6. berpengalaman dalam organisasi; dan
7. tidak merangkap pimpinan organisasi politik dan organisasi yang amal usahanya sama dengan organisasi Muhammadiyah.

Seorang kepala sekolah adalah mandataris organisasi di sekolah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, selain memiliki persyaratan kualitatif di bidang teknik pendidikan, juga secara kualitatif ideal seorang kepala sekolah harus memahami:

1. pelajaran mukaddimah Muhammadiyah;
2. kepribadian Muhammadiyah;
3. keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.

Dengan demikian, seorang kepala sekolah mempunyai tanggung jawab moral dalam membina sekolahnya sehari-hari, yaitu:

1. menanamkan suasana takwa, tauhid dan ibadah di sekolah;
2. menciptakan suasana hubungan di antara kepala sekolah dengan guru-guru, karyawan-karyawan, dengan murid-murid,

- dengan tata tertib, serta dengan sendi-sendi ajaran Islam;
3. memamamkan dan mengadakan penyantunan menuju terciptanya keserasian keyakinan keluarga besar dari sekolahnya akan kebenaran ajaran Islam;
 4. menanamkan sikap mental keluarga besar dari sekolahnya siap berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agamanya;
 5. menyantuni keluarga besar dari sekolahnya untuk siap mengambil teladan dari akhlak Rasulullah selama hidupnya;
 6. senantiasa melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan sekolahnya atas landasan ketertiban organisasi;
 7. Senantiasa menanamkan sikap mental keluarga besar di sekolahnya untuk memiliki jiwa pengabdian, menjadikan negeranya adil makmur dan diredhoi Allah.

Pertanggungjawaban organisasi sekolah tidak saja kepada struktur organisasi dalam tubuh Muhammadiyah, tetapi juga bertanggung jawab kepada peraturan pemerintah, sesuai dengan pedoman pendidikan, untuk ini Departemen Agama.

Kepala sekolah dituntut berbagai kebijaksanaan yang tercermin dalam ketentuan berikut ini:

1. kepentingan yang jujur, cakap, supel, penuh tanggung jawab;
2. peningkatan dan pembinaan mutu guru dalam kualitas ilmunya maupun dalam teknik penerapannya;
3. pembinaan guru, agar mempunyai mental yang kuat netral dan bertanggung jawab;
4. mewujudkan kesatuan tanggung jawab dengan dewan guru;
5. memberikan gambaran yang jelas dan tegas sebagai tuntunan kependidikan serta memberikan tuntunan petunjuk secara priodik dalam pelaksanaan pendidikan;
6. menciptakan koordinasi yang mampu mewujudkan komunikasi timbal baik; dan
7. mengusahakan terciptanya suasana kerja yang harmonis.

Sebagai hak, kepala sekolah mendapat imbalan sesuai dengan ketentuan organisasi yang sedang berlaku, baik yang berhubungan dengan material ataupun tanda kejasaan oleh organisasi.

Di samping kepala sekolah, guru juga mempunyai peranan yang penting dalam kependidikan di sekolah Muhammadiyah. Untuk itu perlu dikemukakan hak dan kewajiban seorang guru dalam Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang sebagai berikut:

Pada hakekatnya seorang guru Muhammadiyah tidak dapat melepaskan dirinya sebagai:

1. makhluk Allah, sebagai makhluk muslim yang memiliki tanggung jawab untuk menunaikan amanat Allah;
2. sebagai warga negara Republik Indonesia, yang memiliki tanggung jawab menunaikan prinsip-prinsip GBHN menurut profesinya sebagai guru;
3. bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya sebagai guru;
4. menjaga kode etik, kehormatan profesi yang dipegangnya sebagai guru dan

5. mempunyai tanggung jawab fungsi kurikuler yang dipegangnya.

Di samping itu, guru Muhammadiyah adalah pengemban amanat khilafah, pengemban amanat risalah Islamiyah, pembina akhlak Muhammadiyah, mempunyai sikap mental guru Muhammadiyah, mencintai profesi sebagai bagian dari hidupnya, dan sebagai pembimbing dan penyuluh.

Hak yang di dapatkan oleh guru Muhammadiyah adalah mendapat imbalan jasa berupa material sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku, serta mendapat tanda kejasaan sesuai dengan peraturan keorganisasian.

Simbul kepemimpinan, gelar atau nama yang diberikan kepada kepala sekolah secara resmi tidak ada, hanya berupa panggilan penghormatan, biasa, yaitu guru kepala atau tanda penghargaan tertentu seperti piagam. Tanda-tanda kekuasaan juga tidak ada, tetapi sebagai seorang pendidik yang termasuk tokoh masyarakat tentu saja sangat dihormati oleh masyarakat umum.

Untuk pengangkatan kepala sekolah tidak ada ucapan resmi. Yang ada hanya dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Muhammadiyah Cabang Kelumpang.

Lambang Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang sama dengan lambang-lambang sekolah Muhammadiyah lainnya, yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

Lambang sekolah-sekolah Muhammadiyah terdiri dari matahari yang bersinar, tulisan Muhammadiyah dengan bahasa Arab, tulisan dua kalimah sahadat, dan dua buah bangku belajar.

Lambang matahari yang bersinar putih bersih lagi cemerlang, yang bersinar sebanyak 12 memancar ke segenap penjuru, berarti bahwa matahari adalah sebagai ciptaan Allah yang sangat berguna bagi manusia, sebab tanpa sinar matahari maka dunia yang akan gelap gulita, serta membeku, sehingga makhluk hidup tidak dapat melanjutkan hidupnya. Organisasi pendidikan Muhammadiyah adalah sebagai alat untuk memberikan cahaya yang berupa keyakinan bahwa dua kalimah sahadat bersinar sebagai pokok keyakinan, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadiyah menyeru kepada semua ummat manusia agar dengan sadar bersedia memeluk Agama Islam. Pada hakekatnya hati mereka telah terang benderang jauh dari segala kegelapan dan selamat menuju rihdo Allah.

Tulisan Arab Di tengah-tengah matahari berbunyi Muhammad-diyah, yaitu nama organisasi yang dengan segala tugasnya mampu melaksanakan atau mengemban tugas untuk menyebarkan keyakinan kepada ummat manusia.

Sinar yang 12 adalah mencerminkan warga Muhammadiyah sebagai orang yang bertugas mengantarkan sinar Iman.

Dua buah bangku belajar adalah menunjukkan bangku tempat menuntut ilmu guna mempersiapkan diri sebagai kader umat dan kader bangsa, mempersiapkan diri sebagai manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri serta kelak berguna bagi masyarakat dan negara.

Di samping itu, di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang terdapat pula sebuah organisasi pelajar yang disebut

IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah). Organisasi ini didirikan dengan maksud agar ikut membantu melaksanakan gerak dan amal usaha Muhammadiyah. Organisasi ini secara sentral didirikan pada tanggal 18 Juli 1961. Tujuan utamanya adalah tercantum dalam anggaran dasar IPM pasal 4 yang berbunyi terbentuknya pelajar muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Sistem kepemimpinan IPM meliputi syarat-syarat dan faktor pendukung hak dan kewajiban, atribut dan simbol diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Prosedur kerja menuruti prosedur organisasi sebagai organisasi otonom Muhammadiyah.

Lambang atau atribut IPM dapat dikemukakan sebagai berikut.

Bentuk lambang adalah berupa perisai menyerupai pena dengan penampang berlapis lima, yaitu hitam, merah, putih, hijau, dan kuning. Tulisan yang ada di dalamnya berupa semboyan : Nu-n, wal qalami wama yasthuru-n.

Arti lambang, perisai pena berarti lambang orang yang menuntut ilmu. Warna hitam berarti keabadian, ketabahan, kekuatan. Merah berarti keberanian. Putih berarti kesucian. Hijau berarti kesuburan. Kuning berarti kesetiaan, kesatriaan dan kemuliaan tujuan. Sedangkan semboyan diambil dari Alquran surat Al Kalam ayat 1 – 2 yang berarti Demi pena dan segala yang dituliskannya.

Pengaruh dan Fungsi Kepemimpinan Bidang Pendidikan dalam Masyarakat:

Latar belakang yang dikemukakan sebagai pengaruh dan fungsi kepemimpinan bidang pendidikan dalam masyarakat di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang mencakup beberapa segi, sesuai dengan beberapa kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pendidikan yang ada di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang. Sesuai dengan paparan terdahulu bahwa kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan di bidang pendidikan yang ada di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang adalah kepemimpinan Sekolah Dasar Negeri Pengandonan, Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas, sekolah Menengah pertama PGRI Pengandonan, BP3, Pramuka, dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabanag Kelumpang.

Dengan adanya Sekolah Dasar Negeri Pengandonan sebagai sekolah tertua di Kecamatan Pengandonan, jadi peranan kepemimpinan di Sekolah Dasar Negeri Pengandonan sangat besar. Pengaruh-pengaruh tersebut sangat mendalam di masyarakat, terutama dalam hubungannya memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menikmati pendidikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, usaha tersebut berarti meningkatkan kecerdasan bangsa, sesuai dengan cita-cita negara Republik Indonesia.

Setiap kegiatan dan perkembangan sekolah dengan segala usaha yang dijalankan dalam kepemimpinannya untuk kepentingan masyarakat selalu diperhatikan, dipedomani, dijadikan tolok ukur bagi masyarakat. Bahkan dalam segi-segi tertentu, seperti dalam kegiatan memberantas buta huruf, kepemimpinan Sekolah Dasar Negeri Pengandonan sangat dibutuhkan dan harus tampil atau terjun sebagai pelopor utama. Untuk itu pula

sejak dahulu masyarakat selalu menghormati, sekaligus menghargai kepemimpinan Sekolah Dasar Negeri Pengandonan yang telah banyak sumbangannya kepada masyarakat. Para pengelola sekolah, yaitu kepala Sekolah, dan dewan guru termasuk orang yang terhormat dan disegani oleh masyarakat. Untuk itu pula wajar apabila masyarakat menganggap bahwa Sekolah Dasar Negeri Pengandonan adalah menjadi tanggung jawab masyarakat bersama. Setiap orang merasakan memiliki Sekolah Dasar Negeri Pengandonan tersebut, dan setiap orang merasakan peranan dan fungsi Sekolah Dasar Negeri Pengandonan itu di tengah-tengah kehidupan sosial budaya mereka, terutama dalam memberikan layanan pendidikan dasar.

Sistem kepemimpinan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas tidak kalah besar pengaruhnya dibandingkan dengan Sekolah Dasar Negeri Pengandonan. Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas terhitung masih baru, namun peranannya dalam masyarakat sangat mendalam. Karena Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas ini adalah satu-satunya Sekolah Menengah Pertama Negeri dalam Kecamatan Pengandonan.

Dengan demikian, kehadiran Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas ini memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya untuk mengenyam pendidikan menengah. Selama ini bagi masyarakat kalau ingin menyekolahkan anaknya ke pendidikan menengah harus memiliki persiapan yang cukup besar, karena masyarakat harus menyekolahkan anaknya jauh dari desa mereka, seperti Baturaja, Muaraenim atau kota-kota lainnya.

Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Pengandonan yang selama ini banyak terkebelakang, jauh ketinggalan di bidang apa saja dari masyarakat lainnya di luar Kecamatan, terutama dari segi cara berpikir, mengingat bahwa sedikit sekali masyarakat yang mendapat pendidikan menengah, maka dengan berdirinya Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam Kecamatan Pengandonan mendapat pendidikan menengah. Diharapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas mampu melayani masyarakat sebagai fungsinya dalam pendidikan. Dengan demikian, Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas berfungsi mencerdaskan bangsa, sesuai dengan cita-cita pendidikan yang tercantum dalam UUD 1945.

Sekolah Menengah Pertama PGRI Pengandonan turut juga dalam memberi corak bagi kehidupan sosial masyarakat Pengandonan termasuk masyarakat di sekitarnya. Di mana-mana dalam Wilayah Negara Republik Indonesia kekurangan sarana pendidikan sangat terasa. Ternyata Sekolah Negeri tidak mampu menampung seluruh anak yang ingin menikmati pendidikan menengah, lebih-lebih di daerah pedesaan seperti dalam Wilayah Kecamatan Pengandonan. Untuk itu maka peranan Sekolah Menengah Pertama PGRI Pengandonan adalah salah satu usaha menekan kekurangan sarana Pendidikan di Wilayah Kecamatan Pengandonan ini, terutama pada tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Sebagaimana Sekolah Menengah Negeri Ujanmas, Sekolah Menengah Pertama PGRI Pengandonan turut serta dalam usaha mencetak kader bangsa, mencerdaskan bangsa, serta menyiapkan putra-putra Indonesia yang disiapkan sebagai manusia siap mengabdikan dirinya bagi masyarakat, bagi negara, dan bagi agama. Sekolah Menengah Pertama PGRI Pengandonan adalah sebagai pelopor Sekolah Swasta yang turut membantu Pemerintah menyiapkan pendidikan menengah, terutama dalam

Wilayah Kecamatan Pengandonan. Dengan kenyataan ini, Sekolah Menengah Pertama PGRI Pengandonan termasuk dalam segala tindaknya sangat dominan memberikan sumbangan dalam segala corak kehidupan masyarakat Pengandonan dan sekitarnya.

BP3 sebagai organisasi yang bertujuan membantu, menunjang program pendidikan, sangat besar artinya bagi masyarakat dan Pemerintah, terutama bagi Sekolah yang tempat organisasi tersebut mengabdikan segala aktifitasnya.

Peranan BP3 yang paling menonjol adalah dalam membantu Sekolah untuk melengkapi sarana pendidikan seperti mendirikan gedung tambahan ruang belajar, peralatan administrasi Sekolah, perlengkapan ruang belajar, bahkan BP3 juga dapat membantu berupa santunan tambahan yang diberikan kepada pendidik. Dengan peranan yang tidak sedikit ini, BP3 sangat menentukan dalam setiap menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah tempat BP3 tersebut didirikan.

BP3 di Sekolah Dasar Negeri Pengandonan dan BP3 di Sekolah Menengah Pertama Negeri Ujanmas mempunyai fungsi yang sama seperti dikemukakan di atas. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi masyarakat Pengandonan, Ujanmas, bahkan bagi masyarakat di Wilayah Kecamatan Pengandonan.

Organisasi Pramuka di Pengandonan banyak sekali membantu Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kehidupan sehari-hari. Salahsatu usaha Pramuka adalah memberikan kesibukan yang bermanfaat bagi generasi muda, antara lain kegiatan baris berbaris, ketrampilan P3K, ketrampilan tali-temali, permainan aral rintangan, mempelajari sandi, mengenal lingkungan, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya. Pelajaran-pelajaran serupa ini adalah memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi Pramuka Pengandonan juga adalah wadah yang sempurna untuk pengarahan massa dalam berbakti kepada masyarakat, seperti untuk gotong royong membersihkan kampung dan sebagainya.

Pramuka juga merupakan wadah pemersatu, mengikat persaudaraan antar generasi muda, antar daerah, bahkan antar bangsa. Pramuka Pengandonan sering mengikuti kegiatan-kegiatan keluar daerah, seperti berkemah. Hal ini tentu saja memberikan pengalaman bagi anggotanya untuk meningkatkan atau mengembangkan diri, yang hasilnya akan dibawa kembali ke daerahnya, dan sekaligus juga memberikan dampak positif bagi desa Pengandonan dan sekitarnya.

Pengaruh Madrasah Muhammadiyah Kelumpang dengan segala kegiatan organisasi yang ada di dalamnya sangat besar sekali, karena hampir dalam segala kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, terutama kegiatan yang erat hubungannya dengan agama Islam. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang dengan segala organisasi yang ada di dalamnya selalu tampil sebagai pelopor. Tidak aneh kalau masyarakat merasa dekat dengan organisasi ini, karena masyarakat merasa memiliki Sekolah ini, sebagai milik pribadi. Lebih-lebih dengan tujuan wajib belajarnya. Seluruh masyarakat Desa Kelumpang merasa tergolong, karena sekolah telah mampu memberikan pendidikan kepada anak keluarga mereka, bahkan dengan melalui Madrasah Muhammadiyah Cabang Kelumpang ini mereka dapat mengirimkan anak mereka kepada jenjang pendidikan

yang lebih tinggi di tempat lain. Sehingga kini telah banyak yang menjadi Sarjana. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah telah menamatkan muridnya sejak tahun 1960, dan tentu saja jumlah tamatan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Cabang Kelumpang ini tidak sedikit.

BAB VIII ANALISA

Pengaruh Kebudayaan terhadap Sistem Kepemimpinan Pedesaan

Pada Bab delapan ini akan dikemukakan analisis terhadap bab-bab terdahulu. Hal-hal yang diolah dalam analisis ini menyangkut:

1. Pengaruh Kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan pedesaan;
2. Sistem kepemimpinan pedesaan sehubungan dengan sistem administrasi politik nasional;
3. Sistem kepemimpinan pedesaan dalam pembangunan nasional.

Dalam analisa inintidak dipaparkan berdasarkan urutan desa sebagai sampel. Setiap paparan analisa adalah gambaran keseluruhan dari apa yang ditemukan pada kedua desa yang dijadikan sampel, yaitu Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang. Paparan analisa yang akan dikemukakan, yaitu pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan pedesaan, sistem kepemimpinan pedesaan sehubungan dengan sistem administrasi politik nasional, dan sistem kepemimpinan pedesaan dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab terdahulu, terlihat bahwa pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan pedesaan sangat mendasar terutama pengaruh hukum adat yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya.

Maksudnya adalah bahwa sifat kebersamaan masyarakat masih betul-betul terlihat di dalam sistem kepemimpinan itu. Kadang-kadang sifat ini melampau batas-batas kepemimpinan seorang pemimpin. Sebagai contohnya dapat dikemukakan bahwa organisasi Karang Taruna mempunyai seorang ketua dan pengurus lainnya. Sewaktu organisasi ini menerima bantuan berupa peralatan kesenian, peralatan ini tidak saja digunakan oleh anggota Karang Taruna, tetapi juga oleh remaja yang tidak tergabung dalam organisasi ini bahkan digunakan juga oleh orang tua. Ketua dalam hal ini tidak merasa bahwa kepemimpinannya dilampaui oleh masyarakat karena sifat kebersamaan yang telah mentradisi itu. Selain dari contoh itu masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya.

Setelah itu, pengaruh-pengaruh yang datang kemudian hanya bersifat melengkapi saja dari hal-hal yang sudah ada dan mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Pola kehidupan sosial masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang seperti sudah dikatakan bahwa ruang gerak yang dijadikan landasan adalah Kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Pengaru-pengaruh yang dasan adalah Kitab Undang-undang Simbur Cahaya pengaruh-pengaruh yang lain seperti politik, ekonomi, pendidikan, agama dan sosial yang datang kemudian hanya bersifat melengkapi apa-apa yang sudah ada itu. Bagi hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan politik negara atau agama dapat diselaraskan atau disesuaikan sehingga tidak bertentangan lagi.

Masyarakat yang merupakan komunal dan hidupnya bersandar pada tanggung jawab kolektif serta memiliki kepemimpinan yang otori-

tafif yang semuanya ini didukung oleh nilai-nilai tradisi masih tetap bertahan walaupun di sana sini terjadi pergeseran dan penyesuaian. Pergeseran-pergeseran kecil ini dapat kita lihat seperti dalam penggunaan istilah, struktur dan pertanggungjawaban administrasi. Sedangkan fungsi dan tugas-tugas kepemimpinan tidak mengalami perubahan, masih tetap sama dan berlanjut. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kepentingan-kepentingan pada priode tertentu. Kepemimpinan yang mengikat dirinya dengan tradisi Kitab Undang-undang Simbur Cahaya tentu saja berubah setelah pemerintahan kolonial Belanda, Jepang, ataupun pada Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Baru setelah Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 perubahan sistem kepemimpinan jauh bergeser. Dampak positif atau negatif dari sistem kepemimpinan baru ini belum kelihatan.

Perubahan sosial yang menyangkut perubahan struktural masyarakat akibat perkembangan organisasi-organisasi sosial yang ada di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang cukup pesat. Perkembangan ini mendidik masyarakat mengenal kehidupan berbagai macam organisasi sosial. Tekanan organisasi ini terhadap lingkungan masyarakat yang kuat memegang tradisi dapat diterima. Namun, masyarakat tidak meninggalkan peranan utama kehidupan sosial yang sudah menjadi tradisi dalam hidup mereka. Sejauh itu organisasi sosial diserap dan mewarnai kehidupan masyarakat, hanya mampu melengkapi kehidupan tradisional yang sudah ada.

Pengaruh agama dan politik cukup besar membawa perubahan kehidupan masyarakat, terutama dalam sikap, berpikir kritis. Agama membawa kemantapan jiwa kebersamaan dan kegotong-royongan masyarakat yang sudah ada, memberikan keikhlasan dalam pertolongan serta mencoba mengatur tata kehidupan yang sudah mentradisional di masyarakat dengan menyelaraskan hal-hal tersebut dengan hukum-hukum agama. Memang terdapat segi-segi tradisi yang bertentangan dengan hukum-hukum agama. Dan hal tersebut secara berangsur dapat ditinggalkan dan kembali kepada ajaran agama. Dalam upacara tradisional selalu terselip nilai-nilai relegi, dan dalam upacara agama pun sering dilakukan dengan dukungan nilai-nilai tradisional. Kepentingan politik pun tidak terlepas dari kepentingan tradisional ini. Hampir seluruh kegiatan politik di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang ditentukan oleh jalur tradisional. Keberhasilan kegiatan politik harus ditentukan atau diukur oleh kepentingan tata kehidupan yang tradisional.

Kegiatan ekonomi modern tidak atau belum mampu membaaur dengan kegiatan tradisional. Kegiatan ekonomi modern tidak memasyarakat.

Dengan demikian, masalah ekonomi tidak dapat dijadikan ukuran untuk proses kepemimpinan di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang. Aktifitas ekonomi tidak mengubah fungsi, status atau tingkat lapisan sosial seseorang.

Dari beberapa penjelasan ini, maka diketahui bahwa pengaruh kebudayaan terhadap sistem kepemimpinan di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang sangat besar, kecuali dari segi ekonomi. Sistem kepemimpinan di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang memiliki ketentuan-ketentuan yang erat hubungannya dengan sosial budaya. Seorang pemimpin harus mempunyai pendidikan yang memadai, memiliki nilai

sosial yang tinggi di mata masyarakat, taat beragama, disegani masyarakat, serta harus mempunyai hubungan yang sejalan dengan nilai-nilai adat istiadat atau nilai-nilai tradisional. Seorang pemimpin akan memiliki dukungan yang sempurna bila ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi.

Sistem Kepemimpinan Pedesaan Sehubungan dengan Sistem Administrasi Politik Nasional.

Sifat masyarakat pedesaan di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang adalah kekeluargaan dan kekerabatan serta gotong royong. Tingkat dan taraf kehidupan mereka terikat dengan tata cara tradisional yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Di samping itu, ditempa pula oleh faktor sosial budaya, pendidikan, agama dan politik yang kemudian membaaur dengan faktor tradisional. Dari kenyataan ini, diketahui bahwa tata kehidupan masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang serta kompleks tetapi terarah pada dasar-dasar tradisional. Diketahui pula bahwa walaupun tata kehidupan masyarakat serba kompleks namun masyarakat enggan melihat, melakukan tata atau sistem yang formal di luar batas tradisional.

Sehubungan dengan sistem administrasi politik nasional yang berjalan sekarang, lebih-lebih setelah dikeluarkan keputusan pemerintah tentang pemerintahan desa, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, maka timbul pengaruh-pengaruh tertentu bagi kehidupan pedesaan.

Bagi masyarakat Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang terdapat bentuk pengaruh yang berbeda. Untuk masyarakat Desa Pengandonan, oleh karena merupakan Ibukota Kecamatan dan langsung di bawah pengawasan Camat, maka segala konsepsi pemerintah yang cenderung melahirkan struktur kekuasaan yang bersifat menolithe dengan kestabilan politik yang semu dapat diterapkan secara dini. Kontak-kontak organisatoris yang tradisional, organisasi sosial, organisasi pendidikan, dan organisasi lainnya yang sudah mendarah daging dalam masyarakat semakin terbatas ruang gerakannya. Untuk masyarakat Desa Kelumpang kestabilan politik yang seperti ini ternyata tidak begitu menekan, Namun, bukan berarti bahwa permasalahan cukup ringan. Ternyata terjadi kesimpangsiuran fungsi organisasi. Di lain pihak tumbuh sifat individual karena kesempatan memegang pimpinan ternyata belum dapat menuruti aturan yang sebenarnya. Sehingga kecenderungan untuk menggunakan nilai-nilai moral solidaritas kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetangaan makin menipis. Dengan nilai kehidupan sosial masyarakat yang semakin rumit. Maka kehidupan masyarakat menghadapi kondisi desa yang mengalami kesukaran administrasi, konsultasi, dan komunikasi.

Di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang banyak terjadi jabatan rangkap sehingga seseorang akan memungkinkan memegang jabatan lebih dari satu. Hal seperti ini jelas tidak menumbuhkan sistem administrasi yang baik, karena tidak menghadapi persaingan yang ketat. Di samping itu, apakah mungkin seseorang yang memegang jabatan yang banyak ini mampu membagi waktunya untuk beberapa organisasi.

Dengan demikian Sistem Kepemimpinan yang dipakai sekarang dominasinya bagi berbagai struktur dan kegiatan Pemerintahan yang berlaku dalam masyarakat di kedua desa sampel berbeda. Di Desa Pengandonan sistem kepemimpinan yang berasal dari Sistem Administrasi Poli-

tik Nasional lebih mendominasi karena desa itu dekat dengan ibukota Kecamatan sedangkan di desa Kelumpang sisa-sisa Pemerintahan tradisional yang lebih mendominasi.

Sistem kepemimpinan tradisional sebagaimana dikemukakan terdahulu tidak dipakai lagi. Yang dipakai sekarang adalah sistem kepemimpinan yang berasal dari administrasi politik nasional. Dalam hal mengatur tata kehidupan di kedua desa sampel terdapat perbedaan dalam hal-hal dominasi ini.

Di desa Pengandonan ternyata bahwa sistem kepemimpinan yang berasal dari administrasi dan politik nasional lebih kuat jika dibandingkan dengan sisa-sisa Pemerintahan tradisional sedangkan di desa Kelumpang antara sisa-sisa sistem Pemerintahan tradisional dengan sistem Pemerintahan yang berasal dari sistem administrasi dan politik nasional terasa seimbang atau sama-sama kuat. Hal ini dikarenakan oleh desa Pengandonan lebih dekat dengan strata Pemerintahan tertinggi di Kecamatan itu sedangkan desa Kelumpang lebih jauh dari pusat Kecamatan sehingga kontrol dari atas juga jarang sekali secara langsung.

Yang dimaksud dengan banyak mendapat perhatian adalah bahwa para pemimpin yang mengelola masalah itu telah berhasil mengusahakan adanya pembangunan di bidang agama itu. Hal ini sedikit banyak menunjukkan bahwa pemimpin di desa ini benar-benar menciptakan kehidupan keagamaan yang baik.

Dalam sub bab ini memang lebih banyak mengemukakan kesulitan-kesulitan. Sebetulnya dari uraian itu sudah dapat disimpulkan bagaimana sistem kepemimpinan pedesaan dalam pembangunan nasional itu.

Para pemimpin di kedua desa sampel sebetulnya telah mengusahakan pembangunan ini lewat swadaya masyarakat. Oleh sebab itu, dana yang diserap hanya sedikit dan pembangunan yang dilakukan hanyalah pembangunan yang memerlukan biaya yang sedikit. Sedangkan pembangunan-pembangunan lain yang ada di dibidang non-fisik, seperti Karang Taruna, Pramuka, AMPI dan lain-lain hanyalah merupakan instruksi dari tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi, para pemimpinnya tinggal melaksanakan saja dengan mengelola dana yang diterima dari Pemerintah yang lebih tinggi.

Dalam hal pembangunan-pembangunan yang bersifat fisik dan memerlukan dana yang banyak yang tidak mungkin dijangkau oleh swadaya masyarakat, para pemimpin itu hanya menunggu saja dana dari Pemerintah yang lebih tinggi. Sebagai contohnya di bidang ekonomi, di kedua desa sampel belum ada pusat perekonomian misalnya pasar. Bahkan Koperasi yang dapat menampung dan memasarkan produksi rakyat pun belum ada.

Hal ini mungkin disebabkan karena para pemimpin yang menjabat jabatan pada waktu penelitian ini dilakukan merupakan pemimpin-pemimpin yang bersifat sementara. Pemilihan kepala Desa dan perangkat Desa lainnya masih dipersiapkan.

Selama ini Pemerintahan Desa dijalankan oleh Pasirah yang membawahi Kerio, maka kegiatan pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena Pasirah dapat mengetahui langsung kehidupan masyarakatnya. Dengan Undang-undang Pemerintah Nomor 5 tahun 1979 dikhawatirkan Pemerintahan pedesaan dengan pembang-

unan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Pemikiran seperti ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Administrasi Pemerintahan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena ternyata di Desa Pengandonan dan Desa Kelumpang yang menjalankan Pemerintahan Desa dengan administrasinya adalah orang-orang yang tidak mendapatkan pengalaman administrasi sebab yang diangkat adalah bekas-bekas Kerio, yang selama ini menjalankan Pemerintahan hanya bersifat oprasional.
2. Dengan adanya sentralisasi Pemerintahan di atas kepala Desa, dikhawatirkan sistem administrasi dan kontrol Pemerintahan di atasnya (Camat) tidak mencapai sasaran yang tepat.

Dari kenyataan di atas timbul sistem kepemimpinan yang kegiatannya tidak mendasar dari lapisan masyarakat. Bagi lapisan masyarakat awan akan terus terbenam dalam nilai-nilai tradisi tanpa menemukan perkembangan yang positif. Sebaliknya bagi orang-orang tertentu menimbulkan kesempatan yang bersifat individual, sehingga tujuan pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran beralih menjadi membesarkan jurang pemisah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Dengan kekuasaan yang disentralisasi menutup kemungkinan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lebih-lebih sesuatu yang diperlukan dengan cepat. Kepala Desa sebagai administrator Pemerintah berbalik fungsinya menjadi tenaga operasional Pemerintah atasannya. Padahal Desa merupakan pola kehidupan yang kompleks dan rumit.

Sistem Kepemimpinan Pedesaan dalam Pembangunan Nasional : Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual.. Dan perlu diingat bahwa pemerataan pembangunan ini harus dapat dinikmati oleh seluruh bagsa. Setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak bagi kemanusiaan.

Ternyata dalam masyarakat pedesaan apa yang dicantumkan dalam GBHN tersebut masih perlu dipertanyakan. Sampai sejauh mana kepemimpinan desa mampu berfungsi sebagai motor pembangunan desanya. Hal ini dipertanyakan karena apa yang telah menjadi program pembangunan secara nasional tidak seluruhnya mudah diserap dan diterapkan pada lingkungan masyarakat pedesaan.

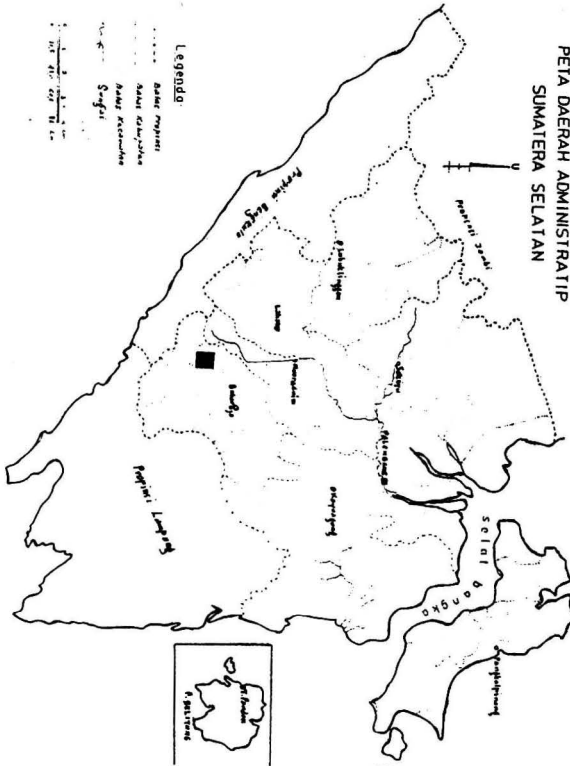
Bagi desa Pengandonan dan Desa Kelumpang masalah pembinaan remaja dan meningkatkan nilai agama telah banyak mendapat perhatian, sehingga banyak pembangunan di bidang mental spiritual sudah dapat dijalankan. Walaupun di sana-sini masih banyak sekali ketinggalannya. Untuk bidang-bidang lain, terutama di Desa Kelumpang hampir-hampir tidak tersentuh. Bidang pertanian, ekonomi tidak ada sama sekali perkembangannya. Masalah mobilisasi daerah hanya terdapat hubungan darat satu-satunya, dan hanya dapat dilalui oleh mobil yang kecil. Kondisi jalannya sungguh tidak memadai. Padahal faktor perhubungan ini merupakan faktor yang sangat vital. Akibat perhubungan ini tidak lancar maka banyak hasil pertanian tidak dapat dipasarkan dengan baik. Objek wisata seperti air mendidih, air terjun tidak mampu dikembangkan. Kekayaan alam lainnya masih banyak yang belum tejamah. Sebaliknya komunika-

si dan informasi dari kota juga sangat terbatas karena perhubungan yang tidak lancar ini. Faktor pendidikan pun menjadi masalah. Di Desa Kelumpang tidak terdapat sekolah negeri. Satu-satunya sekolah adalah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Ini pun berjalan dengan sarana dan peralatan yang belum memadai. Gurunya adalah tenaga sukarela tanpa mendapat imbalan yang setimpal. Di Desa Pengandonan memang sudah terdapat sekolah negeri, bahkan terdapat pula sekolah menengah pertama. Tetapi faktor sarana dan fasilitas, terutama dalam pengadaan tenaga pengajar masih jauh dari cukup. Sudah setaputnya sekolah-sekolah di pedesaan seperti ini mendapat perhatian utama karena pendidikan adalah faktor utama untuk mencerdaskan bangsa. Di samping itu hampir sebagian besar masyarakat pedesaan memerlukan betul sarana pendidikan itu berada di sekitar mereka.

Disimpulkan bahwa masih diperlukan kerja keras untuk memertakan pembangunan di pedesaan. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terutama bagi pemimpin desa.



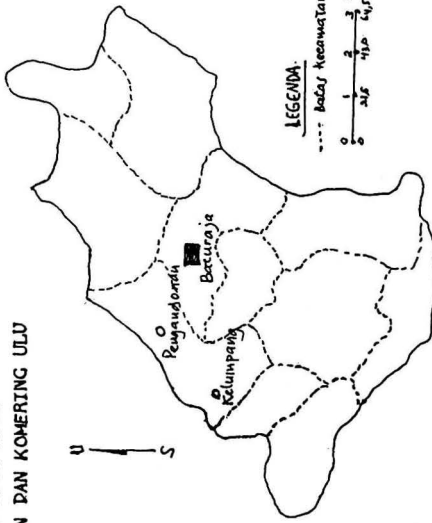
PETA DAERAH ADMINISTRATIP
SUMATERA SELATAN



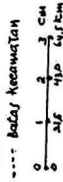
Legenda

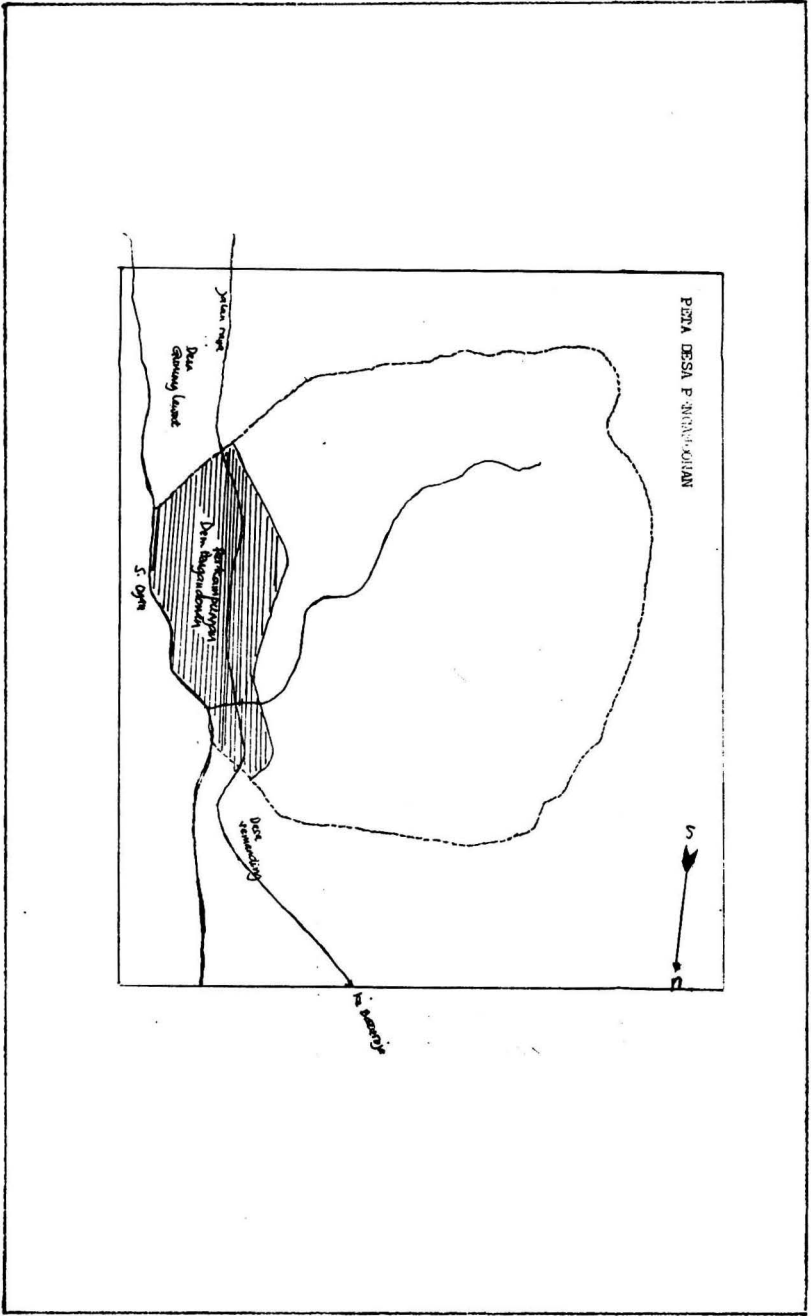
- Daerah Propinsi
- Daerah Kabupaten
- Daerah Kecamatan
- Sungai

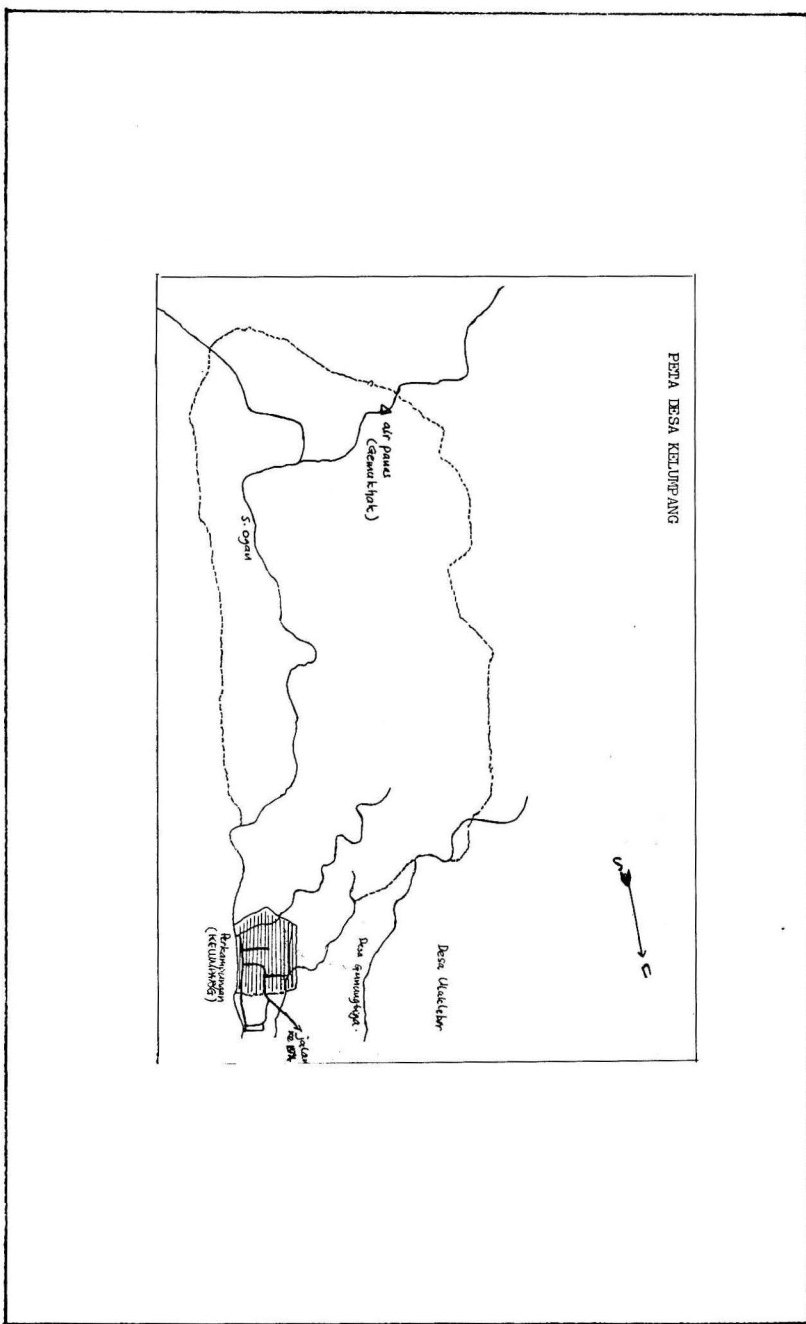
PETA KABUPATEN
OCAN DAN KOMERING ULU



LEGENDA.



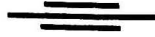




DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Sutan TAKdir 1979, Puisi Lama. Cetakan Cetakan ke-7. Jakarta : PT Dian Rakyat.
- Anggaran Dasar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. 1979. Anggaran Rumah Tangga Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia 1981.
- Berg. Mr. L.W.C van Den. 1897. **Oendang-oendang Simbor Tjahaja**. Batavia Aberecht Commpany.
- Boedenani. H. 1974. **Sejarah Sriwijaya**. Cetakan kesatu. Bandung: Tarate. CV. Usaha Nasional Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 5. 1979. Peraturan tentang Pemerintahan Desa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri. 1974. Instruksi Bersama Nomor 17/0/1974 dan Nomor 29/1974 tentang "Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan."
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1978. **Lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta. 1983.
- Pola Penelitian Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan**.
- Hizbullah. An. 1976.
- Aku Jadi Pramuka. Stensilan. Palembang.
- Koentjaraningrat. 1975. **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia** Jakarta: Djembatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- Keraf, Gorys. 1980.
- Komposisi**. Cetakan keenam. Ende Flores: Nusa Indah.
- Kantor Statistik dan Bappeda, Kabupaten Ogan Komering Ulu. 1981.
- Ogan Komering Ulu dalam Angka**.
- Kantor Statistik dan Bappeda, Kabupaten Ogan Komering Ulu. 1978/1980. **Ogan Komering Ulu dalam Angka**.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 1976. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kedudukan Hukum dan Lambangnya Gerakan Pramuka. Jakarta.
- Pasha, Mustofa Kamal dan Kusnan Jusuf. 1975.
- Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam**, Cetakan ketujuh. Yogyakarta Persatuan.
- Prasadjja, Buddy. 1980. **Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya**. Jakarta: CV. Rajawali.
- Pimpinan Pusat (Lajnah Tanfidziyah). 1980 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Syarikat Islam. Jakarta.
- Rosidi, KH. Sahlan. 1982. **Kemuhamediayaan**.
- Untuk Perguruan Tinggi. Jilid 2.
- Team Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar Prasekolah dan Pendidikan Luar Biasa bersama Dinas PD dan K, Propinsi Sumatera Selatan. 1974. Peraturan Tata Tertib Sekolah, Murid, dan Guru-guru Se-

kolah Dasar Negeri.
Surachmad, Winarno. 1972. **Dasar dan Tehnik Research.**
Cetakan kedua. Bandung : Tersito.



I N D E K S

- Abas 52
 Abas Dani 35
 Abubakar 99
 Abdul Hakim 107
 Abdurrohimi 83
 Abdurroni (A.Roni) 48, 99, 101
 118, 119.
 Abti 74.
 Aji Remas 19
 Aji Selabung 19
 A. Kohar 35, 36, 53, 58,
 Aisyiyah 76
 Allah 98
 Ali Husin 35, 59
 Alisyahbana 28
 Al-Kalam 142
 Al-Munawarah 93, 99, 100
 Amir Hamzah 115
 AMPI 46, 47, 48, 50, 88
 Analisis 5
 Andai-andai 33
 Animisme 26, 27
 Anggrek Sakti 62, 63, 64
 Angket 5, 6, 148
 Arsi 41
 Arab 97, 98
 Asdi 99
 Asmawati 56
 Asnah 56
 Basyaruddin 107, 119, 123
 Bahasa Ogan 30
 Batin Alam 26, 44
 Gaib 2
 gamelan 27, 32
 Gemukkak 9, 31
 generator 28
 G. Liwat 8
 G. Tiga 10, 45
 Hadan 74
 Hamzir 52
 Hasani 52
 Hasdi 71
 Hindun 26, 27
 H. Imron 96, 97, 99, 100
 H. Umirtum 123, 126, 129
 Hupi 111
 huruf Ulu 30
 batu granit 10
 Baturaja 9, 79
 Belandang 45
 Belanda 20, 23, 24, 25
 belencong 130
 berdikir 33
 BP3 106. 117, 118, 120, 145
 Budha 26, 27
 Bunda 130
 bupati 39, 45
 Bukit Barisan 9
 Bustan 74
 Bustani 99
 Camat 8, 36, 42, 53, 151.
 Cik Aman 118
 Cisarua 3
 cupu 37

 Danau Ranau 22
 Dasa Dharma 127
 demang 21, 25
 depati 21, 25
 deskriptif 5
 Dewan Marga 40
 Djumhari 35
 dokumentasi 5, 6
 Dul Husin 73
 Ekonomi 1, 2, 3, 28, 29, 91
 Ermina 68, 74
 Formal 2, 36, 38, 43, 106
 formal tradisional 36, 38, 41
 fungsional 53, 58, 69, 126
 Kelumpang 5, 6, 7, 8, 9, 19 24
 26, 27 dst.
 kemit 40
 Kerjum 41
 Kesultanan Palembang, 19, 20,
 23
 Kerio 21, 25, 38, 39, 40. 41, 42,
 91, 152
 Ketagung 22
 K.H. Ahmad Dahlan 72
 Khalbi 83
 Khasdi 83
 Khotib 39, 94, 101.
 Kiayi 99
 Ki Hajar Dewantara 109
 Kisam 23

- Ibnu Hajar 41, 43, 71
 individu 2
 informasi 2
 informan 5, 6
 interpretasi 5
 interviu 5, 6
 IPM 142
 Irma 136
 Islam 23, 26, 27, 29, 30
 45, 75, 77, 88, 94, 100
 Jamis 52
 Jamri Reson 48
 Jepang 20, 21, 24
 jidur 33
 Jumiri 52
 Kabupaten OKU 5, 7, 8
 Karman 118
 Karang taruna 58, 62
 Madrasah 135, 137
 Majapahit 22
 Marpawi 52, 59
 marga 39
 Marhaki 35, 52, 59
 Marsusi 41, 74
 massa 5, 6, 28
 Maulana 115
 Mayusin 63
 Mazrah 68
 M. Aman 52, 59
 M. Alian 41, 71, 74, 101
 M. Din Nawawi 52
 M. Thalib 115
 M. Yanis 59
 M. Yoeni 119
 M. Yusuf 35, 99
 M. Zuber 119
 Mendingin 22, 23, 42
 mentradisi 150
 metode 4, 5
 Muaraenim 8, 9, 10, 22
 Muhammadiyah 29, 30, 72, 147
 Mulyadi 41, 63
 Nahu sharaf 97
 Nangula 83
 Nasiatul Aisyiyah 76
 nasional 148
 ngandon 19
 ngigal 32
 nonformal 2, 27, 36, 38, 106
 Kitab Undang-undang Simbur Ca-
 haya 19, 20, 23, 24, 28, 39, 40
 kolektif 149
 komunal 149
 komunikasi 5
 kompleks 2, 3
 Kuncan b. Husin 35, 52
 KUD 92
 Kwarcab 125
 Kwarda 129
 Lajrah Tanfidziah 84
 Lampung 23
 Lengkayap 23
 LKMD 36, 51
 LMD 40, 46
 lokasi 8
 Pancasila 57, 85, 116
 panjang-panjang 33
 pamong desa 21, 25
 Panik 74, 136
 pantun 34
 pasirah 21, 25, 35, 38, 39, 41,
 152
 Padataran 45
 Pengandonan 5, 7, 9, 26, dst.
 penggawa 21, 25, 39, 41
 pembarap, 21, 35, 40
 Perangguhan 33
 PGRI 115, 116, 143, 145
 PKK 46, 53, 56, 62, 66, 89
 P3K 125, 146
 P3NTPCR 93, 94, 101, 103
 pitsolik 9
 politik 1, 2, 3
 populasi 4, 7
 Pramuka 107, 122, 124, 146
 Propinsi Sumatra Selatan
 3, 7, 8, 10, 24
 PSII 82
 Qasidah 97
 Rawas 23
 rebana 7
 relegi 150
 responden 6, 7
 rendom 7
 ritual 23, 26
 Ruaini 56
 Rumsirman 53

Observasi 5
 otoritatif 149
 Sabiah 52, 56
 sampel 6,7
 Samikerian 35, 38, 45
 Sanusi Saleh 123
 Sawiyah 68
 Semende 22
 Semending 8, 107
 siah 68
 Sidah 136
 Sitarmin 71
 sosial 1, 2, 3, 6, 46
 sorban 98
 Sobri Daud 48
 Sriwijaya 22
 studi 4
 studi Komparatif 5,6
 struktural 27
 Sukajadi 45

 Subardi 74
 Suldinani 41, 63, 74
 Suparman 111, 118
 Surakhmad 5
 sultan 20
 Suryati 68
 SD 113
 SDI 82
 SMTP 113, 117
 SMTA 113, 117
 S. Ogan 8, 9
 syahadat 141
 syair 34
 Syamsir Alam 52
 Syarikat Islam 30, 62, 82,
 86, 87, 104

 Rusli 52, 118

 Tabroni 118
 Tamsun 63
 Tanjungan 107
 Tanjung Laut 22
 teknik 4, 5
 teknis 3
 teknologi 3, 34
 tembang 33
 Temenggungan 45
 trans Sumatra 9, 11
 tri sula 51
 tufa vulkan 9
 tulisan angka 30
 tulisan Arab Melayu 30
 Tunas Harapan 59, 60, 61
 tunas kelapa 127
 Tut Wuri Handayani 109, 114

 Ujan Mas 111, 120, 144
 Umar Hanan 42, 45, 66
 Ulak Lebar 19, 45
 Ulu Tenggara 19

 Yacik 123, 126, 130
 Yanda 130
 Yasimah 74, 136
 Zainal Abidin 48, 123
 Zainuddin 71, 74

**JADWAL KEGIATAN KERJA
PROYEK IDKD SUMATERA SELATAN TAHUN 1983/1984**

Kegiatan Waktu	Tahun 1983									Tahun 1984			
	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept.	Okt	Nop.	Des.	Jan.	Peb.	Mart	April
1. Penyusunan TOR													
Oleh Tim Pusat	=====	=====											.
2. Training Ketua Tim daerah ke pusat, persiapan dan bimbingan teknis Tim daerah			=====										
3. Penelitian lapangan				=====	=====								
4. Pengolahan data							=====						
5. Penulisan lapopran dan editing									=====	=====			
6. Penggandaan										=====			
7. Penyerahan Laporan											=====		***

Pra evaluasi oleh Tim Pusat
Tim Pusat akan mengadakan monitoring kegiatan kerja Tim Daerah sejak bulan Juni hingga Maret 1984.

Pemimpin Proyek IDKD Sumsel
dto.

Drs. Zainal Abidin Hanif
NIP 130232522

LAMPIRAN I

LAMPIRAN 2

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
P A L E M B A N G.**

Nomor : 430.003070/XI/1983 **13 Juni 1983**
Lampiran :
Perihal : **Bantuan dan bimbingan
penelitian kebudayaan.**

Kepada Yth.
Sdr. Bupati/Walikota KDH Tingkat II
di
Sumatera Selatan.

Dengan hormat,

Dipermaiklumkan bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Selatan tanggal 7 Juni 1983 Nomor 4884/I.11.2D/A2.83 tentang adanya kegiatan penelitian kebudayaan daerah Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan bantuan Saudara untuk memberikan kemudahan serta bimbingan apabila yang diteliti dalam daerah Saudara.

Adapun aspek kebudayaan yang diteliti dalam daerah Sumatera Selatan tahun 1983/1984 terdiri dari :

1. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan.
2. Upacara tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam.
3. Sosialisasi pada perkampungan yang miskin di kota.
4. Modernisasi terhadap hubungan kekerabatan.
5. Ungkapan tradisional yang ada kaitannya dengan silasila dalam Pancasila.

Demikianlah agar Saudara maklum dan dapat memberikan perhatian seperlunya.

A.n. Gubernur/KDH TK I Sumsel.
Sekretaris Wilayah Daerah
dto.

DRS. H. M. ARMA.
NIP 010059557

Tembusan kepada Yth.

Sdr. Kakanwil Dep. P dan K
Propinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN 3

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telp. No.24137 - 21233 Palembang.

Nomor ; 4885/I.11.2D/A2/A2.83 7, Juni 1983
Lampiran : -----
Pokok : Fasilitas penelitian
Kebudayaan di Daerah
Sumatera Selatan

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kandep P dan K
Kabupaten /Kotamadya
di
Sumatera Selatan.

Dengan hormat,

Sebagai lanjutan kegiatan penelitian dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan (IKD) tahun lalu, maka dalam tahun anggaran 1983/1984 penelitian ini akan diteruskan kembali. Dasar pelaksanaan adalah Surat Keputusan Menteri P dan K RI tanggal 14 Maret 1983 No. 0180/P/1983.

Untuk kepentingan penelitian maka petugas peneliti IDKD SS akan datang ke daerah Saudara dalam rangka meneliti aspek-aspek:

1. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan.
2. Upacara tradisional dalam kaitannya dengan peristiwa alam.
3. Sosialisasi pada perkampungan yang miskin di kota.
4. Modernisasi terhadap hubungan kekerabatan.
5. Ungkapan tradisional, yang ada kaitannya dengan sila-sila dalam Pancasila.

Harapan kami kiranya Sdr. dapat membantu fasilitas serta keperluan bagi petugas peneliti tersebut demi tercapainya hasil yang sebaik-baiknya dari kelima aspek di atas sebagai usaha mengembangkan kebudayaan di daerah Sumatera Selatan.

Demikianlah dan atas segala perhatian serta bantuan Sdr. sebagaimana mestinya tak lupa di ucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI SUMATERA SELATAN

dto.

DRS. AHMAD MUSA
NIP. 1300366246

LAMPIRAN 4

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH
SUMATERA SELATAN
Jalan Kapten A. Rivai Telp. No. 24137 Palembang**

SURAT TUGAS

NO. 48/IDKD/VI/83/SS

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan menugaskan saudara :

1. Dra. Latifah Ratnawati, sebagai Ketua/Anggota;
2. Drs. Tarmizi Mairu, sebagai Sekretaris/Anggota;
3. Drs. Zainal Abidin Hanif, sebagai Anggota, dan
4. Drs. Umar Zipin Marbe, sebagai Anggota.

Untuk mengadakan penelitian Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan aspek "Sistem Kepemimpinan dalam Masyarakat Pedesaan".

Mohon bantuan Saudara terhadap peneliti tersebut agar mereka mendapatkan data yang lengkap sebagai bahan laporan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan tahun 1983/1984 sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah dan menunjang pembangunan kebudayaan Nasional.

Atas segala bantuan serta perhatian pihak yang dihubungi tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Pelembang, 27 Juni 1983

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan

Pemimpin,

dto.

DRS. ZAINAL ABIDIN HANIF
NIP 130232522

LAMPIRAN 5

Gambar 1.
Lambang AMPI



Gambar 2.
Lambang Muhammadiyah





Gambar 3.
Lambang Pemuda Muhammadiyah



Gambar 4.
Syarikat Islam



*Gambar 5.
Lambang Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan*



*Gambar 6.
Lambang Majelis Pendidikan
Muhammadiyah*

Gambar 7
Tanda Pelantikan Pramuka
Tunas Kelapa di Tengah
Lambang Pramuka



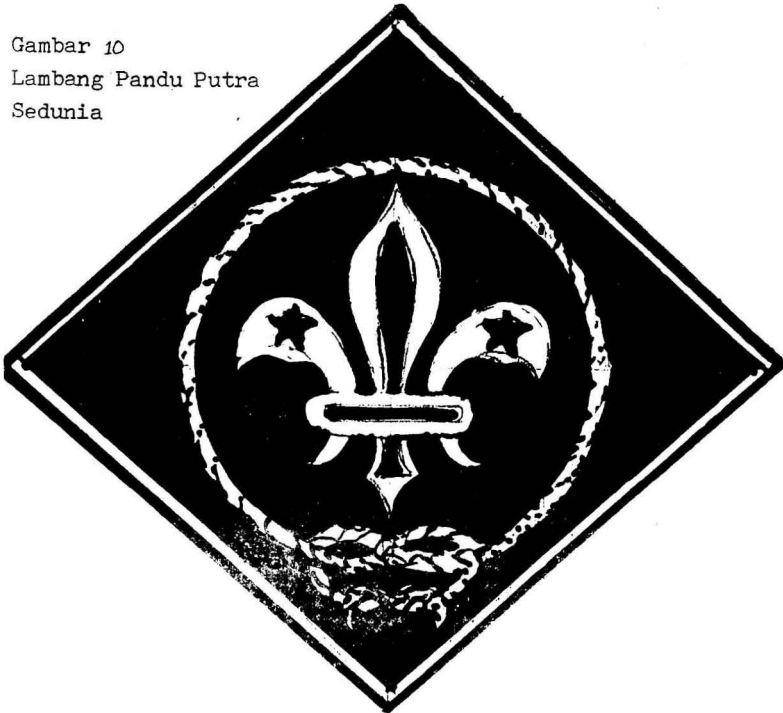
Gambar 8
Lambang Badge
Kwarda Sumater
Selatan

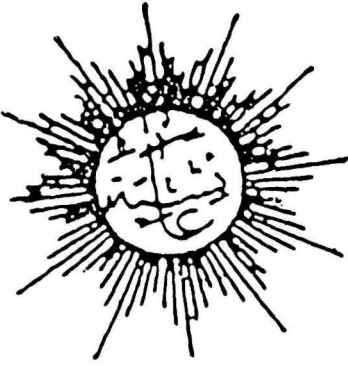




Gambar 9
Lambang Pandu
Putri Sedunia

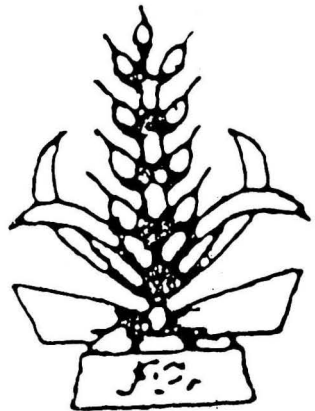
Gambar 10
Lambang Pandu Putra
Sedunia

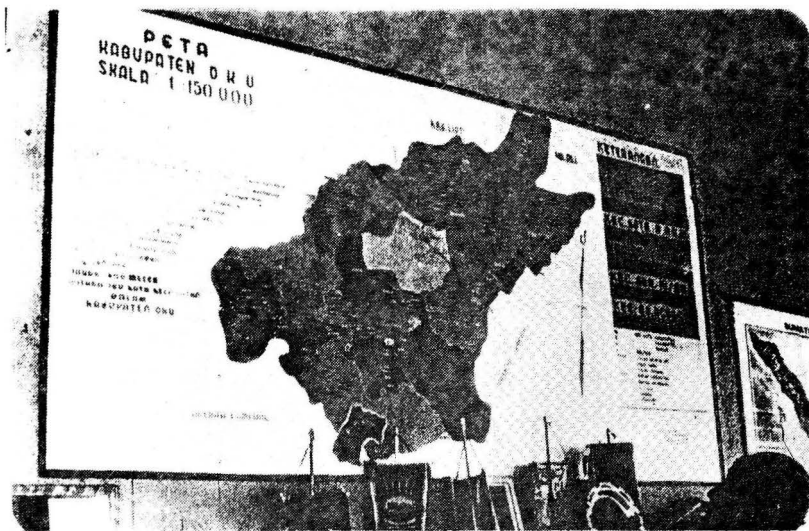




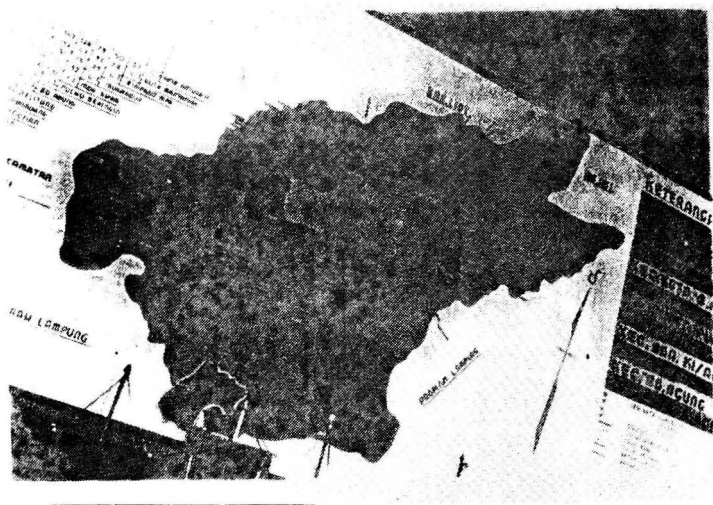
Gambar 311
Lambang Aisyiyah

Gambar 412
Lambang Nasyyiatul Aisyiyah



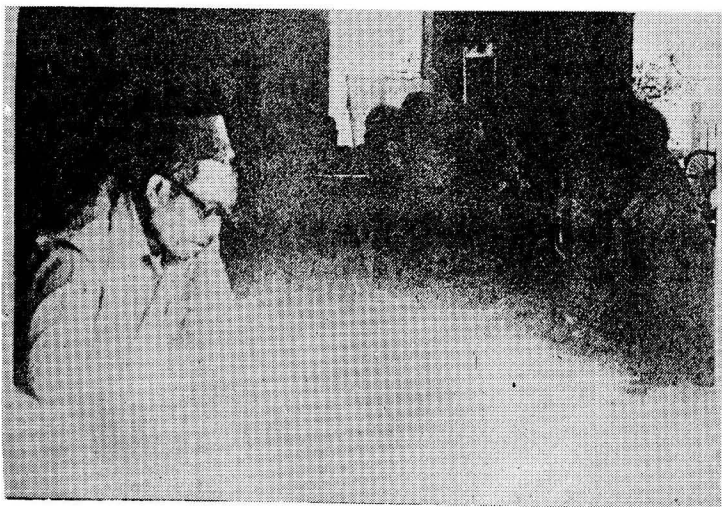


Gambar 13.
Peta Kabupaten OKU





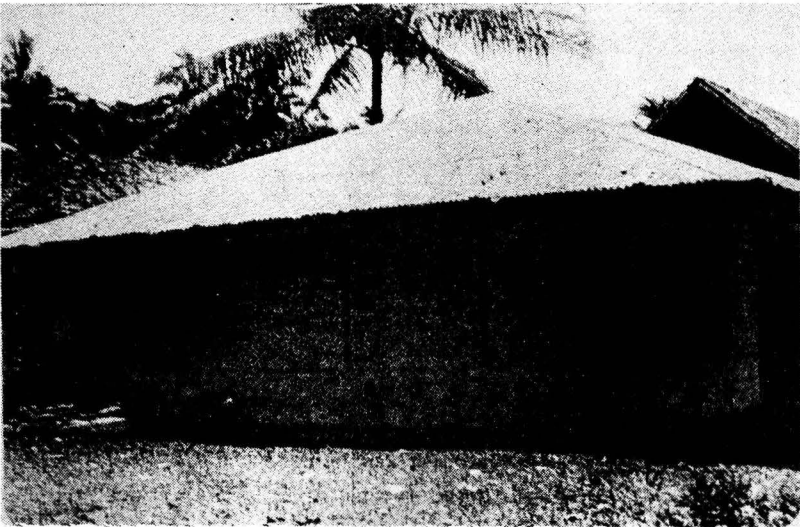
Gambar 14.
Responden dan informan desa Pengandonan.



Gambar 15.
Suasana tanya-jawab dengan informan

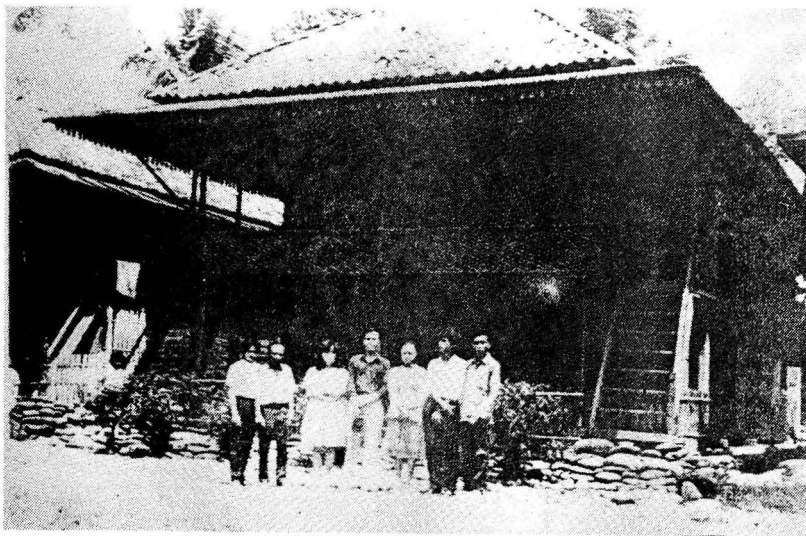


Gambar 16.
Balai Desa Pengandonan





Gambar 17



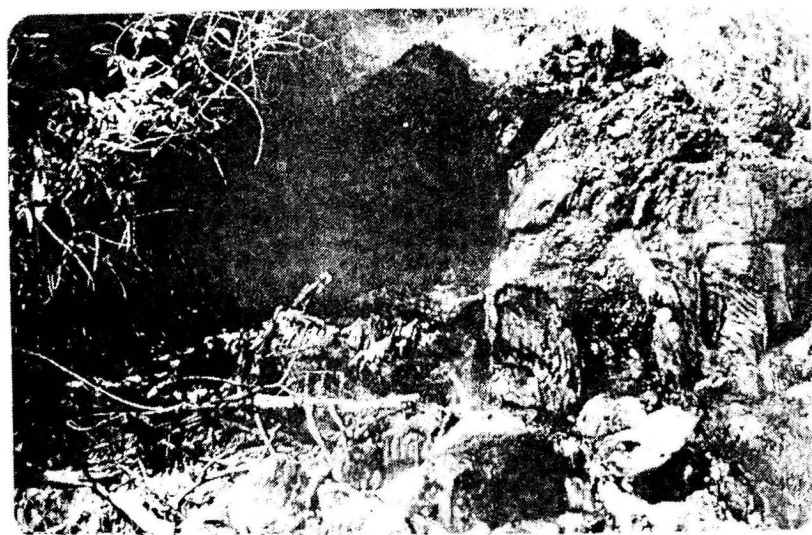
*Gambar 18.
Responden dan rumah penduduk desa Kelumpang*



Gambar 19.
Desa Kelumpang



Gambar 20.



Gambar 21.
Objek rekreasi Gemukhak

LAMPIRAN 6

DAFTAR INFORMAN / RESPONDEN

1. Nama : A. Kohar
Umur : 54 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : a. Utama : Kepala Desa Pengandonan
b. Sembilan : Tani
Alamat : Desa Pengandonan
Pendidikan : Norfolk School (SR zaman Belanda)

2. Nama : H. Imron
Umur : 74 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : a. Utama : Pensiunan KUA
b. Sembilan : Mengajar Mengaji
Pendidikan : Madrasah Sulthiah Mekah/Gouvernement
Alamat : Desa Pengandonan

3. Nama : A. Roni
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : a. Utama : Kakandep Dikbudcam
b. Sembilan :
 1. Ketua Ampil Desa Pengandonan.
 2. Ketua Ikatan Remaja Mesjid Al-Munawarah Desa Pengandonan.
 3. Ketua BP3 SMP Negeri Ujanmas.
Pendidikan : KPG
Alamat : Desa Pengandonan.

4. Nama : H. Umirtum
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : a. Utama : Pegawai Negeri di Kandep Dikbudcam.
b. Sembilan : Pembina Pramuka
Pendidikan : SPG
Alamat : Desa Pengandonan.

5. Nama : Sabiah
Umur : 50 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : a. Utama : Tani
b. Sembilan : Ketua Kelompok PKK
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Pengandonan.

6. Nama : A. Rohim
 Umur : 36 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Guru SD
 b. Sambilan : Dagang
 Pendidikan : KPG
 Alamat : Desa Pengandonan
7. Nama : A. Yoeni
 Umur : 55 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Pegawai Penmas
 b. Sambilan : Tani
 Pendidikan : KPG
 Alamat : Desa Pengandonan
8. Nama : Umar Said
 Umur : 40 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Guru SD
 b. Sambilan : Tani
 Pendidikan : KPG
 Alamat : Desa Pengandonan
9. Nama : Suparlan
 Umur : 42 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : ---
 Pendidikan : SR
 Alamat : Desa Pengandonan.
10. Nama : Hairi
 Umur : 50 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : ---
 Pendidikan : SR
 Alamat : Desa Pengandonan.
11. Nama : Rum Sirman
 Umur : 24 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : Ketua Karang Taruna.
 Pendidikan : SD
 Alamat : Desa Pengandonan.
12. Nama : Basyaruddin
 Umur : 39 tahun
 Agama : Islam

- Pekerjaan : a. Utama : Pegawai Negeri (Kepala SD)
 b. Sambilan : ---
 Pekerjaan
13. Nama : Ali Usin Mungga
 Umur : 35 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Pegawai Urusan Administrasi Keuangan Desa Pengandonan.
 b. Sambilan : ---
 Pendidikan : SD
 Alamat : Desa Pengandonan.
14. Nama : Martha
 Umur : 51 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : ---
 Pendidikan : SR
 Alamat : Desa Pengandonan.
15. Nama : Mohd. Din Nawi
 Umur : 60 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Pensiunan Pegawai Negeri.
 b. Sambilan : Tani
 Pekerjaan
 Pendidikan : HIS
 Alamat : Desa Pengandonan.
16. Nama : Sabaruddin
 Umur : 40 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Guru SD
 b. Sambilan : ---
 Pendidikan : SGB
 Alamat : Desa Pengandonan
17. Nama : Hasani Amir
 Umur : 32 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : ---
18. Nama : Roaini
 Umur : 30 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : ---
 Pendidikan : SD
 Alamat : Desa Pengandonan.

31. Nama : Hadan
 Umur : 58 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : -
 Pendidikan : SD
 Alamat : Desa Kelumpang
32. Nama : Suryati
 Umur : 33 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Ketua II Kel. PKK
 b. Sambilan : Tani, Guru
 Pendidikan : PGA 4 Tahun
 Alamat : Desa Kelumpang
33. Nama : Yasinah
 Umur : 35 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Guru
 b. Sambilan : Tani
 Pendidikan : PGA 4 Tahun
 Alamat : Desa Kelumpang
34. Nama : Abti
 Umur : 53 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : -
35. Nama : Umar Hanan
 Umur : 54 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : -
 Pendidikan : Tsanawiyah
 Alamat : Desa Kelumpang
36. Nama : Hasdi
 Umur : 54 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Tani
 b. Sambilan : -
 Pendidikan : SD
 Alamat : Desa Kelumpang
37. Nama : Tamsun
 Umur : 25 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : a. Utama : Ketua I Kr. Taruna

Pendidikan : b. Sambilan : Tani
SMP
Alamat : Desa Kelumpang

38. Nama : Rumsirwan
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : a. Utama : Bendahara Kr. Taruna
b. Sambilan : Tani
Pendidikan : SMA
Alamat : Desa Kelumpang

*** **

Perpustakaan
Jenderal

30